

Penelitian dan Pengaruhutamaan Gender: Sebuah Pengantar

Widjajanti M. Santoso

Penelitian dan Pengaruhutamaan Gender: Sebuah Pengantar

Widjanti M. Santoso

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Penelitian dan Pengaruhutamaan Gender: Sebuah Pengantar

Widjajanti M. Santoso

LIPI Press

© 2016 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar/Widjajanti M. Santoso – Jakarta:

LIPI Press, 2016.

xvi + 165 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-854-7

1. Penelitian

2. Pengarusutamaan Gender

305.3

Kontributor penulisan : Agustina Situmorang, Ade Latifa, Aulia Hadi, Sentiela Oktaviana,
Jane Kartika Propiana, Jaleswary Pramodhawardhani
Copy editor : Tantrina Dwi A.
Proofreader : Sonny Heru Kusuma dan Sarwendah Puspita Dewi
Penata Isi : Nurhasanah Ridwan dan Rahma Hilma Taslima
Desainer Sampul : Rusli Fazi
Cetakan Pertama : November 2016



Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi

Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350

Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591

E-mail: press@mail.lipi.go.id

Website: lipipress.lipi.go.id

 LIPI Press

 @lipi_press

Daftar Isi



PENGANTAR PENERBIT	vii
KATA PENGANTAR DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER KPPPA	ix
KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN LIPI	xi
PRAKATA	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Gender Problem Kelembagaan	6
Tantangannya	6
Pengorganisasian Buku Ini	8
BAB 2 KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI INDONESIA	11
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Penelitian	16
Pengintegrasian Gender dan Anggaran Responsif Gender di Indonesia	21
Analisis Gender	24
Tahapan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	26
BAB 3 PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN: KONSEP DAN APLIKASI	31
Gender dan Konstruksi Sosial	31
Pengarusutamaan Gender sebagai Pendekatan	36
Pengarusutamaan Gender Sebuah Strategi Pemberdayaan	42
Gender dalam Pembangunan	49
Gender Dalam Kebijakan Pembangunan Dunia	54

BAB 4 REPRESENTASI KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN	
GENDER	61
Gender dan Penelitian	62
Status Gender dalam Penelitian	64
Peran Penting Gender dalam Penelitian	73
PUG dalam Penelitian	75
Gender dan Teknologi	79
Anggaran Responsif Gender	88
ARG Menerjemahkan PUG	94
BAB 5 PENUTUP: PUG ANTARA KEBUTUHAN DAN MASALAH	
KELEMBAGAAN	103
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN 1	
Pertanyaan Pemahaman Gender	117
LAMPIRAN 2	
Pedoman 1: Gender dalam Penelitian: Langkah demi	
Langkah	121
Dasar Argumen	122
Kenali Dirimu	126
Gender dalam Proses Penelitian	129
Posisi Gender dalam Penelitian	130
Data Terpilah	131
Gender dalam Desain Penelitian	133
Gender dan Penulisan	135
Gender dalam <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	137
Tips <i>Checklist</i>	137
Gender <i>Budget Statement</i>	138
Simpulan	138
Pedoman 2: Penerapan ARG, Proses, dan Tahapan	141
Mekanisme Anggaran Responsif Gender	147
KAK/TOR	148
Petunjuk Pengisian KAK/TOR	150
GLOSARIUM	153
INDEKS	157
BIOGRAFI SINGKAT	161



Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas adalah salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Persepsi gender yang diasosiasikan sebagai perempuan merupakan sebuah tindakan diskriminatif. Ini karena dalam pengertiannya, gender berkaitan dengan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Oleh karena itu, buku ilmiah populer berjudul *Penelitian Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar* ini hadir tidak hanya membahas tentang pentingnya gender secara teoretis, tetapi juga diikuti oleh paparan bahwa gender merupakan salah satu unsur pembangunan. Kemudian, paparan tersebut dikaitkan dengan beberapa aturan UU dan kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dan anggaran responsif gender (ARG) di Indonesia.

PUG adalah strategi untuk mengembangkan pengetahuan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender, baik itu dalam lingkup sosial maupun budaya. Sementara ARG merupakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, antara PUG dan ARG menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan sebab keduanya akan berjalan beriringan demi terciptanya kesetaraan gender.

Buku ini ditujukan bagi peneliti dan akademisi untuk membuat rancangan dan proposal penelitian yang sensitif gender. Selain itu, buku ini juga ditujukan bagi perencana untuk memasukkan gender sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari perencanaan di dalam lembaga yang bersangkutan.

LIPI Press



Kata Pengantar

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA

Seperti diketahui, separuh penduduk Indonesia adalah perempuan sehingga program pembangunan yang dilaksanakan harus memberi manfaat yang maksimal, adil, dan setara. Untuk itu, salah satu strategi pelaksanaan pembangunan nasional adalah pengarusutamaan gender. Pelaksanaan pengarusutamaan gender ini telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan proses pengintegrasian konsep, prinsip, dan isu kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Mekanisme pelaksanaan PUG diatur dalam berbagai peraturan. Bagian penting dalam proses pelaksanaan PUG adalah analisis gender. Analisis gender ini akan memberikan gambaran situasi kesetaraan gender yang kemudian menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Dalam proses analisis ini, digunakan data dan informasi yang berasal antara lain dari penelitian sehingga penelitian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan PUG. Selain itu, dengan adanya strategi pengarusutamaan gender di dalam pembangunan nasional, semua kegiatan pembangunan, termasuk penelitian, seharusnya dilakukan agar menjadi responsif terhadap isu-isu gender. Setiap

kegiatan penelitian yang terkait dengan manusia, dan akan berdampak pada upaya untuk manusia, harus mencakup prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam metodologinya. Dengan demikian, setiap penelitian akan mengungkap situasi dan kondisi kesetaraan gender pada subjek dan objek penelitian serta bagaimana dampak atau hasil penelitian dalam memberi manfaat untuk peningkatan pencapaian kesetaraan gender dalam semua sektor pembangunan dan bidang penelitian.

Buku ini merupakan perluasan dari sosialisasi tentang perempuan dan teknologi, di mana diseminasi pemahaman tentang gender menjadi sebuah perhatian penting. Hal ini juga merupakan bagian dari amanah program pembangunan nasional di bidang penelitian. Sosialisasi yang sudah berjalan sejak tahun 2013 diikuti oleh pengembangan pedoman penerapan PUG di lembaga penelitian. Upaya ini dilakukan dalam kerja sama yang baik antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Widjajanti M. Santoso dan seluruh jajaran LIPI yang telah bekerja keras menyusun buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eko Novi Ariyanti dan Bapak Bambang Kristiono yang telah membantu penyusunan buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pakar gender, Dr. Yusuf Supiandi, Ir. Rini Soemarno, Dr. Yulfita Raharjo, Ibu Wati Hermawati, Dr. Sjamsiah Ahmad serta rekan-rekan lain yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga buku ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam kegiatan penelitian dan juga menjadi buku rujukan untuk pemahaman tentang gender, baik untuk para peneliti maupun masyarakat.

Jakarta, 2016
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Heru P. Kasidi



Kata Pengantar Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Tema gender tidak pernah sepi dan bahkan menjadi semakin marak dengan banyaknya kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Bagi masyarakat umum terdapat kesan bahwa membahas tentang gender berarti melibatkan perempuan dan terlupakan bahwa laki-laki merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan. Akan tetapi, dalam kenyataannya justru perempuan yang terlewatkan karena tidak terlihat penting. Pada pertemuan yang bersifat umum, tidak terpikirkan untuk memilah mereka yang datang berdasarkan gender dan perempuan terlupakan. Oleh sebab itu, terdapat representasi yang tidak memadai bagi keduanya. Dengan demikian, diasumsikan bahwa data yang diperoleh adalah bias gender.

Buku ini dikembangkan atas pemikiran bersama antara KPPPA dan Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK)¹-LIPI, dengan penekanan pada gender dalam penelitian. Prosesnya melalui beberapa FGD yang juga menjadi masukan bagi pengembangan buku ini. Tim penulis berterima kasih pada Yulfitra Raharjo, Wati Hermawati, Sjamsiah Achmad, Yusuf Supiandi, Rini Soemarno dan

1 Dahulu PMB-LIPI (Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan), akronim berubah pada tahun 2014.

juga masukan dari para perencana dan peneliti yang mengikuti proses ini. Dalam bentuk yang sederhana sebagian dari bahan ini sudah diterbitkan secara internal oleh P2KK bekerja sama dengan KPPPA (2013) dengan judul “Pengarusahaan Gender dalam Penelitian”. Bahan ini telah ditambahkan dan disempurnakan menjadi bahan yang baru karena penulis merasa bahwa bahan ini dibutuhkan oleh kalangan yang lebih luas. Selain itu, di masyarakat terdapat kebutuhan untuk meningkatkan jumlah bacaan untuk memberi kemudahan dalam memahami gender sebagai alat dan pendekatan. Penulis juga berterima kasih terhadap LIPI Press dan Dewan Editor LIPI Press yang telah memastikan perubahan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Target pembaca buku ini adalah pertama, bagi peneliti untuk memasukkan elemen gender dalam program penelitiannya. Dalam hal ini peneliti yang dimaksud tidak terbatas pada peneliti ilmu sosial, tetapi juga peneliti dari ilmu pengetahuan alam (*science*) dan teknologi, di mana sering kali gender dipertanyakan signifikansinya. Kedua, buku ini ditujukan bagi para perencana, para inovator untuk menghasilkan rancangan yang sensitif gender. Rancangan yang memenuhi kebutuhan berdasarkan gender menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ketiga, buku ini juga memberikan informasi bagi pembaca yang ingin tahu tentang gender dan bagaimana mengintegrasikannya di dalam kegiatan seperti di dalam penelitian.

Template ARG dikembangkan dari bahan yang dibuat oleh KPPPA atas nama Bambang Kristiono dan Eko Novi Ariani, yang menjadi pendukung utama dari kegiatan ini. Diskusi terus berlangsung, di antara kesibukan tiap-tiap individu, namun pengalaman ini sangat penting bagi pengembangan pemikiran, pengalaman dan tentu saja pengetahuan tentang gender. Beberapa informasi dalam buku ini merupakan terjemahan bebas dan saduran dari beberapa bahan, baik yang diperoleh secara langsung dari beberapa pelatihan tentang PUG, ARG dan kaitannya dengan teknologi, maupun secara *online*. Kontributor dari LIPI adalah Agustina Situmorang, Ade Latifa dari P2K, Jaleswari P., Aulia Hadi, Jane K Propiana, Sentiela Oktaviana dari P2KK. Bahan tersebut dija-

hit dan diperbaiki dengan penambahan bab dan informasi oleh Widjajanti M. Santoso.

Sebelum memulai ada baiknya kita bertanya pada diri kita siapakah kita berhadapan dengan gender. Pertanyaan ini adalah tentang memahami mengenai siapa kita dalam gender. Buku ini memberi masukan bahwa tidak penting apakah kita buta gender atau melek gender; tidak berarti penerapan gender harus menunggu hingga seseorang melek gender. Dalam pembelajaran dan pengetahuan gender, terdapat pemahaman tentang *“being gender”*, yaitu sebuah proses di mana individu semakin lama semakin matang pemahaman dan kesadaran gendernya. Karena *“being gender”* adalah sebuah proses, agak sulit untuk menunggu seseorang menjadi melek gender. Padahal dalam kehidupan keseharian terdapat kebutuhan untuk mengemukakan data terpilah gender untuk memperlihatkan masalah sosial yang lebih mendalam. Selain itu, kita perlu membuka wawasan melalui data terpilah gender untuk mencari solusi dan jalan keluar yang bijaksana.

Buku ini ingin mengantarkan bahwa gender adalah konsep yang mudah dipergunakan dan pada akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kompleks mengenai sesuatu hal atau masalah. Jika masih buta gender sekalipun, pendekatan ini dapat digunakan karena adanya kebutuhan akan data terpilah dan data pembuka wawasan. Data terpilah adalah data tentang sesuatu hal yang menggambarkan situasi sosial tentang laki-laki dan perempuan. Data terpilah adalah sebuah kebutuhan karena tanpa data terpilah maka informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perempuan akan sangat terbatas.

Mereka yang sudah melek gender dapat menggunakan pendekatan perempuan jika hal itu adalah pilihan teori dan metodologinya. Akan tetapi, mereka yang melek gender pun bisa menggunakan pendekatan lain yang disukainya. Mereka yang masih buta gender akan menggambarkan situasi sosial tentang gender, menggambarkan dengan data terpilah situasi sosial laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang salah dengan dua kecenderungan ini.

Draf buku juga sudah berubah beberapa kali mengikuti perkembangan dan masukan. Tentu saja informasinya semakin lama semakin lengkap. Meskipun kami merasa masih banyak informasi penting yang dapat dimasukkan, penulisan tetaplah memerlukan titik. Kerja sama dan sinergi kegiatan kelembagaan antara kementerian, dalam hal ini KPPPA dan LIPI, merupakan aktivitas yang sangat berarti dan diharapkan mampu mengisi kekosongan atau kekurangan informasi atau pengetahuan. P2KK LIPI mengharapkan yang terbaik dan berdoa semoga kegiatan ini membangkitkan Indonesia yang lebih baik.

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Dr. Sri Sunarti Purwaningsih



Prakata

Gender adalah konsep penting di dalam perkembangan ilmu secara umum dan khususnya bagi ilmu sosial. Konsep ini menjembatani kegalauan orang akan posisi yang terlihat membela hanya perempuan saja dengan posisi yang menunjukkan kondisi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan cara ini gender menjadi lebih ramah bagi masyarakat, dan dengan demikian memiliki keunggulan di dalam langkah-langkah intervensinya. Gender adalah strategi untuk mengembangkan pengetahuan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Strateginya disebut sebagai pengarusutamaan gender (PUG) yang diikuti dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang disebut sebagai anggaran responsif gender (ARG).

Pedoman ini digarap bersama-sama antara KPPPA dan PMB-LIPI dengan tujuan menyinergikan kebutuhan strategis dan praktis implementasi PUG dan ARG. Fokus pada proses penelitian dan lembaga penelitian adalah langkah strategis untuk mendiseminasikan pentingnya pendekatan ini. Buku ini adalah sebuah pengantar yang dapat dibaca secara individual untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Selain itu, buku ini merupakan informasi bagi lembaga penelitian untuk menerapkan PUG dan ARG. Buku ini menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi tentang PUG dan ARG secara bersama-sama dan mendapatkan pemahaman konseptual tentang gender itu sendiri. Dengan demikian, terlihat komitmen negara di dalam proses PUG yang diimplementasikan melalui ARG. Pengantar ini diharapkan dapat

memperlihatkan potensi sekaligus tantangan mengenai pendekatan gender.

Buku ini dibuat dengan beberapa langkah, awalnya tentu saja dibuka dengan diskusi tentang penting dan perlunya membahas PUG dan ARG. Kepentingan tersebut kemudian menghasilkan draf-draf tulisan yang berkembang berdasarkan masukan. Masukan bagi penyempurnaan pedoman ini diperoleh melalui serangkaian diskusi dengan narasumber ahli gender dan wakil dari beberapa lembaga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, seperti LIPI dan BPPT, dan kementerian lainnya seperti Kementerian Pertanian dan Kemkominfo.

Kami berterima kasih kepada Sarwendah dari LIPI Press yang sudah bekerja keras mengikuti perubahan naskah ini, juga kepada Joko Kristijanto yang membantu format awal dari naskah ini. Tidak terhitung rasa terima kasih kepada Haryati Chaerudin, sahabat yang turut mengomentari draf naskah ini. Sebagai penulis, masukan ramah pembaca adalah harta yang tak terkirakan. Semoga kehadiran buku ini dapat menyumbang ilmu sosial di Indonesia.

Selamat membaca.

Penulis



BAB 1

Pendahuluan

Bacaan dan bahan tentang pengarusutamaan gender (selanjutnya disebut PUG) dan anggaran responsif gender (selanjutnya disebut ARG) umumnya dibuat terpisah untuk kegiatan kemasyarakatan, misalnya program pemberdayaan, pencapaian target MDGs, dan kegiatan intervensi lainnya. Secara umum, PUG adalah mekanisme untuk mengintegrasikan gender di dalam semua kegiatan. Tujuannya untuk memperlihatkan adanya masalah gender dan kemudian menghasilkan upaya kesetaraan dan keadilan gender. Siapa pun membutuhkan pengetahuan ini dan cara mengintegrasikannya ke dalam program serta kegiatan yang ada.

Gender dan lingkungan adalah dua subjek yang memiliki pendekatan serupa, yaitu ada kepedulian untuk mengintegrasikannya dalam kegiatan dan kebijakan. Pendekatan ini disebut pengarusutamaan (*mainstreaming*). Ada pula perkembangan baru, seperti masalah anak, juga dikemas dalam pendekatan pengarusutamaan. Harapannya, masalah anak mendapat porsi perhatian yang semakin baik.

Buku ini menggunakan kata gender dan perspektif perempuan secara bergantian, meskipun kata gender merupakan konsep yang dominan. Hal tersebut dikarenakan dalam konteks yang membahas perempuan dan pembangunan telah terjadi berbagai perubahan dan inovasi—akan dijelaskan berkaitan dengan kebijakan dalam Bab 2. Gender sendiri bukan saja konsep, melainkan juga alat untuk meneropong situasi dan menjadi alat analisis. Sementara perspektif

perempuan merupakan perkembangan dari pengetahuan yang mengangkat situasi sosial tentang perempuan sebagai kritik terhadap pengetahuan yang ada yang bias gender. Melalui perspektif ini masalah gender dapat diungkapkan, terutama dalam situasi yang memperlihatkan adanya kesenjangan, marginalisasi, dan lainnya. Perspektif perempuan sendiri memiliki perkembangan keilmuannya sendiri. Tidak akan dibahas di dalam buku ini, melainkan sebagai pengantar saja. Pertimbangan ini merupakan bagian dari diskusi, seperti gender di dalam pembangunan atau perspektif perempuan di dalam pembangunan yang menekankan segi praktis tentang pengarusutamaan dan anggaran responsif gender.

Ada buku yang hanya menjelaskan tentang PUG, sementara buku lainnya hanya menjelaskan tentang ARG. KPPPA juga menerbitkan buku, misalnya, “Modul Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender” (2011), tetapi tidak tersedia dalam bentuk cetak bagi publik. Selain topiknya sangat terfokus, individu dan lembaga akan sulit menggunakan bahan tersebut tanpa adanya pelatih atau narasumber. Pendekatan lain adalah menggarap buku panduan, seperti “Panduan dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Perindustrian” (2012 cetakan ke-2). Buku tersebut menggambarkan upaya memasukkan gender dalam program internal kementerian yang bersangkutan karena menyangkut kebutuhan satker di bawahnya. Walaupun informasinya penting, buku itu tidak beredar di kalangan umum.

Ada pula buku yang membahas tentang pendekatan gender/perempuan. Tulisan Rachmad Hidayat (2004) menjelaskan tentang dasar filsafat dan pemikiran teori perempuan/gender. Hidayat menggunakan konsep seksisme untuk memperlihatkan dan menekankan adanya keengganan dan resistansi terhadap pendekatan gender/perempuan. Mansour Fakih (1996) yang bergerak dari sisi pemberdayaan menuliskan buku tentang pendekatan gender dan proses transformasi sosial. Fakih menjelaskan bahwa pendekatan gender bukan sekadar pendekatan metodologis atau teori, melainkan memiliki agenda pemberdayaan untuk transfor-

masi sosial menghasilkan masyarakat yang adil gender. Dalam konteks keilmuan, beberapa orang menggambarkan sumbangan gender dalam metode penelitian sosial (Abdullah 2003; Arivia 2006). Pada umumnya, bahan yang diperoleh dari perkembangan pendekatan gender dalam konteks keilmuan menggambarkan pentingnya pendekatan ini secara teori dan metodologi (Cook dan Fonow 1990). Bahan dari lembaga internasional, seperti UNDP atau UNWomen, umumnya menggambarkan pendekatan gender atau *gender mainstreaming* dengan mengemukakan masalah atau *lesson learned* negara-negara anggota PBB.

Berdasarkan paparan tersebut, buku ini memberikan penjelasan tentang PUG dan penerapannya di dalam penelitian, beserta turutannya, yaitu Anggaran Responsif Gender (ARG). Kebijakan sosial pro gender dengan mekanisme pengarusutamaan menjadi semakin kuat dan lengkap dengan sistem anggaran yang menunjang. Tujuan kebijakan pro gender adalah membuat kesetaraan gender menjadi realitas, bukan sekadar wacana. Buku ini menggabungkan PUG sebagai landasan pemikiran untuk mengintegrasikan gender dan ARG menjadi mekanisme menerapkan PUG. Tujuannya tentu untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang hal ini. Tujuan akhirnya adalah membuat kebijakan pro gender terlaksana pada tataran praktis.

Salah satu sisi strategis pendekatan ini melalui kegiatan penelitian adalah kebutuhan akan data terpilah gender. Data ini sangat dibutuhkan karena pendekatan gender menyatakan bahwa pengetahuan menjadi timpang akibat informasi yang diperoleh hanya berdasarkan informasi dari laki-laki saja (Smith 1990). Buku yang kritis mengenai hal ini merupakan upaya untuk memperlihatkan adanya ketimpangan dari sisi teoretis (Arivia 2006; Hidayat 2004; Smith 1990). Dalam kegiatan penelitian, muncul kebutuhan mengintegrasikannya karena ada asumsi bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan gender adalah penelitian tentang perempuan. Padahal tidak selalu demikian. Menggambarkan posisi gender di dalam masyarakat sangatlah penting untuk memperlihatkan ada atau tidaknya kesetaraan.

Buku ini menjawab sebuah kebutuhan atau tantangan membuat PUG dan ARG yang dikaitkan dengan program penelitian dan kegiatan di lembaga penelitian. Menggarap kedua isu ini secara simultan merupakan cerminan adanya kesenjangan antara kebijakan pro gender seperti di Perpres tentang PUG Nomor 9 Tahun 2000 dan kenyataan di lapangan. Gender berbicara atas kebutuhan dan situasi laki-laki dan perempuan. Sisi ini yang kurang tergarap karena adanya pemahaman bahwa gender berarti membahas perempuan. Oleh karena itu, isu kesetaraan gender menjadi isu yang penting, terlebih bagi peneliti yang memiliki posisi strategis dalam proses pengembangan pengetahuan. Bahan tentang kebijakan gender di Indonesia yang digarap oleh Darwin (2005) memperlihatkan kebijakan dan kelemahan institusional dan SDM dalam mendukung isu ini.

Bagi perencana, buku ini memberikan informasi tentang PUG dan ARG serta kebijakan gender di Indonesia, yang mendukung kegiatannya. PUG adalah kebijakan nasional untuk menciptakan keadilan gender, target *Millennium Development Goals* (MDGs), memperlihatkan bahwa secara agregat perempuan tertinggal dalam banyak hal, misalnya capaian bidang pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Perempuan tertinggal disebabkan adanya masalah gender, misalnya pandangan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi. Untuk itu, intervensi pada perempuan dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Sejak 2015 pola pembangunan dunia melalui MDGs digantikan oleh *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

Bagi peneliti, gender adalah bagian dari kebijakan nasional dan kebijakan global untuk secara seimbang menggambarkan masalah dari sisi laki-laki dan perempuan. Perdebatan tentang teori dan konsep gender menjadikan gender sebagai elemen penting untuk dipelajari dan dimasukkan ke dalam kerangka penelitian. Buku ini menyadari bahwa di satu sisi gender adalah posisi teori dan metodologi yang dipilih oleh peneliti, namun di sisi lain terdapat kebutuhan untuk mendeskripsikan masyarakat secara lebih setara. Penelitian tanpa memasukkan gender menghasilkan

pengetahuan yang seksis dan tidak menggambarkan situasi secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Imbauan awalnya adalah memberikan data dan informasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ini merupakan tujuan keilmuan sendiri, yaitu sejauh-jauhnya menghindari bias-bias ketidaksetaraan, salah satunya adalah ketidaksetaraan gender.

Dalam penerapannya, muncul kesenjangan antara kebijakan yang sudah disetujui dengan implementasinya. Salah satu hal yang diasumsikan memengaruhi kondisi tersebut adalah lemahnya representasi perempuan sebagai pengambil keputusan. Jurnal Perempuan Nomor 75 Tahun 2012 tentang Perempuan Pejabat Publik memberikan beberapa fakta penting, salah satunya adalah adanya representasi yang terbatas dari perempuan yang memegang pimpinan. Semakin tinggi eselonnya, semakin sedikit jumlahnya. Meskipun tidak ada jaminan bahwa perempuan sebagai pemimpin akan menerapkan kebijakan pro gender, paling tidak mereka sudah terimbas oleh masalah dan tantangan yang dihadapi perempuan.

Individu maupun lembaga yang memikirkan tentang PUG dan ARG dapat menggunakan buku ini, baik sebagai pedoman ringkas tentang penerapannya maupun sebagai pedoman yang lebih substantif. Buku ini mengantisipasi kebijakan nasional PUG dan ARG yang menekankan pentingnya memasukkan gender ke dalam program dan implementasinya. Dengan demikian, antara kebijakan dan penerapannya dapat diakses sehingga kebijakan PUG dan ARG dapat berjalan bersamaan secara harmonis.

Bagi mereka yang ingin tahu tentang keadilan dan kesetaraan, buku ini memberikan gambaran mengenai marginalisasi sebagai masalah gender. Para pembaca diajak keluar dari kotak masing-masing untuk memasukkan isu gender. Cara awalnya adalah dengan membuat data terpilah gender dari isu yang ingin kita kembangkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Data terpilah gender tidak hanya penting untuk mengangkat masalah khas perempuan atau sebaliknya, tetapi juga memperlihatkan masalah gender atau kebutuhan gender. Diharapkan jika berhasil dengan cara ini, peneliti atau perencana akan menjadi semakin

sadar mengenai pentingnya isu ini dan mengintegrasikannya dalam kajian mereka.

Gender Problem Kelembagaan

Mengintegrasikan gender adalah pertanyaan besar, terutama ketika membahas ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan ketiganya seakan sangat jauh dan berbeda. Buku ini berusaha membuatnya menjadi sederhana. Yang pertama, tentu saja perlunya data terpilih yang sudah dibahas di atas. Yang kedua adalah melihat kebutuhan laki-laki dan perempuan di dalam capaian yang ingin dihasilkan oleh kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gender menjadi pertanyaan besar dalam kajian sosio-biologi, namun hal ini tidak disinggung dalam buku ini. Artinya, meskipun secara keilmuan batas dan isu dapat dibahas dengan lebih mendalam, buku ini memberikan latar belakang dan tips yang memudahkan upaya memasukkan gender ke dalam program kegiatan yang kita kembangkan, salah satunya adalah isu SDGs. Bagian ini menyadur bahan, laporan, dan tulisan lembaga lain yang digunakan untuk *good practice* sebagai ilustrasi. Buku ini diharapkan dapat membantu pembacanya untuk memasukkan isu gender dalam proposal atau kegiatannya.

Buku ini mengangkat konsep gender, seperti perbedaan gender, ketimpangan gender, dan penindasan gender. Paparan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan mengaitkan isu gender dalam kegiatan dan penelitian. Penggunaan *template* ARG memperlihatkan bahwa individu atau lembaga perlu berpikir tentang sinergi antara penelitian dan penggunaan konsep gender untuk menghasilkan gambaran tentang kesetaraan gender.

Tantangannya

PUG dan ARG adalah kepedulian dunia untuk mewujudkan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kepedulian ini menjadi salah satu isu penting di badan dunia, seperti PBB, yang secara

khusus memberikan ruang bagi perempuan mengembangkan isu mereka. Data global negara anggota PBB menunjukkan masalah perempuan yang partisipasinya tidak terlihat dan kesejahteraannya mengkhawatirkan.

Meskipun PUG dan ARG adalah kebijakan nasional, gender juga merupakan pilihan teoretis yang bisa menimbulkan resistansi dari beberapa peneliti atau perencana. Kenyataan adanya keengganan atau ketidakpercayaan orang terhadap isu, pendekatan, dan metode penelitian gender, adalah sebuah tantangan. Hal ini perlu diterima dan dikaji agar diperoleh strategi baru untuk diterapkan dalam program dan implementasinya. Secara teoretis, gender terlihat sebagai elemen yang tidak penting, remeh, dan cenderung dilihat sebagai kegiatan untuk perempuan. Bahwa peneliti atau perencana perempuan cenderung memberikan perhatian yang lebih banyak adalah karena mereka secara individu melihat kebutuhan dan kepentingannya. Paparan tentang PUG dan kebijakan PUG menggambarkan bahwa gender adalah isu penting untuk dikembangkan. Namun, tidak berarti perempuan selalu mendukung. Ada juga peneliti perempuan yang resistan terhadap pemikiran ini, hal serupa terjadi pada peneliti laki-laki.

Meskipun dirasa penting, PUG seperti tidak kunjung maju dan berkembang serta masih sebatas wacana. Di dalam birokrasi tingkat nasional dan daerah—meski sudah ada bagian yang menanganinya itu—masalah perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga serta kematian ibu dan anak, kerap bermunculan. Selain itu, dalam wacana tentang PUG juga dibahas bahwa program membutuhkan penganggaran yang memadai untuk mendukungnya.

Salah satu analisis atas lambannya pengembangan dari kebijakan ini adalah sangat terbatasnya sumber daya manusia yang memahami isu dan pendekatan gender. Berdasarkan kebutuhan akan SDM yang melek gender, mengembangkan pengetahuan gender merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengarusutamaan gender. Analisis lainnya adalah kenyataan tentang adanya resistansi terhadap gender, menganggap ini hanya mengurus masalah perempuan saja. Gender mengurus persoalan

baik laki-laki maupun perempuan, walaupun kenyataannya posisi perempuan belum setara terhadap posisi laki-laki. Kesetaraan di sini merupakan situasi di mana akses dan kesempatan yang diperoleh perempuan tersedia, bukan berarti capaian perempuan harus sama dengan laki-laki.

Selain resistansi, penggarapan PUG dan ARG secara bersama-sama juga memberikan tantangan tentang proses integrasinya sendiri; apakah pada hal yang mendasar seperti data terpilah ataukah pada kebutuhan perempuan dan laki-laki. PUG dan ARG adalah pendekatan yang berusaha mengatasi resistansi yang ada dengan menekankan pada kepentingan laki-laki dan perempuan. Selain itu, PUG dan ARG juga menekankan pada pengarusutamaan sebagai strategi untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan gender.

PUG dan ARG sebagai kebijakan adalah sebuah mekanisme yang mengikat. Mekanisme ini merupakan kepedulian terhadap isu dan sebagai aktivitas memastikan bahwa gender menjadi bagian yang tidak terlewatkan. Pengarusutamaan adalah sebuah cara atau strategi yang mengembangkan mekanisme, pengetahuan, dan agen yang andal untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Pengorganisasian Buku Ini

Bagian pertama adalah pendahuluan yang dibuat dalam beberapa pembahasan sebagai pengantar singkat terhadap buku ini. Bagian ini menjelaskan konsep dasar PUG, ARG, dan gender itu sendiri. Bab selanjutnya terbagi atas tiga fokus penulisan. Fokus pertama memaparkan PUG sebagai kebijakan pro gender nasional hingga internasional. Di dalam bagian ini diceritakan bagaimana Indonesia bergulat untuk memasukkan ide ini di dalam kebijakan nasional. Melalui bagian ini, pembaca dapat mengikuti perkembangan dari fokus terhadap perempuan yang kemudian berkembang menjadi pendekatan gender dan bagaimana kebijakan PUG ini berkembang di Indonesia. Bagian selanjutnya adalah pengelompokan tentang konsep dan teori yang mengantarkan pemahaman teori, konsep,

dan metodologi tentang gender. Paparan ini merupakan upaya menggambarkan latar belakang gender sebagai sebuah pemikiran. Dalam bagian ini dipaparkan secara ringkas kaitan antara kebijakan pro perempuan dan perubahannya menjadi gender.

Bagian kedua merupakan upaya ringkas dalam bentuk pedoman yang dapat digunakan untuk melihat pemahaman diri sendiri tentang gender dan bagaimana memasukkannya di dalam desain penelitian. Bagian ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama merupakan upaya untuk memahami pemahaman diri sendiri tentang gender, sedangkan bagian kedua merupakan upaya praktis untuk memasukkan ARG di dalam desain penelitian atau program.

Pemahaman gender bagi diri pribadi akan memengaruhi peneliti yang memasukkan gender. Bagian ketiga membahas tentang gender sebagai metode penelitian. Gender adalah alat yang canggih, namun akan menjadi semakin bagus jika memahami konteks teoretis dan praktis dalam penerapannya. Di dalam Bab IV, yang membahas tentang metode penelitian dengan perspektif perempuan, dipaparkan tentang *good practice* kegiatan gender dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Juga ilustrasi bahwa gender tidak semata dibahas oleh ilmu sosial saja, tetapi juga di dalam ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi.

Dalam hal ini, sumber daya manusia menjadi penting, baik sebagai pendukung pemikiran ini maupun sebagai upaya melakukan pelatihan dan pembelajaran untuk memperluas pengarusutamaan gender. Namun, seperti telah disinggung di atas, buku ini juga memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender berkaitan dengan kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi target praktis dan strategis untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Buku ini menyadari bahwa pilihan individu berkaitan dengan kepentingannya. Buku ini menunjukkan bahwa salah satu kepentingan yang perlu dipertimbangkan adalah memasukkan elemen gender, baik dalam pengembangan individu, kebijakan, maupun kepentingan untuk memajukan kesejahteraan manusia.



BAB 2

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Pengarusutamaan adalah strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program atau aktivitas. Strategi dunia global ini kemudian diterjemahkan atau dipergunakan oleh negara-negara untuk meyakinkan bahwa isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam program dan perencanaan. Bagian ini memaparkan bagaimana Indonesia memahami konteks pengarusutamaan gender dan menerjemahkannya dalam kebijakan dan penganggaran. Ada serangkaian cara berpikir dan pengisian borang-borang sebagai bagian dari proses, baik PUG maupun ARG, atau anggaran responsif gender. Bagian ini memaparkan proses integrasi PUG dalam mekanisme perencanaan.

Didasari kuatnya kampanye PUG di tingkat global dan kesadaran pentingnya penyelenggaraan negara yang berdasarkan kesetaraan gender, Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan PUG dalam program pembangunannya. Khofifah Indar Parawansa, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP), memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender yang dituangkan dalam GBHN 1999–2004:

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;

- b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Darwin 2005).

Dengan landasan hukum tersebut, kesetaraan dan keadilan gender (KKG) menjadi visi Meneg PP yang ditindaklanjuti penyusunan Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan (Ripnas PP 2000–2004) (Darwin 2005).

Indonesia memiliki Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini menyatakan bahwa:

“...seluruh kantor Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk menerapkan PUG”.

Isi instruksi tersebut adalah:

- a. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
- b. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- c. Menteri Pemberdayaan Perempuan:
 - Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada presiden;

- d. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Melalui Inpres ini, isu yang terkait dengan gender dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani secara menyeluruh.

Pelaksanaan PUG dapat dilihat dari UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004. Berdasarkan Propenas tersebut, Meneg PP adalah koordinator pelaksanaan PUG di Indonesia. Dalam Propenas tersebut terdapat 19 program pembangunan yang responsif gender. Program-program tersebut mencakup lima sektor pembangunan, yaitu hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Dalam setiap Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta), PUG terus dilakukan. Hingga Repeta 2004, jumlah program yang telah responsif gender bertambah menjadi 38 program mencakup berbagai sektor pembangunan, yaitu ketenagakerjaan, pendidikan, hukum, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), politik, kesejahteraan sosial, keluarga berencana, kesehatan, dan lingkungan hidup (Bappenas 2005).

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2005 memperlihatkan bahwa penerapan 38 program yang responsif gender pada Repeta 2001–2004 dinilai belum optimal. Kurangnya pemahaman mengenai kesetaraan gender di setiap sektor, baik di lembaga-lembaga nasional maupun daerah, menyebabkan PUG lebih dipahami sebagai proyek kegiatan untuk perempuan atau pemberdayaan perempuan semata. Padahal PUG dirancang untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang diintegrasikan dalam strategi pembangunan secara menyeluruh. Selain itu, payung hukum terkait pelaksanaan PUG, secara kelembagaan, baik horizontal maupun vertikal, belum disosialisasikan dengan baik.

Selama hampir satu dekade terakhir, pelaksanaan dan kepastian hukum PUG sudah mengalami perbaikan. Pada 2007, Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 ditetapkan. UU tersebut menyebutkan bahwa salah satu misi pembangunan nasional adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; pengurangan kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara drastis; penyediaan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta penghilangan diskriminasi dalam berbagai aspek, termasuk gender. Sedangkan visi yang tercantum dalam RPJPN 2005–2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”. Dalam uraian dijelaskan bahwa bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Sementara itu, salah satu dari tiga misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 adalah memperkuat dimensi keadilan di semua bidang, termasuk kesetaraan gender. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus ditingkatkan. Dengan demikian, ruang untuk peningkatan peran, keterlibatan aktif, dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di berbagai bidang, seperti pemerintahan, dunia usaha, maupun organisasi sosial, seyogianya diperluas.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sebagai agenda kelima pada RPJMN 2010–2014. Dalam bidang sosial politik, keadilan keikutsertaan (inklusif) diwujudkan melalui perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik, dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi. Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN, prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip pengarusutamaan ini diarahkan

untuk tercermin dalam keluaran kebijakan pembangunan. Prinsip tersebut mencakup:

- a. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
- b. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Pengarusutamaan gender.

Pada RPJMN 2010–2014, isu kesetaraan gender masuk kategori prioritas nasional bidang kesejahteraan rakyat. Prioritas di bidang kesejahteraan rakyat salah satunya mencakup perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dan anak (PUG&A) oleh kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian lainnya. Untuk menindaklanjuti RPJPN dan RPJMN tersebut, sejak 2009, Kementerian Keuangan mewajibkan setiap lembaga negara untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010. Hingga tahun 2012 tercatat percepatan PUG melalui PPRG yang telah diterapkan di 28 kementerian dan/atau lembaga dan sepuluh provinsi (Bappenas 2012). Di dalam konteks PPRG terdapat kerja sama dengan tujuh instansi utama, yaitu Kementerian PP dan PA, Kemenkeu, Kemen PU, Kementan, Kemendiknas, Kemenkes, dan Kemen PP/Bappenas, yang bertanggung jawab untuk perencanaan, penganggaran dan pengembangan kapasitas.

Berdasarkan paparan di atas, arah kebijakan PPRG adalah:

1. Pelaksanaan PPRG melalui membangun komitmen;
2. Melakukan koordinasi antara instansi penggerak dan K/L teknis dan SKPD teknis;
3. Peningkatan kapasitas K/L melaksanakan analisis gender.

Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 menekankan sinergi antara penganggaran pusat dan daerah tentang pengarusutamaan gender.

Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menunjuk *focal point* yang menggambarkan tugas dari PUG serta kewajiban dari SKPD dalam menerapkan dan mencapai tujuan gender. Dalam hal ini, Kemendagri adalah pembina umum pelaksanaan PUG di daerah. Implementasinya terdiri dari pendekatan umum yang memperluas dasar aturan hukum kebijakan sosial tentang gender dan penguatan koordinasi. Pendekatan ini khusus menggarap mekanisme PUG dari perencanaan hingga evaluasinya. Dalam proses ini, terdapat upaya untuk membuat tim PPRG atau yang biasa disebut sebagai *desk gender*. Selanjutnya, Kementerian PP dan PA membuat MoU PPRG dengan lembaga atau organisasi seperti K/L. Kelompok ini menjadi *focal point* dan pokja (kelompok kerja) yang berkepentingan untuk menginternalisasikan gender di dalam kegiatan dan program. Kegiatan ini pada dasarnya membentuk wadah koordinasi PUG dan meyakinkan terbentuknya data terpilah untuk memperlihatkan adanya kesenjangan atau masalah dalam program atau kegiatan.

Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Penelitian

Penelitian adalah langkah strategis dalam mengungkapkan realitas tentang isu gender. Dengan demikian, PUG adalah langkah penting dalam proses penelitian. Dalam konteks ini, semua lembaga penelitian di kementerian/lembaga maupun lembaga pemerintah non-kementerian memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan PUG. Proses memasukkan PUG mewarnai proses penelitian, seperti perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, hingga evaluasi program penelitian/kegiatan yang ada. PUG tidak terbatas di lembaga penelitian di bawah negara, tetapi juga pada lembaga lain yang memiliki kompetensi serupa. PUG sesungguhnya adalah metode penelitian yang sensitif terhadap gender, khususnya tentang perempuan.

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap seluruh penelitian dan pembinaan semua peneliti di Indonesia. Kemenristek beserta

lembaga riset di bawahnya, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), perlu berkomitmen dan menyadari pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan, khususnya pengembangan teknologi. Teknologi dan pengetahuan sejatinya tidak bersifat diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu. Namun, peran perempuan terhadap pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi sangat terbatas karena dunia iptek didominasi oleh kaum lelaki. Oleh karena itu, Kemenristek bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sebagai koordinator pelaksanaan PUG (sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2000), mulai menerapkan PPRG untuk setiap program/kegiatan yang direncanakan.

Setiap lembaga penelitian di lingkungan kementerian maupun non-kementerian memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun peraturan tentang PUG dan PPRG sudah ditetapkan, peraturan otonom (*autonome satzung*) harus dibentuk. Melalui peraturan otonom ini lembaga penelitian dapat membuat aturan yang bertujuan membangun kesetaraan dan keadilan gender dengan tetap bersinergi dengan karakteristik lembaga. Secara umum, lembaga penelitian dapat berpegang pada UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sayangnya, pasal-pasal dalam UU tersebut sangat normatif dan buta gender sehingga perlu diintegrasikan dengan PPRG.

Aturan yang secara khusus mengatur kepegawaian masih netral gender, misalnya:

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 ten-

tang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-kementerian.

- d. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

Hal serupa dapat ditemui dalam aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi.

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perakayaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi.
- d. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Negara dan Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ristek dan Teknologi.
- f. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010–2014.

Peraturan-peraturan tersebut belum secara khusus memasukkan gender dalam pertimbangan pasal-pasalanya. Kebijakan PUG adalah kebijakan yang menerangkan bahwa gender menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan, walaupun isu gender tidak secara jelas terdapat dalam aturan-aturannya.

Bagian ini memaparkan tentang berbagai peraturan yang melandasi pelaksanaan PUG maupun PPRG di Indonesia. Awalnya

adalah peraturan atau kebijakan yang secara umum menunjukkan hak kewarganegaraan seperti berikut ini:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan Pasal 28C–D tentang Persamaan Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara.

- a. Pada Pasal 27 ayat (2): Pemerintah menjamin warganya untuk dapat mengembangkan kualitas diri dan bekerja untuk mendapat penghidupan yang layak.
- b. Pasal 28 C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- c. Pasal 28 D ayat (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

UU ini berlaku umum sehingga belum memasukkan elemen gender di dalamnya. Walaupun UU sudah menjamin partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan lainnya adalah tentang HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kemudian aturan yang merespons perkembangan internasional yang berhubungan dengan keanggotaan Indonesia di dalam PBB menghasilkan ratifikasi tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 5: Penghapusan pembagian kerja berbasis gender.

- a. Pasal 7, 8, dan 10: Kesetaraan proporsi perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan dan politik.
- b. Pasal 11: Kesetaraan di tempat kerja.

Aturan lain yang menegaskan kepedulian terhadap gender adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Bab 2 mengenai

peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Aturan yang lebih teknis terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010–2014, juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Penegasan dan komitmen menghasilkan aturan yang secara khusus mengangkat anggaran yang responsif gender termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK 02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.

Dalam penerapannya, KPPPA menjadi lembaga yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dari PUG yang terdapat dalam kebijakan seperti:

- a. Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor B.55/Menteri PP/Dep.II/VI/2002 tentang kebutuhan membentuk *focal point* di setiap sektor pemerintahan tingkat nasional dan daerah.
- b. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor B.110/Menteri PP/Dep.II/IX/ 2003 tentang kebutuhan membentuk POKJA Gender.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kegiatan penyebaran PUG dan mekanisme memasukkan gender dalam setiap proses pembangunan menjadi bagian penting fasilitasi dari KPPPA. Yang harus ditekankan, penerapan gender dalam proses pembangunan merupakan sebuah kebijakan yang perlu diterapkan. Selain itu, terdapat pesan singkat dan jelas bahwa setiap lembaga pemerintah (dan swasta) perlu dan harus menerapkan pendekatan ini.

Kegiatan memasukkan gender dalam proses penelitian merupakan upaya bertingkat dan berlapis-lapis. Namun, sebagai sebuah strategi pemberdayaan, individu atau kelompok dapat mendekatinya baik dari sisi teori, konsep dan metodologi, maupun dari sisi praktis. Deskripsi ini menjadi pengantar kedua sisi tersebut

sehingga pembacanya mendapatkan gambaran yang jelas, baik gender dalam teori dan konsep maupun sebagai strategi praktis. Tujuannya adalah memudahkan pembaca dan memberikan solusi bahwa gender dapat didekati, baik dari sisi teori dan konsep bagi yang menyukai pendekatan ini maupun dari sisi praktis seperti memasukkan gender di dalam program, kegiatan, dan proses yang berkembang di lembaga masing-masing.

Pengintegrasian Gender dan Anggaran Responsif Gender di Indonesia

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (selanjutnya APKM) dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada. Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Di Indonesia, selain aturan tentang PUG, kebijakan pro gender ini diakui dan menjadi agenda kebijakan pemerintah. Terbukti dengan adanya strategi mengintegrasikannya dalam pembuatan kebijakan seperti di bawah ini.

- a. Kesepakatan 4 Menteri (Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan,

Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014.

- c. Permenkeu Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, anggaran pun harus memasukkan gender yang disebut sebagai anggaran responsif gender (ARG). Pengarusutamaan gender adalah sebuah kebijakan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan gender di dalam organisasi sehingga sudah menjadi bagian dari penganggaran.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK-02/2009 tentang *Gender Budget Statement* (Pernyataan Anggaran Gender) sebagai komitmen dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Konsepsi perencanaan dan penganggaran responsif gender adalah:

- a. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses perencanaan untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan program dan kebijakan.
- b. Penganggaran responsif gender: (1) Di dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender di setiap lingkup pemerintah perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif, dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2) Penggunaan anggaran responsif gender mengarah pada pembiayaan program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) Anggaran responsif gender dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses perempuan dan laki-laki.

Secara umum, membicarakan PUG dan penganggaran yang responsif gender berarti memperhatikan rencana strategis (renstra)

sebuah lembaga. Dengan pengintegrasian gender, perspektif gender harus masuk di setiap acuan program, termasuk dalam renstra. Pengintegrasian gender selanjutnya dilakukan dalam setiap tahapan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tahapan evaluasi. Dalam semua tahapan itu, isu gender melekat sebagai kesatuan. Pengintegrasian gender dalam setiap tahapan dapat digambarkan dalam Gambar 1.



Sumber: KPPPA dan UNIFEM 2010

Gambar 1. Pengintegrasian Gender dalam Setiap Tahapan

Dalam tataran perencanaan dan penganggaran, pengintegrasian gender menjadi elemen penting dalam organisasi. Berdasarkan pemikiran pengarusutamaan gender, analisis gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan. Dalam bentuk dokumen, pengarusutamaan gender masuk dalam dokumen seperti rencana strategis (renstra). Seperti terlihat pada gambar, analisis gender menjadi sumbu utama yang memengaruhi tidak

hanya perencanaan, tetapi juga anggaran, baik dalam dokumen maupun dalam rencana anggaran yang lebih detail.

Prosedur pengajuan renstra dimulai dari usulan program dan kegiatan yang menggabungkan antara kepentingan praktis dan strategis gender. Selain itu, program ini juga memperhatikan masukan dari program lainnya. Usulan kepentingan praktis, secara langsung memperlihatkan kebutuhan gender seperti perlunya data terpilah, sedangkan kepentingan strategis menggarap isu pemberdayaan yang sering kali tidak kasat mata dan berjangka panjang. Kepentingan praktis dan strategis sama-sama ingin mencapai kondisi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

Analisis Gender

Proses penting di dalam penerapan pendekatan gender adalah melakukan analisis gender. Terdapat dua hal penting. Yang pertama adalah analisis gender yang berupa indikator APKM. Melalui indikator ini dapat dilihat baik secara kuantitatif maupun kualitatif apa yang terjadi pada laki-laki dan perempuan dalam intervensi pembangunan atau program berjalan. Melalui indikator ini, kita bisa memperlihatkan ketimpangan, marginalisasi, kesenjangan, dan lainnya antara laki-laki dan perempuan dalam situasi sosial yang sama. Analisis gender memiliki beberapa variasi, namun yang digunakan oleh mekanisme ARG adalah analisis Harvard.

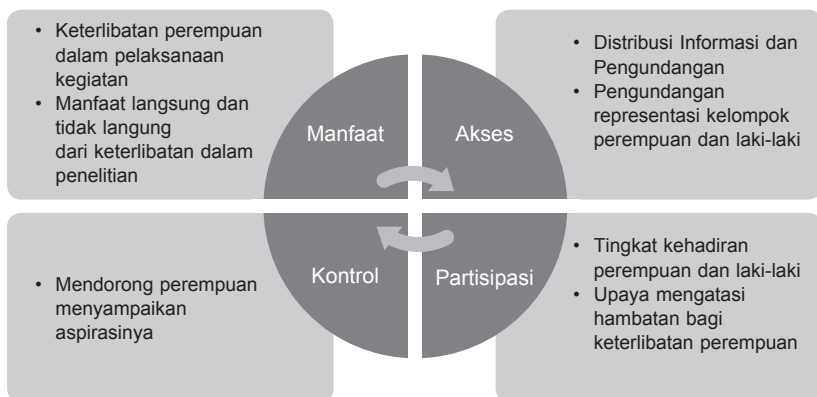
Analisis Harvard adalah mekanisme menyaring data yang diperoleh melalui analisis gender. Tahapan selanjutnya adalah memetakan masalah gender. Untuk mempermudah memetakan masalah dipergunakan indikator yang diperoleh dari analisis gender model Harvard. Analisis Harvard adalah analisis gender yang mempertanyakan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan (kebijakan/program/kegiatan/dana). Seperti telah disinggung di atas, analisis gender terdiri dari empat fokus analisis, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

- a. Akses: indikator yang memperlihatkan apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.
- b. Partisipasi: indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bila tidak, kendala apa yang dihadapi?
- c. Kontrol: indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan sama-sama mampu memengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut ataukah hanya laki-laki saja?.
- d. Manfaat: indikator yang mengangkat apakah intervensi itu menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan manakah yang bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki (atau merugikan) dan mana yang akan menguntungkan (atau merugikan) perempuan.

Proses analisis ini menghasilkan informasi yang digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan. Model Harvard merupakan salah satu aspek penting dalam analisis metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang direkomendasikan secara nasional. Indikator Harvard menjadi elemen dari analisis *pathway* sehingga dapat dilihat dan dibedah melalui keempat faktor tersebut. Gambar 2 merupakan upaya ringkas untuk memperlihatkan posisi APKM di dalam program dan kegiatan. Data utama di dalam analisa ini adalah melihat “siapa melakukan apa, dan mendapatkan apa?”; “siapa yang mempengaruhi dan mengendalikan”; serta “faktor apa yang berpengaruh terhadap situasi yang ada”. Secara ringkas gambar dibawah ini menguraikan isi dari APKM tersebut. Pada kenyataan di lapangan APKM tidak terpisah secara rigid karena unsur-unsurnya saling berkaitan.

Analisis gender mengandung muatan sebagai berikut:

- a. Adanya gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam isu atau tema penelitian;



Sumber: KPPPA dan UNIFEM 2010

Gambar 2. Empat Fokus Analisis Gender

- b. Adanya gambaran mengenai faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal di masyarakat;
- c. Indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/subkegiatan;
- d. Indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksana kegiatan/subkegiatan.

Tahapan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

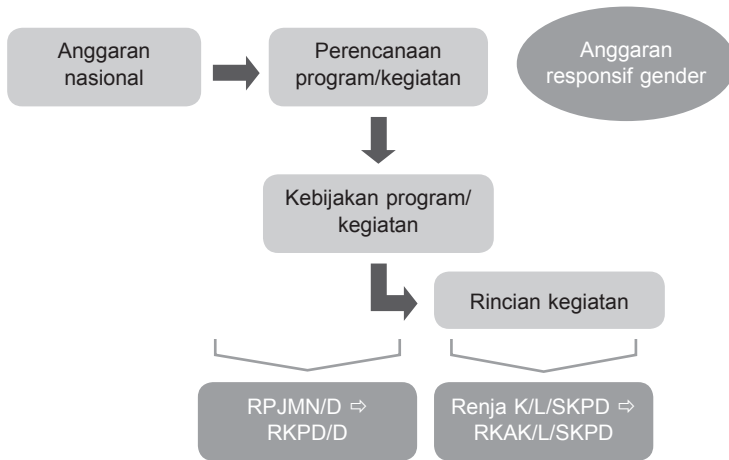
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk menunjukkan adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena konstruksi sosial dan budaya yang melanggengkan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Melalui perencanaan yang responsif gender, perencanaannya juga mewujudkan anggaran yang mengarah pada upaya mewujudkan keadilan gender. Seperti telah

disebutkan, perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan perencanaan dan penganggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Artinya, perencanaan perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan ini terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program hingga operasionalnya di lapangan.

Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran melalui upaya membedah program yang disasar. Untuk itu, dilakukan analisis gender guna mengetahui isu gender yang ada dalam kebijakan dan program yang telah disusun. Idealnya, analisis situasi gender harus dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan program, kebijakan strategis, dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, renstra KL, RKP, renja KL, dan pagu indikatif/pagu sementara, sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-KL, dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen renja KL. Penyusunan dokumen renja menggunakan analisis gender.

Secara garis besar, teknik penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah penyusunan perencanaan yang responsif gender melalui analisis gender (GAP). Tahap kedua adalah penyusunan anggaran yang responsif gender melalui *Gender Budget Statement* (GBS) serta *Term of Reference* setiap kegiatan atau program.

Melalui GAP dapat diidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam permasalahan atau isu ilmu pengetahuan dan penelitian yang ada, mengetahui secara asertif penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, dan mampu mengidentifikasi alternatif program atau kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi



Sumber: KPPPA dan UNIFEM 2010

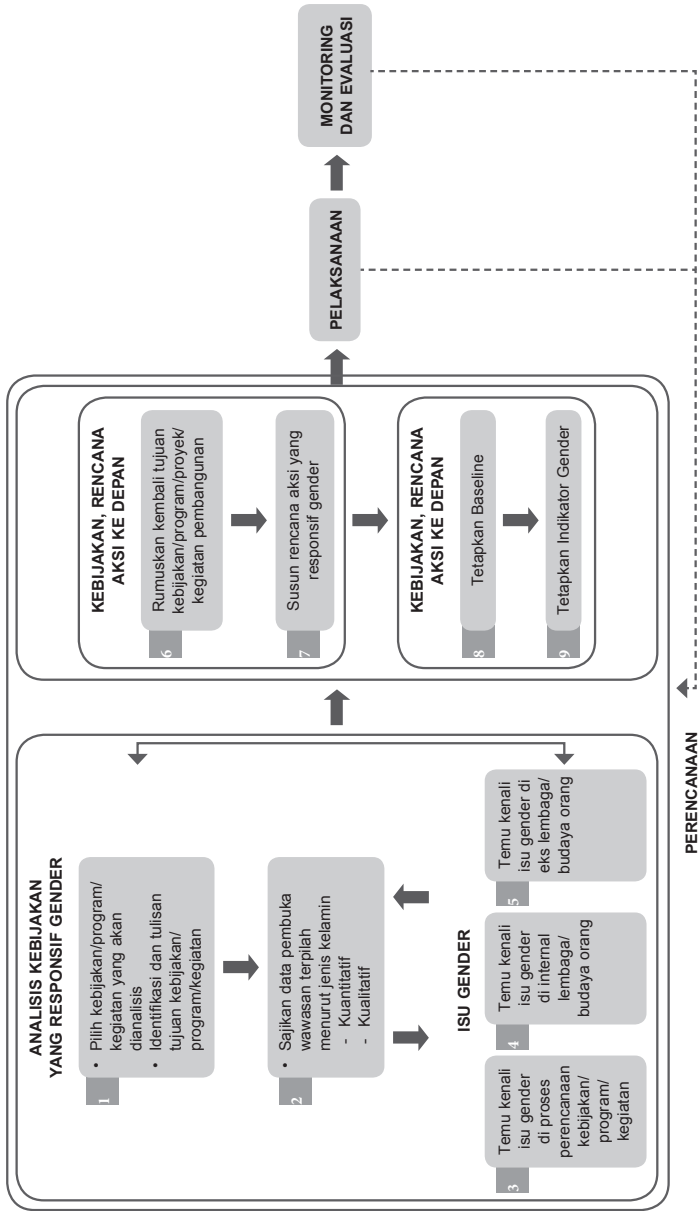
Gambar 3. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

persoalan yang ada serta menyusun target perubahan yang responsif gender yang ingin dicapai. Hasilnya dapat menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan, baik strategis dalam bentuk kebijakan yang sudah menggambarkan pro gender, maupun kegiatan operasional, berupa penelitian atau pengembangan yang responsif gender. Dalam tahapan proses perencanaan, analisis gender menggunakan metode GAP sebenarnya sekaligus proses perencanaan yang responsif gender.

Kerangka kerja GAP terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

- a. Tahap Analisis yang terdiri dari: (1) kegiatan yang akan dianalisis (identifikasi, tujuan); (2) data pembuka wawasan (kuantitatif, kualitatif); dan (3) isu gender (temu kenali isu gender dalam proses perencanaan, internal, dan eksternal lembaga).
- b. Tahap Integrasi Gender yang terdiri dari: (1) merumuskan kembali tujuan kegiatan; (2) menyusun rencana aksi yang responsif gender; dan (3) menetapkan *baseline* dan menetapkan indikator gender.

Kerangka kerja GAP dapat dilihat dalam Gambar 4.



Sumber: Bappenas dan KPPPA 2007

Gambar 4. Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*)

Untuk memasukkan gender dalam program ataupun kegiatan, langkah-langkah analisis dimasukkan ke dalam matriks yang disebut Matriks GAP. Langkah sederhananya adalah memasukkan butir-butir kegiatan di dalamnya, seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 10. Ketika mengisi langkah-langkah ini, peneliti atau tim peneliti akan merasakan bahwa dengan menggunakan gender, tujuannya menjadi lebih terfokus. Ada data yang dibutuhkan untuk menggambarkan masalah penelitian yang ada. Penggunaan gender membuat masalah penelitian menjadi lebih tajam. Setelah itu ada pernyataan tentang apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada. Proses ini membuat perubahan yang terjadi berkali-kali dan konsepnya bisa dipindahkan ke kolom-kolom yang berbeda. Adanya proses ini tidak berarti penggunaan gender akan membingungkan. Peneliti mengalami proses memikirkan elemen gender dalam kegiatannya. Proses ini dengan sendirinya akan mengubah tatanan proposal atau desain penelitian. Ilustrasi tentang hal ini terdapat di bagian akhir buku ini.

Paparan pemikiran tentang perbedaan gender, ketimpangan, ketertindasan gender, dan ketertindasan struktural merupakan peta permasalahan gender. Pemetaan ini berguna sebagai masukan terhadap masalah penelitian yang secara lebih rinci dikaitkan dengan tema-tema yang diangkat dalam kajian atau penelitian. Pemetaan ini memperlihatkan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang merupakan bagian dari kebiasaan yang hidup di masyarakat. Analisis dan fakta tentang perbedaan gender, ketimpangan, ketertindasan, serta struktur sosial yang tidak setara merupakan indikator tentang masalah gender yang ada. Buku ini mengemukakan paparan ini untuk mempermudah melihat masalah gender yang ada. Seperti telah disebutkan sebelumnya, seorang peneliti perlu memahami ini untuk mendapatkan data dan informasi yang seimbang. Paparan tentang dasar pemikiran di belakang masalah gender merupakan tambahan informasi untuk membuka wawasan peneliti.



BAB 3

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan: Konsep dan Aplikasi

Bagian ini menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah konsep dan definisi tentang gender serta kaitan teoretis dan metodologisnya dalam aplikasi. Yang kedua adalah kaitan antara gender dan pembangunan. Keduanya perlu berjalan bersamaan. Meskipun penjelasannya berupa paparan singkat, diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran tentang gender. Selanjutnya adalah paparan yang berkaitan dengan penerapan gender sebagai strategi pemberdayaan dan bagaimana gender menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

Paparan itu juga memperlihatkan gender sebagai metodologi untuk mengangkat masalah gender di masyarakat. Paparan seperti ini memperlihatkan bahwa gender tidak hanya dapat didekati secara konseptual sebagai teori dan metodologi, tetapi juga dapat didekati dengan cara praktis melalui penerapannya dalam program pembangunan.

Gender dan Konstruksi Sosial

Apakah gender itu? Dalam pembicaraan umum sering terdapat kekeliruan pemahaman tentang gender. Sering kali orang tidak

dapat memahami perbedaan antara jenis kelamin dan gender, dan ini memengaruhi konsep turunan lainnya.

Jenis kelamin dan gender adalah konsep yang penting. Ketika kita mengatakan jenis kelamin, acuannya adalah konteks biologis, di mana terdapat jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Perbedaan biologis ini lebih mudah dipahami karena mengacu pada kondisi alamiah makhluk hidup, sedangkan gender sering terkacaukan sebagai perempuan. Ketika orang berkata gender, langsung mengacu pada perempuan, padahal gender mengacu baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukanlah jenis kelamin, meskipun terkait dengan itu. Gender adalah sebuah konstruksi sosial, di mana seseorang belajar—dalam sosialisasinya dan dalam hubungan sosialnya dengan manusia lain—untuk menjadi perempuan atau laki-laki, misalnya cara berbicara perempuan lebih lembut daripada laki-laki. Perempuan yang berbicara dengan lantang akan dilihat “kurang” perempuan dibandingkan yang halus suaranya. Kehidupan masyarakat sangat kaya. Kita pun melihat adanya laki-laki berperilaku perempuan dan sebaliknya. Perbedaan seperti ini muncul karena konstruksi masyarakat bersifat heterogen dan berbeda-beda, misalnya pola pengasuhan anak akan berbeda antara budaya satu dan lainnya.

Gender adalah konstruksi sosial, dan perbedaan gender bisa dijelaskan melalui pandangan tentang evolusi manusia. Awalnya, ketika manusia masih berpindah-pindah, peran laki-laki dan perempuan setara karena mereka harus bekerja sama. Kehidupan masyarakat kemudian berkembang dan manusia hidup menetap. Mulailah terjadi pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin; perempuan mengurus ruang domestik, seperti rumah tangga, dan laki-laki mengurus ruang publik, misalnya pergi berburu. Dalam situasi tersebut, peran perempuan masih besar karena rumah tangga adalah tempat di mana problem sosial ekonomi dikumpulkan dan dipecahkan. Dengan berkembangnya masyarakat dan perekonomian, kegiatan di ruang publik meningkat dan laki-laki mendapatkan peran yang lebih besar. Norma dan nilai *breadwinner* atau kepala



Sumber: Santoso 2001

Gambar 5. Pakaian Wanita

keluarga berkembang dan perempuan disudutkan dalam ruang domestik.

Perkembangan masyarakat juga membentuk konstruksi tentang peran laki-laki dan perempuan. Kebudayaan era Ratu Victoria di Inggris menjadi salah satu contoh penggambaran perempuan. Perempuan ketika itu digambarkan tertutup, direpresentasikan oleh penggunaan korset yang ketat. Hal ini menghasilkan gambaran bagaimana sebaiknya seorang perempuan berkelakuan dan bersikap. Di Indonesia, hal seperti ini digambarkan melalui patung perempuan berkorset oleh Astari Rasyid karena harus tampil menarik dan langsing. Perempuan yang berada di luar simbol seperti itu akan muncul sebagai perempuan pembangkang. Pada dekade sebelumnya, muncul kegaduhan sosial, seperti *witch burning* atau pembakaran nenek sihir. Masyarakat menghukum perempuan yang tertuduh sebagai nenek sihir dengan membakarnya. Teks pengetahuan perempuan kemudian muncul dengan analisis yang berbeda, di mana beberapa perempuan muncul sebagai pelaku bisnis yang sukses. Kesuksesan tersebut memberikan citra buruk pada simbol kelaki-lakian.

Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa gender adalah sebuah konstruksi sosial tentang perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, gender tidak tunggal. Dalam konteks pembangunan, kita perlu mengetahui konstruksi gender yang ada di negara berkembang. Negara berkembang sendiri adalah sebuah konstruksi sosial yang mengategorikan negara-negara berdasarkan perkembangan ekonomi sosial dan politik. Negara berkembang adalah sebutan untuk menggambarkan negara baru merdeka pada abad 19-an, seperti Indonesia. Sebutan Dunia Ketiga adalah salah satu pengategorian lainnya. Pada masa awal kemerdekaan, di negara-negara tersebut perempuan sudah bergerak bersama para laki-laki mendukung kemerdekaan dan mendukung pembangunan. Konstruksi gender dan pembangunan adalah tema yang tidak lepas dari proses perubahan sosial yang terjadi di negara berkembang. Isu seperti kesejahteraan dan kemiskinan selalu mengaitkan gender dengan pembangunan. Setiap negara memiliki tokoh dan ciri perkembangannya masing-masing.

Di Indonesia, sejarah perempuan diawali dengan kegiatan perempuan yang setara dengan laki-laki. Pada tahun Sumpah Pemuda dikumandangkan, para perempuan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Artinya, para perempuan sudah menyatakan dan melakukan aktivitas yang setara yang mendukung kemerdekaan dan penghidupan di Indonesia. Akan tetapi, perkembangan sejarah membuat alur yang berbeda. Kajian Saskia Wieringa memperlihatkan marginalisasi gerakan perempuan sebagai imbas G30S PKI. Orang tidak melihat Gerwani sebagai cerminan aspirasi perempuan, tetapi sebagai bagian dari gerakan politik yang lebih besar. Kemudian konstruksi ibuisme menjadi kebijakan utama Orde Baru dengan penekanan pada PKK dan kegiatan ibu-ibu, seperti Dharma Wanita dan sebagainya. Kecenderungan ini membuat stigmatisasi bahwa kegiatan perempuan lainnya kurang tepat dibandingkan kegiatan seperti PKK. Pentingnya keluarga adalah isu yang berkembang pada masa tersebut. Namun, gerakan perempuan berhasil memunculkan beberapa LSM perempuan, seperti Kalyanamitra, yang mengembangkan isu gender dan isu

strategis perempuan lainnya. Dengan adanya perubahan rezim pada 1998, posisi seperti ini kemudian juga berubah. Kegiatan seperti PKK seakan membeku, padahal masalah yang berhubungan dengan perempuan dan anak semakin banyak.

Sebagaimana sebuah konstruksi sosial, kekuasaan memainkan peran penting dalam mengonstruksi siapa perempuan Indonesia. Pada masa Orde Baru diterjemahkan dalam kegiatan seperti PKK, Dharma Wanita, dan sebagainya. Pola kegiatan perempuan seperti ini menjunjung tinggi konstruksi perempuan yang terkait dengan keberhasilan laki-laki di rumah tangganya. Oleh karena itu, perkembangan pengurusan organisasi perempuan mengikuti perkembangan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki oleh suami masing-masing. Pola seperti itu menegaskan capaian individu yang dimiliki perempuan, dan perempuan harus menjalankan aktivitas sesuai dengan konstruksi tentang laki-laki dan perempuan yang dimiliki oleh Orde Baru. Dengan jatuhnya rezim Orde Baru, konstruksi perempuan juga berubah dan memiliki karakter perkembangannya yang berbeda. Gambaran di atas menunjukkan konstruksi yang beragam sebagai ilustrasi bahwa “menjadi” perempuan adalah sebuah proses sosialisasi.

Menyadari kondisi dan tantangan seperti ini, pola berpikir pengarusutamaan gender berkembang. Mereka yang berada dalam ruang pengambilan keputusan harus sadar akan pentingnya kesetaraan gender untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak. Dalam proses pengarusutamaan gender, individu perlu menyadari tentang gender dan bagaimana dampaknya bagi pembentukan masyarakat yang setara dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan intervensi berupa pelatihan dan sosialisasi tentang gender.

Responsif gender adalah sebuah sikap tentang gender, di mana kita mengetahui makna konsep gender dan memasukkan informasi tersebut di dalam kebijakan dan keputusan yang bertujuan mulia, yaitu menciptakan kesetaraan gender. Sebagaimana gender adalah sebuah konstruksi sosial, perlu disadari bahwa seseorang tidak serta merta memahami gender dan mampu mengaplikasikannya

dalam program atau kebijakan. Oleh karena itu, terdapat kategori sosial mengenai pemahaman seseorang tentang gender. Seseorang disebut buta gender jika tidak menyadari signifikansi fakta tentang gender. Individu disebut netral gender jika tahu tentang gender, namun tidak membuat pilihan mengenai gender dan masih melihat kondisi yang ada sebagai kondisi layaknya sebuah masyarakat. Orang disebut sebagai sadar gender jika mengetahui tentang signifikansi gender dan berusaha memasukkan elemen gender di dalam pengambilan keputusan. Seseorang disebut sebagai responsif gender jika secara langsung menyadari bahwa konsep gender penting dan memasukkannya ke dalam keputusan dan program yang dikembangkan dalam institusi dan perilaku kesehariannya.

Dalam pengambilan keputusan, responsif gender adalah sebuah karakter tentang pemahaman gender. Setiap individu yang berada di posisi ini memahami tentang gender. Akan tetapi, seperti telah disebutkan di atas, pemahaman tentang gender ternyata berbeda dan secara asertif bertahap. Namun, untuk memastikan pemahaman dan penerapan gender diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa gender adalah elemen yang penting dalam pengambilan keputusan, yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan pengembangan kapasitas yang berhubungan dengan gender. Mekanisme ini diwujudkan melalui serangkaian pelatihan meningkatkan sensitivitas gender sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan keputusan yang responsif gender.

Pengarusutamaan Gender sebagai Pendekatan

Definisi umum tentang pengarusutamaan gender diambil dari ECOSOC:

“Gender mainstreaming, a gender perspective, is the process of assessing the implication for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for maintaining women’s as well as men’s concerns and experiences and integral dimension of the design, implementa-

tion, monitoring and evaluation of policies and programs in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality (UN ECOSOC 1997 dalam Mehta dan Gupta 2006, 2).

“PUG, sebuah perspektif gender, adalah proses untuk mengevaluasi implikasi perencanaan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk masalah legislasi, kebijakan, atau program di semua area dan di semua tingkatan. Ini adalah sebuah strategi untuk meyakinkan kepedulian dan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam mengintegrasikan dimensi dari desain, implementasi *monitoring*, dan evaluasi dari kebijakan dan program di seluruh kegiatan politik, ekonomi, dan sosial sehingga memberikan keuntungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender” (UN ECOSOC 1997 dalam Mehta dan Gupta 2006, 2).

Berdasarkan pandangan Mehta dan Gupta, pengarusutamaan gender merupakan upaya menyempurnakan kebijakan pro perempuan atau pro gender yang pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas perencanaan, penerapan, dan evaluasi.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa masalah. Evaluasi-evaluasi yang dikumpulkan oleh Mehta dan Gupta memperlihatkan bahwa PUG seakan-akan menguap karena kecenderungan pengarusutamaan menghilangkan atau mengurangi keberadaan *focal points*. Misalnya dengan adanya kebijakan pengarusutamaan gender, *desk gender* dihilangkan. Lebih jauh lagi, PUG juga tidak terlihat dalam dokumen yang mereka hasilkan sehingga eksistensi kebijakan ini dapat dipertanyakan. Kecenderungan lainnya adalah ketika pengarusutamaan dilakukan, tidak ada agen yang secara khusus bertanggung jawab atas penerapan PUG sehingga semua merasa bahwa orang lain sudah melakukannya. Kecenderungan ini menjadi kurang kondusif bagi kebijakan pro gender. Penjelasan di atas menunjukkan kritik terhadap penerapan PUG yang dianggap sudah

menyelesaikan masalah. Padahal kita perlu mengkaji penerapan PUG yang sudah berlangsung supaya tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwa sudah tidak ada lagi masalah gender. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa PUG berjalan dengan baik. Kebijakan yang mendukung PUG, seperti *gender budgeting*, menjadi salah satu cara untuk menjamin penerapan PUG itu sendiri.

Evaluasi Mehta dan Gupta terhadap beberapa kebijakan tentang pengarusutamaan gender memperlihatkan bahwa ada beberapa hal yang membuat kebijakan ini dapat berkembang dengan baik, yaitu adanya isu yang relevan sehingga kebijakan ini memiliki sasaran yang jelas; kepemimpinan yang memahami konsep gender; pendanaan yang memadai; *gender specialist* yang menjadi agen konsultasi yang mengikuti perkembangan kebijakan ini; penelitian yang mendukung isu gender; yang terakhir adalah adanya keterbukaan dan inovasi untuk mengembangkan kebijakan ini. Evaluasi program lainnya menyebutkan adanya *political will* dan strategi dalam berbagai tingkatan. Mehta dan Gupta mengutarakan strategi pendekatan pengarusutamaan alternatif yang memiliki penekanan sebagai berikut: implementasi kebijakan ini bersifat strategis; kebijakan ini memulai dari isu yang relevan dan menjadi masalah bagi masyarakat; kebijakan ini membutuhkan penelitian dan analisis untuk menunjukkan fungsi positifnya bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan *gender expertise* untuk mengawal penerapan kebijakan ini. Berkaitan dengan hal ini, penerapan PUG membutuhkan pengawalan teknis, yang secara langsung mengamati dan mengevaluasi prosesnya. Penerapannya membutuhkan dukungan pendanaan dan proses yang akuntabel supaya dapat dilihat kelemahan dan kemungkinan pengembangannya. Selain itu, penerapan PUG membutuhkan dukungan dari pembuat keputusan, terutama dari pemimpin yang memiliki wawasan, atau paling tidak kepedulian terhadap isu gender.

Secara umum, pengarusutamaan gender adalah upaya untuk meyakinkan bahwa semua kebijakan memasukkan gender sebagai landasannya. Pengarusutamaan gender merupakan aktivitas dari

analisis gender dan *gender budgeting* sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis gender berkaitan dengan upaya untuk memahami masalah gender yang ada, sedangkan *gender budgeting* adalah strategi untuk menjamin penerapannya.

Penerapan pengarusutamaan gender berkaitan dengan analisis gender untuk melihat masalah gender yang ada.

“Gender analysis is a tool associated with gender mainstreaming, the most recent innovation in equality policy. Broadly, mainstreaming is a commitment to guarantee that every part of an organization assumes responsibility to ensure that policies impact evenly on women and men. Gender analysis, in its most common form, describes a methodology for assessing if policy is, or not, attentive to the ‘differences’ between women and men” (Bacchi dan Eveline 2010, 20).

“Analisis gender adalah alat yang berkaitan dengan PUG, sebagai inovasi yang terkini dalam kebijakan kesetaraan. Secara umum, pengarusutamaan adalah sebuah komitmen untuk meyakinkan bahwa kebijakan itu diperhatikan sebagai tanggung jawab organisasi untuk menerapkan kebijakan yang memberikan dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Analisis gender, dalam bentuk umum, memaparkan sebuah metodologi untuk melihat apakah sebuah kebijakan memberikan perhatian terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan” (Bacchi dan Eveline 2010, 20).

Bacchi dan Eveline menekankan bahwa pengarusutamaan gender bertujuan untuk memberi ketegasan bahwa keadilan gender menjadi perhatian utama. Dalam penerapannya, pengarusutamaan gender tidak menggantikan pendekatan *gender desk*, tetapi merupakan upaya menguatkan dan mewujudkan kesetaraan gender.

Walby (2005) berpendapat bahwa kesetaraan gender dan PUG adalah dua hal yang berbeda, meskipun sangat berkaitan. Pem-

bahasan tentang kesetaraan gender adalah membicarakan tentang target program PUG. Adanya PUG tidak langsung menciptakan kesetaraan gender. Walby menekankan bahwa sebagai produk akhir, kesetaraan gender, tidak mudah memberi cap bahwa program PUG tidak berjalan. Bahkan, hal ini menjadi bahan untuk evaluasi eksistensi dari program PUG yang dikembangkan dalam lembaga atau organisasi. Dengan demikian, PUG adalah upaya bagi konsep gender untuk dapat masuk ke dalam institusi.

Walby menggambarkan secara kritis posisi dari PUG yang ada di dalam institusi. Paparannya dapat dipergunakan untuk memperlihatkan berbagai posisi PUG sebagai upaya menggambarkan apa yang dapat kita kembangkan melalui kebijakan ini. Posisi PUG dapat dilihat dari dua kecenderungan, yaitu *agenda setting* dan *integrationist*, sebagai kerangka atau *frame* dari kebijakan yang ada. Posisi *agenda setting* mengacu pada kebijakan PUG yang melakukan transformasi dan orientasi ulang dari kebijakan yang ada, melalui perubahan pengambilan kebijakan, membuat prioritas capaian PUG, dan memikirkan ulang tentang capaian yang diinginkan oleh kebijakan (Walby 2005, 323). Posisi *integrationist* adalah posisi kebijakan PUG yang tidak mengubah kebijakan yang sudah ada pada saat ini, tetapi masuk di dalamnya. Kebijakan ini tidak akan mengurungkan kebijakan PUG di antara kebijakan yang lain, kelemahannya adalah capaiannya tidak substansial sesuai dengan capaian ideologis dari PUG. Ada juga posisi *frame* (bingkai) yang menjadi pagar-pagar bagi pengembangan kebijakan lainnya. Di dalam posisi bingkai, yang terbagi atas *frame extension* atau *frame bridging*. *Frame Extension* menekankan bagaimana kebijakan gender bisa meluas. Selanjutnya *Frame bridging* adalah menjembatani kebijakan yang ada dengan menambahkan isu gender.

Ketika membahas tentang kesetaraan, Walby menggambarkan ada beberapa pendekatan yang muncul, yaitu *sameness* atau kesamaan, *difference* atau perbedaan, dan *transformation* atau transformasi. Membahas kesetaraan gender dapat bermula dari posisi bahwa laki-laki dan perempuan harusnya memiliki akses yang serupa, atau kebijakan gender yang berargumentasi bahwa gender

penting karena perempuan dan laki-laki itu berbeda, namun tidak boleh saling mendiskriminasi. Sementara transformasi menunjukkan kebijakan gender yang ingin mengubah kebijakan yang ada yang dapat menampung kebutuhan gender (Walby 2005).

Sebagai sebuah pendekatan atau strategi, Walby mengambil dari Booth dan Bennet, mencatat adanya pendekatan yang menekankan tentang *equal treatment perspective*, *women's perspective*, dan *gender perspective*. Walby menggambarkan bahwa ketiga perspektif ini merupakan rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan rangka kaki tiga yang akan kuat jika dipergunakan sebagai strategi untuk PUG. Strategi perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki menggambarkan bahwa standar dan aturan yang ada perlu menyesuaikan diri dengan situasi perempuan. Hal ini dibutuhkan karena aturan dan standar yang ada pada umumnya dikembangkan atas standar dan kebiasaan laki-laki sehingga perempuan kesulitan menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Perspektif perempuan mengajukan pandangan bahwa perempuan mengalami marginalisasi dan eksklusi sosial sehingga membutuhkan kebijakan khusus untuk mendukung mereka masuk di dalam struktur yang ada. Pendekatan gender memberikan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan melalui serangkaian data dan fakta terpilah gender sehingga kebijakan yang diambil menguntungkan kedua belah pihak.

Walby menengahkan konsep lainnya, yaitu *expertise* dan *democratisation*. *Expertise* menunjukkan bahwa dibutuhkan serangkaian agen yang memahami konsep gender yang akan mengawali formulasi dan pelaksanaan kebijakan PUG. Para ahli gender ini dilihat sebagai agen yang netral terhadap kebutuhan organisasi. Mereka adalah akademisi dan *gender specialist* yang peduli terhadap pelaksanaan PUG. Demokratisasi membahas PUG dalam konteks yang lebih luas dari *expert*, di mana perempuan masuk ke dalam pengambilan keputusan. Pembahasan tentang adanya kebijakan pro gender dan *gender budgeting* merupakan salah satu bentuk demokratisasi berdasarkan gender. *Gender budgeting* dikembangkan untuk beberapa hal, seperti kebutuhan untuk mengatasi masalah

gender dan sebagai isu representatif bahwa penganggaran perlu mendukung kebutuhan gender serta sebagai strategi politik PUG. Strategi politik PUG adalah mengaitkan *gender budgeting* dengan mendorong kerja sama yang melibatkan masyarakat sipil seperti LSM untuk memfasilitasi penganggaran yang ditujukan untuk fasilitas publik. Tanpa *gender budgeting*, masalah perempuan akan tertinggal karena dianggap tidak penting. Walby mengutarakan jargon Woodward (Walby 2005, 334) tentang *velvet triangle*, yaitu kolaborasi antara birokrat yang memahami perspektif perempuan, para akademisi, dan gerakan perempuan.

Di dalam penerapan PUG, isu awal yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya data atau fakta yang terpilah gender. Data terpilah gender menjadi penting untuk memperlihatkan adanya masalah seperti kesenjangan sumber daya dan akses yang dimiliki laki-laki dan perempuan.

“Analysis of gender inequality requires the development of gendered indicators supported by gender disaggregated statistics” (Walby, 2005, 377).

“Analisis tentang ketidaksetaraan gender membutuhkan pengembangan indikator gender yang didukung oleh statistik data terpilah” (Walby, 2005, 377).

Dengan demikian, kegiatan pengarusutamaan harus memberikan data dan fakta yang terpilah gender. Pandangan ini menjadi penting dan muncul dalam berbagai bagian dalam buku ini.

Pengarusutamaan Gender Sebuah Strategi Pemberdayaan

Ketika berbicara dan berbincang tentang penerapan gender dalam anggaran dan perencanaan, sering kali orang juga bingung dengan konsep pemberdayaan perempuan dan apa hubungannya dengan gender. Kembali ke ilustrasi tentang tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan pengambil keputus-

an yang kurang sadar pentingnya gender, sebenarnya dalam diri perempuan melekat kondisi lain, yakni subordinasi. Perempuan cenderung melihat konsep dirinya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Seperti telah disebutkan, gender adalah sebuah konstruksi sosial sehingga posisi subordinasi tersebut diperoleh perempuan karena sosialisasinya. Sejak kecil perempuan sudah tersosialisasi untuk memperhatikan orang lain dan kepentingan mereka. Misalnya, perempuan selalu menyediakan kebutuhan rumah tangga dan selalu membantu ibunya. Secara asumsi selalu dikatakan bahwa perempuan kurang menyadari potensinya dan selalu melihat laki-laki, baik dalam konteks suami, ayah, kakak, maupun rekan kerja sebagai agen yang lebih mumpuni melakukan pekerjaan.

Perempuan memiliki kesadaran palsu yang muncul dalam bentuk konstruksi sosial, seperti harus tampil cantik, manis, imut, nurut, manut. Laki-laki muncul dalam bentuk konstruksi sosial yang harus dominan, memimpin, *macho* atau jantan, dan sebagainya. Di masyarakat juga berlaku norma bahwa yang menjadi pemimpin adalah laki-laki sehingga perempuan cenderung tidak dipilih atau tidak ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Sosialisasi ini membentuk norma bahwa yang menjadi pemimpin haruslah laki-laki. Kondisi ini saling menguatkan dan norma bahwa laki-laki seharusnya memimpin menjadi norma yang dominan. Norma laki-laki yang dominan dan mendominasi inilah yang disebut sebagai patriarkis. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana norma bahwa laki-laki yang dominan bisa menerima partisipasi perempuan? Dominansi tersebut yang membuat orang kemudian secara umum berpikir bahwa laki-lakilah yang seharusnya memimpin.

Analisis gender memperlihatkan bahwa jika hanya satu sisi saja yang berkembang—seperti jika hanya laki-laki saja yang berkembang—maka masyarakat tidak berimbang, yang satu mendominasi lainnya. Kehidupan masyarakat membutuhkan kontribusi perempuan. Dalam hal ini, partisipasi perempuan secara umum ternyata dibutuhkan mengingat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan membuat perkembangan masyarakat juga tidak seimbang. Karena gender adalah sebuah konstruksi sosial dan perempuan

adalah kelompok yang kurang diuntungkan oleh konteks budaya yang patriarkis, maka strategi untuk menyeimbangkannya adalah pemberdayaan perempuan. Perempuan sendiri perlu menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah kondisi yang sifatnya individual, melainkan sebuah karakter kelompok. Konteks seperti ini membuat pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari analisis gender.

Dalam analisis gender, terdapat konsep yang menggambarkan permasalahan gender. Permasalahan gender ini diambil dari Mansour Fakih, salah satu pionir penulis bahan tentang analisis gender. Fakih memperlihatkan ada beberapa masalah gender; masalah yang berhubungan dengan keadilan gender (Fakih 1996, 13–23). Masalah *pertama* adalah marginalisasi perempuan, yaitu sebuah keadaan di mana akses terhadap perempuan terbatas. Marginalisasi pekerjaan perempuan bidang pertanian terlihat dalam perubahan cara memanen yang tidak lagi menggunakan *ani-ani*, tetapi arit. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam proses memanen menjadi berkurang. Masalah *kedua* adalah subordinasi, yang terlihat pada pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak mampu/tidak cocok menduduki atau melakukan pekerjaan tertentu, misalnya pandangan tentang kepemimpinan perempuan. Akibatnya, perempuan tidak bisa berkontribusi penuh pada masalah politik atau tidak berani mengambil posisi yang penting karena merasa dirinya tidak mampu. Perasaan tidak mampu adalah sebuah konstruksi sosial yang telah dialami perempuan sejak kecil dan hidup di dalam masyarakat. Perempuan tidak memimpin bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena masyarakat membuatnya demikian. Hal yang *ketiga* adalah stereotip atau pelabelan. Pelabelan dapat diamati dalam penggambaran masyarakat tentang perempuan, seperti perempuan lemah, bersolek demi laki-laki, atau emosional. Label ini bermakna negatif. Pelabelan negatif untuk perempuan, yakni lemah, dependen, emosional berhadapan dengan pelabelan positif untuk laki-laki, seperti kuat, mandiri, dan tidak emosional. Penggambaran pelabelan laki-laki menjadi wacana dominan yang menjadi representasi peran laki-laki dan

perempuan yang hidup di masyarakat. Sebagai akibatnya, perempuan tidak dilihat sebagai aktor yang mampu berperan di ruang publik. Masalah *keempat* adalah kekerasan terhadap yang lemah, baik fisik maupun mental. Yang lemah di sini tidak terbatas pada perempuan saja, tetapi juga anak kecil, orang tua, kelompok difabel, dan lainnya. Kekerasan yang terjadi adalah kekerasan yang berbasis gender, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mutilasi alat kelamin, pelacuran, pornografi, sterilisasi yang dipaksakan, kekerasan terselubung, dan pelecehan seksual. Masalah *kelima* adalah beban kerja yang tidak berimbang. Perempuan dilihat sebagai individu yang baik, peduli kepada orang lain dan lingkungan, mau berkorban sehingga mendapatkan beban kerja berlebih atau melakukan pekerjaan tidak berbayar. Beban yang tidak seimbang juga terlihat pada tingkat kebijakan, di mana pekerjaan perempuan cenderung tidak terlindungi dalam konteks hukum dan perekonomian. Buruh migran, misalnya, adalah anak bangsa yang menyumbang bagi pembangunan di Indonesia, tetapi perlindungannya masih sangat terbatas.

Karena gender adalah konstruksi sosial, bentuk pembedaannya pun akan beragam, ditentukan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Sering kali karakter perempuan saling bertentangan. Misalnya karakter *caring* atau karakter pengasuhan perempuan, apakah disebut sebagai sebuah kelemahan ataukah sebuah kekuatan? Karakter *caring* atau karakter pengasuhan adalah bentuk sosialisasi perempuan yang secara khusus memberikan perhatian kepada orang lain atau lingkungannya. Di satu sisi, orang bisa melihatnya sebagai bentuk subordinitas perempuan yang selalu mendahulukan orang lain. Di sisi lain, karakter ini merupakan kekuatan perempuan, walaupun umumnya perempuan sendiri melihatnya sebagai kebiasaan lumrah para perempuan. Karakter ini berkaitan dengan bentuk biologis perempuan yang mampu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bentuk biologis ini membuat perempuan menjadi agen yang meneruskan peradaban dan menghasilkan manusia yang baik. Kondisi biologis ini mendukung karakter *caring*, dan keduanya saling menguatkan.

Upaya di atas, seperti juga analisis gender, merupakan sebuah upaya menghasilkan kesetaraan gender. Ketika mendiskusikan tentang kesetaraan, tidak berarti bahwa perempuan ingin seperti laki-laki ataupun sebaliknya. Kesetaraan berarti baik laki-laki maupun perempuan adalah kelompok yang perlu mendapatkan akses untuk berpartisipasi. Partisipasi yang baik bagi laki-laki maupun perempuan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Ada empat indikator kesetaraan gender seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu:

- Akses yang setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan program dan kegiatan pembangunan.
- Partisipasi atas pembuatan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- Kesempatan yang setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan pembangunan, khususnya untuk mendapatkan manfaat program dan kegiatan yang ada.
- Manfaat yang setara dan adil dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator yang disebut indikator Harvard, dan menjadi parameter untuk melihat posisi perempuan dan laki-laki di dalam kebijakan atau program. Ada banyak cara lain untuk melihat kesetaraan gender. Ada yang melihat dua pembagian besar, yaitu kepentingan strategis dan kepentingan praktis. Kepentingan praktis adalah kepentingan yang secara langsung dapat dinikmati dan diwujudkan, misalnya memberikan bantuan kepada murid laki-laki dan perempuan atau mendukung murid perempuan untuk bertanding atau berkompetisi. Kepentingan strategis adalah kepentingan yang wujudnya abstrak dan cenderung mengacu pada konsepsi ideal tentang laki-laki dan perempuan. Keinginan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah konsepsi ideal, di mana berbagai hal harus dilakukan dalam tahapan untuk mewujudkannya.

Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari mekanisme ini memiliki rentang yang panjang, dan secara garis besar dapat dibagi atas pemenuhan melalui mekanisme nyata dan keinginan ideal menciptakan kondisi keadilan. Dua pendekatan yang disebutkan di atas memperlihatkan bahwa model Harvard memberikan indikator bahwa kondisi kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam kehidupan dan hubungan sosial yang ada. Penerapan model ini dalam perencanaan memberikan keyakinan bahwa kesetaraan gender merupakan konsepsi yang dapat dicapai. Penggunaan kepentingan strategis dan praktis merupakan cara lain untuk mewujudkan keadilan gender. Kepentingan praktis merupakan gambaran dari penerapan empat butir penting dari model Harvard, sedangkan kepentingan strategis adalah pemenuhan keinginan mewujudkan masyarakat berkeadilan gender.

Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang terlahir setara. Secara biologis, keduanya memang diciptakan Tuhan dengan organ dan fungsi yang berbeda. Memasuki usia remaja, pertumbuhan berbagai organ serta perkembangan siklus, seperti buah dada dan menstruasi pada perempuan serta jakun dan air mani pada laki-laki, menjadi penanda perbedaan fungsi biologis keduanya, khususnya dalam hal reproduksi. Perbedaan peran reproduksi ini justru membuat perempuan dan laki-laki bekerja sama dan saling melengkapi.

Meskipun demikian, secara sosiologis posisi perempuan dan laki-laki sering kali dibedakan secara signifikan. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan cenderung diposisikan dalam ruang domestik, yaitu rumah di mana perempuan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, serta mengurus suami dan anak. Sementara itu, laki-laki sangat dominan di ruang publik, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mewakili keluarga dalam pemerintahan tingkat rukun tetangga (RT) dan seterusnya, serta mewakili rakyat di parlemen. Dengan demikian, pembedaan peran perempuan dan laki-laki lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dalam masyarakat.

Konstruksi sosial yang membedakan perempuan dan laki-laki ini dipengaruhi oleh budaya patriarkis maupun pemahaman ajaran agama yang tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia. Secara sadar maupun tidak, keduanya sering kali menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebagai contoh, posisi pemimpin diutamakan untuk laki-laki serta perempuan sebagai teman di rumah. Akibatnya, kondisi hubungan antara perempuan dan laki-laki cenderung tidak sejajar, baik di ruang publik, seperti lingkungan kerja, maupun ruang privat, seperti lingkungan rumah tangga. Kondisi ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang berada pada posisi lebih rendah, yaitu perempuan.

Sejak Indonesia merdeka, negara sebenarnya sudah menjamin terwujudnya keadilan dan persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan melalui Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sayangnya, perilaku para tokoh publik maupun program pembangunan yang ada belum responsif gender. Poligami menjadi salah satu contoh perilaku yang banyak ditentang oleh gerakan perempuan di Indonesia. Sejak masa Orde Baru, pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki dilarang berpoligami, sedangkan PNS perempuan tidak diperbolehkan menjadi istri kedua melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun wacana gender sudah mengglobal pada masa itu, kebijakan publik masih banyak yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki, seperti pembentukan Dharma Wanita yang diperuntukkan bagi istri PNS dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hanya untuk perempuan (Sucipto dan Adelina 2013). Program-program tersebut memang mengakui keberadaan perempuan dan laki-laki dalam ruang publik, tetapi ruang publiknya harus dipisahkan. Posisi perempuan dalam ruang publik, termasuk pembangunan, menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan mekanisme pengarusutamaan gender (PUG) untuk keadilan perempuan dan laki-laki.

Gender dalam Pembangunan

Kesetaraan gender menjadi perhatian masyarakat dunia, seperti juga di Indonesia. Berbagai gerakan, baik di level internasional maupun nasional, berupaya untuk mewacanakan dan mewujudkan kesetaraan gender. Isu gender dalam pembangunan dapat diamati dari berbagai segi. Yang pertama adalah melalui kesepakatan global tentang status perempuan. Yang kedua melalui pendekatan penerapan gender dalam pembangunan. Yang ketiga adalah kenyataan bahwa perempuan Indonesia sudah bergerak sebelum isu perempuan diangkat sebagai isu global. Isu yang ketiga ini merupakan upaya menepis pandangan bahwa gender adalah konsepsi asing, karena bagi Indonesia, perempuan bersama-sama laki-laki sudah terlibat di dalam pergerakan nasional (Jayawardena 1986; Blackburn 2009).

Kesepakatan global tentang status perempuan dimulai pada 1975, *“First World Conference on Women”*, di Meksiko dan menghasilkan *World Plan of Action, United Nation Decade for Women 1976–1985*. Pertemuan tersebut menghasilkan gambaran kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sehingga dekade tersebut diharapkan mampu menghadirkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada 1980 dilaksanakan *“Second World Conference on Women”* di Copenhagen. Lalu pada 1985 dilaksanakan *“Third World Conference on Women”* di Nairobi, yang menghasilkan strategi *“Forward Looking Strategy”*. Pertemuan lainnya adalah pada 1993, di Vienna, yang mendiskusikan tentang HAM, salah satunya adalah tentang HAM Perempuan. Dalam pertemuan ini ditekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM. Pertemuan pertautan lainnya adalah pertemuan *United Nations World Summit for Social Development* pada 1995 di Copenhagen. Pertemuan ini menghasilkan *“the central role of women”* dalam memerangi kemiskinan, menciptakan bidang pekerjaan yang produktif serta memperkuat kohesi masyarakat, khusus bagi laki-laki dan perempuan, kesepakatan global yang mengangkat isu *“equality and equity of women and men”*. Pertemuan yang terpenting karena menghasilkan banyak butir penting adalah pertemuan *“The Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development, and*

Peace” pada 1995 di Beijing. Hasil pertemuan tersebut mendukung proses penelitian sebagai berikut. *Pertama*, penekanan bahwa data, informasi, dan proses penelitian perlu menggunakan perspektif gender. Isu yang diteliti dikaitkan dengan isu-isu global untuk menggambarkan secara komparasi status perempuan. Data dan informasi memperlihatkan pentingnya memasukkan gender di dalam kebijakan mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global. Hambatan utama yang dihadapi oleh perempuan adalah adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Kedua, pendekatan intervensi sosial yang memasukkan pendekatan perempuan dan gender. Dalam perkembangannya, isu kesetaraan gender sudah melewati tahapan bersejarah dari pendekatan perempuan dalam pembangunan (WID), gender dan pembangunan (GAD) serta pengarusutamaan gender (Darwin 2005). Darwin menggambarkan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan status perempuan sebagai berikut.

a. Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development/WID*)

WID merupakan model yang pertama kali diterapkan. Model ini berkembang pada akhir 1960-an dan sepanjang tahun 1970-an. WID merupakan strategi pembangunan yang meletakkan perempuan sebagai aset dan sasaran sehingga cenderung fokus pada isu perempuan saja. Dalam konteks ini, perlu digarisbawahi bahwa perempuan bukan beban pembangunan. Model ini diterapkan dengan cara:

- a. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan perempuan;
- b. Memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga;
- c. Mengintegrasikan perempuan dalam proyek dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan; serta
- d. Meningkatkan kesehatan perempuan (Darwin 2005, 60).

Secara umum, WID berupaya meningkatkan peran reproduksi maupun produksi perempuan. Lebih lanjut, model ini memang

dapat meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam pembangunan, namun belum dapat memperbaiki tingkat keberdayaan mereka. Artinya, perempuan sering kali masih menjadi objek pelecehan dan kekerasan, baik di ruang publik, seperti lingkungan kerja, maupun di ruang privat, seperti rumah tangga. Dengan demikian, WID dianggap belum mampu merombak struktur maupun budaya sosial yang bias gender.

b. Gender dan Pembangunan (*Gender and Development/GAD*)

Model yang populer pada era 1980-an ini merupakan respons dari kegagalan WID. Jika WID memfokuskan gerakannya pada perempuan sebagai realitas biologis yang dianggap berdiri sendiri, GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. Model ini mengupayakan kesetaraan gender dalam hal-hal substansial, seperti:

- a. Pemberian akses yang sama dalam pendidikan sebagai upaya mendasar terjadinya perubahan nilai sosial dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan;
- b. Pengakuan hak-hak perempuan (misalnya hak reproduksi) sebagai bagian integral dari hak asasi manusia;
- c. Pemberian kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji, serta pendistribusian aset yang sama;
- d. Pemberian akses yang sama dalam politik dan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan pengidentifikasian kebijakan-kebijakan yang dapat dinikmati laki-laki dan perempuan secara seimbang (Darwin 2005).

Salah satu hasil penting GAD adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan pengesahan UU Nomor 7/1984. Dalam Konferensi Dunia PBB III di Nairobi pada 1985 dibicarakan kemungkinan memasukkan perspektif gender dalam semua kebijakan negara dan pembangunan. Gagasan ini diperkuat dalam Konferensi Dunia

PBB di Beijing 1995 dengan lahirnya *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender sebagai sebuah kebijakan, seperti yang sudah disebutkan.

c. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*/GM)

Model ini merupakan pematangan dari GAD yang bertujuan menjadikan gender sebagai arus utama pembangunan. Model ini melibatkan negara sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai partisipan aktif melalui berbagai institusinya. Mekanismenya melalui *gender scan*, yaitu gender sebagai alat pemindai untuk mengetahui penerapan pengarusutamaan gender dalam sebuah organisasi dengan menguji:

- a. Kesamaan akses dan kontrol sumber daya antara laki-laki dan perempuan di organisasi;
- b. sensitivitas gender dalam pengembangan perencanaan dan kebijakan organisasi;
- c. Kebutuhan strategi gender;
- d. Stereotipe gender;
- e. Kesamaan gender di organisasi;
- f. Hubungan gender;
- g. Pembagian kerja berdasarkan perbedaan gender (Darwin 2005).

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah proses reorganisasi, pengembangan, dan evaluasi kebijakan sehingga kesetaraan gender dapat diintegrasikan dalam kebijakan-kebijakan di semua tingkatan oleh para pengambil keputusan (GSM Europe dalam Darwin 2005). PUG dilakukan dengan cara:

- a. Membangun kerangka berpikir kritis terhadap penyebab ketidakberdayaan perempuan;
- b. Memperluas akses terhadap sumber-sumber alam, finansial, dan intelektual;

- c. Menkuatkan kepercayaan diri, pengetahuan, informasi, dan keterampilan untuk memahami dan melakukan intervensi pada bidang-bidang sosial, politik, dan ekonomi;
- d. Meningkatkan partisipasi pengambilan keputusan di dalam keluarga dan masyarakat; memperluas ruang gerak, posisi, dan peran baru yang sebelumnya didominasi laki-laki; kemudian selalu mempertanyakan secara kritis serta mengubah pandangan, keyakinan, kebiasaan, struktur sosial, dan kelembagaan yang cenderung melanggengkan ketidakadilan (UNDP dalam Darwin 2005).

Melalui PUG, perempuan dan laki-laki diharapkan dapat menjalankan, mempertimbangkan beban perempuan dalam sisi reproduksi, produksi, maupun sosial. Kepedulian terhadap beban multi ini tercermin pada institusi, aksi, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Seperti disebutkan sebelumnya, pada 1995, melalui *Beijing Platform for Action*, pengarusutamaan gender (PUG) menjadi komitmen internasional. Pada tahun yang sama, *United Nations Development Program* (UNDP) menghasilkan *Gender-related Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). Kedua indikator ini merupakan perluasan dari *Human Development Index* (HDI) setelah dipilah berdasarkan jenis kelamin (Pratiwi 2012). Menurut Pratiwi (2012), indikator-indikator GDI adalah perbandingan tingkat harapan hidup, partisipasi pendidikan serta pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, ia memaparkan bahwa GEM digunakan untuk mengukur keseimbangan partisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik serta peran penting dalam pengambilan kebijakan antara perempuan dan laki-laki dengan tiga indikator dasar, yaitu kuota perempuan di parlemen, jumlah perempuan yang memiliki posisi penting dalam pekerjaannya, dan perbandingan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan laporan terakhir yang didapat dari UNDP, nilai HDI untuk Indonesia pada 2012 adalah 0,629. Hal itu menempatkan Indonesia pada posisi 121 dari 187 negara (UNDP 2013).

Isu yang ketiga adalah pergerakan perempuan di Indonesia. Di tingkat nasional, perempuan Indonesia sudah berhasil melaksanakan konferensinya yang pertama pada 1928. Pertemuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda itu menunjukkan kepedulian perempuan Indonesia dan partisipasi mereka dalam pergerakan nasional. Sebagai bagian dari kegiatan ini, perempuan Indonesia sudah mengangkat isu-isu yang ketika itu menjadi isu penting, seperti perkawinan anak, poligami, dan pendidikan bagi perempuan. Kemudian, masa kelam politik di Indonesia pada era 1965-an menunjukkan kecenderungan untuk memojokkan perempuan Indonesia secara politik. Salah satunya adalah Gerwani yang dikaitkan dengan PKI. Kajian tentang “sejarah” perempuan kini sudah mulai memasukkan elemen ini di dalamnya. Kenyataan ini menepis pandangan bahwa gender dilihat sebagai konsep lian, karena pada kenyataannya, perempuan Indonesia sudah bergerak sebelum isu ini secara global diangkat sebagai masalah dunia.

Gender Dalam Kebijakan Pembangunan Dunia

Sebelumnya telah dipaparkan kebijakan bidang gender dalam konteks internasional dan nasional, maka di bawah ini adalah paparan gender dalam kebijakan pembangunan dunia secara umum. Sebelum tahun 2014, kebijakan umum tentang pembangunan dunia diwakili oleh konsep MDGs atau target MDGs. Tujuan MDGs meletakkan perempuan sebagai salah satu isu utama dari isu-isu yang dikembangkannya. MDGs di Indonesia diterjemahkan di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Bappenas dan PBB, yang menggambarkan tujuan MDGs seperti (Stalker 2008):

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem. Salah satu tujuannya adalah mengembangkan pekerjaan yang produktif dan layak untuk perempuan dan orang muda;
2. Mewujudkan pendidikan dasar yang layak bagi semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;

6. Memerangi HIV dan AIDS dan malaria dan penyakit lainnya;
7. Memastikan kelestarian hidup;
8. Mengutamakan kemitraan global untuk pembangunan.

Penjelasan ini diperoleh dari judul yang dijadikan patokan bagi pembuatan target yang ingin dicapai oleh Indonesia. Dari tujuan-tujuan yang dapat dicapai di Indonesia, tujuan yang berhubungan perempuan adalah seperti kutipan di bawah ini:

“Pencapaian tujuan milenium di Indonesia terancam tingginya angka kematian ibu. Pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007, angka kematian ibu 228 per 100.000 kelahiran hidup. Survei yang sama tahun 2012 menunjukkan 359 per 100.000 kelahiran hidup” (Kalyanamitra 2013).

Saat ini kebijakan pembangunan dunia digambarkan melalui konsep SDGs. *Sustainable Development Goals* adalah kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015. SDGs memiliki dua prioritas utama; yang pertama adalah mengembangkan sistem yang menunjang kehidupan (*earth's life support*) dan yang kedua adalah mengurangi kemiskinan (Griggs 2013). Pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya adalah konsep yang sudah lama ada, namun sekarang menjadi lebih penting untuk menjamin kehidupan yang lebih baik. Definisi SDGs adalah:

“Development that meets the needs of the present while safeguarding Earth's life-support system, on which the welfare of current and future generations depends.” (Griggs 2013, 306)

“Pembangunan yang memperhatikan kebutuhan saat ini, pada saat yang bersamaan menjaga sistem dukungan bagi kehidupan di dunia, di mana kesejahteraan generasi masa kini dan masa depan dipertaruhkan” (Griggs 2013, 306)

Kebijakan pengarusutamaan menjadi salah satu cara yang dikembangkan di dalam SGDs, yang memberikan kerangka mendasar dan besar di dalam pengembangan kebijakan pembangunan dunia. Walau tanpa target detail seperti yang dikembangkan oleh MDGs, SGDs menunjukkan bahwa gender tetap penting. Ada tiga hal yang melatarbelakangi masuknya isu gender di dalam SGDs.

“First, it is a moral and ethical imperative: achieving gender equality and realizing the human rights, dignity and capabilities of diverse groups of women is a central requirement of a just and sustainable world. Second, it is critical to redress the disproportionate impact of economic, social and environmental shocks and stresses on women and girls, which undermine the enjoyment of their human rights and their vital roles in sustaining their families and communities. Third, and most significantly, it is important to build up women’s agency and capabilities to create better synergies between gender equality and sustainable development outcomes” (UN Women Survey Report 2014, 12)

“Pertama, adalah sebuah kebutuhan moral dan etika untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menerapkan HAM, kehormatan, dan meningkatkan kapabilitas berbagai kelompok perempuan adalah kebutuhan utama dari dunia yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, adalah sangat penting untuk membaca kembali dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak proporsional yang menghasilkan ketegangan dan stres bagi perempuan dan anak, yang tidak memperhatikan hak asasi dan peran penting mereka dalam memelihara keluarga dan komunitas. Yang ketiga adalah yang paling signifikan, penting untuk mengembangkan kemampuan agensi dan kapabilitas guna menciptakan sinergi yang baik antara kesetaraan gender dan capaian pembangunan yang berkesinambungan (UN Women Report 2014,12)

Memasukkan SDG dan gender adalah:

“The realization of women’s human rights, capabilities and well-being now and in the future requires paying specific attention to the care economy, that is, the provision of care through the family and/or household, markets, the non-profit sector and the public sector and/or state, especially the “private” domain of non-market or unpaid care work. How societies organize this work is central to their social sustainability.” (UN Women survey Report 2014, 32)

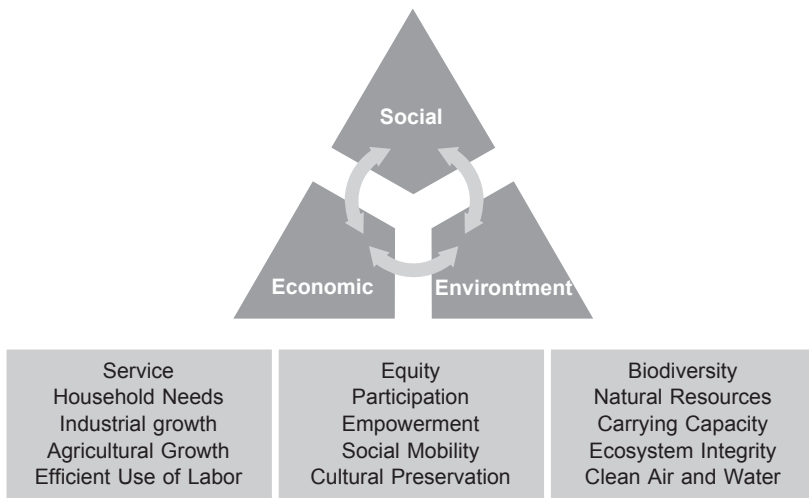
“Menerapkan HAM Perempuan, kapabilitas dan kesejahteraan perempuan pada saat ini dan untuk masa depan membutuhkan perhatian khusus pada ekonomi pengasuhan (*care economy*), yaitu memberikan pengaruh melalui keluarga atau rumah tangga, pasar sektor non-profit dan sektor publik dan atau negara, terutama ranah privat dari kegiatan nonmarket atau kegiatan tidak berbayar. Bagaimana masyarakat mengorganisasikan kegiatan ini adalah penting bagi keberlangsungan sosial” (UN Women Survey 2014, 32)

SDGs disebut sebagai pendekatan yang *anthropocene* yang percaya bahwa peran manusia sangat besar di dalam membangun kehidupan manusia. Di dalam skema ini ada tiga hal penting, yaitu isu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang diterjemahkan di dalam 6 tujuan.

Tujuan 1. Meningkatkan hidup dan kehidupan, dengan cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, pekerjaan, informasi, kondisi kesehatan dan perumahan dan mengurangi ketidaksetaraan dengan keinginan untuk mempertahankan konsumsi dan produksi.

- Tujuan 2. Mempertahankan ketahanan pangan, mengakhiri kelaparan, meningkatkan mutu nutrisi.
- Tujuan 3. Mempertahankan ketahanan air seperti mendapatkan air bersih dan sanitasi yang lebih baik serta menghasilkan alokasi air yang lebih efisien melalui manajemen air yang lebih baik.
- Tujuan 4. Meningkatkan energi yang bersih dengan mengurangi polusi dan dampaknya terhadap kesehatan serta melakukan mitigasi dalam masalah *global warming*. Yang menarik dari tujuan keempat ini adalah dimasukkannya masalah kesetaraan gender.
- Tujuan 5. Membangun ekosistem yang sehat dan produktif melalui manajemen, penilaian, pengukuran, konservasi, dan restorasi.
- Tujuan 6. Mengembangkan pengaturan untuk ketahanan masyarakat, dengan melakukan transformasi pemerintahan dan institusi di semua tingkat untuk memasukkan kelima tujuan dari pembangunan ini. Mekanisme ini diikuti oleh *monitoring* nasional, *reporting*, dan usaha untuk verifikasi (terjemahan bebas dari Griggs 2013).

Gambar 6 merupakan diagram dari SGDs yang dapat dipergunakan untuk membantu memasukkan dan memformulasi masalah.



Sumber: World Bank 2014

Gambar 6. Diagram SGDs

Gambar 6 memperlihatkan bahwa sebuah kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perlu mengaitkan baik masalah yang berhubungan dengan isu ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Situasi bumi yang semakin sulit karena perubahan ekosistem dan pemanasan global membuat isu gender menjadi elemen yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan.

Konsep gender dan pembangunan masih penting di dalam penerapan PUG dan inovasi penerapannya terus berkembang dengan baik. Bagi negara ingin maju seperti Indonesia, gender dan pembangunan masih penting karena banyak masalah sosial yang belum terentaskan akibat data dan informasi yang bias gender. Dalam banyak segi, perempuan masih tertinggal, walaupun beberapa indikator seperti pendidikan sudah mulai membaik. Akan tetapi, sikap dan perhatian terhadap isu ini masih menjadi pertanyaan besar.



BAB 4

Representasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Kebijakan PUG telah diberlakukan selama lebih dari satu dekade. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, pelaksanaannya masih belum optimal. Masih banyak lembaga, termasuk lembaga penelitian, yang kesulitan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini terjadi karena kekurangpahaman para pembuat kebijakan terkait PUG sehingga PUG tidak dijadikan prioritas di lembaganya. Fokus kajian dalam bagian ini adalah memberikan gambaran dan pemahaman terkait isu gender di lembaga penelitian. Bagian awal memaparkan kebijakan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan gender dan teknologi, dilanjutkan diskusi isu gender dalam lembaga penelitian, termasuk di dalamnya sumber daya peneliti, dan metodologi penelitian yang responsif gender. Bagian akhir memaparkan ilustrasi penerapan kebijakan ini dalam program yang diperoleh dari sumber kedua. Hal ini disajikan sebagai *lesson learned*.

Dalam aturan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), kebijakan sosial di bidang gender sudah menjadi komitmen, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan. Ada beberapa masalah umum dalam pelaksanaan PPRG. Pertama, adanya implementasi yang menyeluruh dari apa yang sudah dijabarkan di atas. Walaupun sudah ada bagian yang menangani gender, kewenangan mereka terbatas dan kurang mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan kegiatan dan programnya. Kedua, adanya

kelemahan karena komitmen yang belum berjalan dengan baik, penanggung jawab selalu berganti-ganti orang sehingga tidak terjadi pendalaman dari kegiatan yang dilaksanakan. Ketiga, sulitnya memperoleh penanggung jawab dan mereka yang bergerak dalam berbagai kegiatan dan program kurang mencoba memasukkan gender karena kelemahan pemahaman gender yang mereka miliki.

Kondisi di atas memperlihatkan kesenjangan antara keinginan (ideal) program PUG dengan penerapannya. Untuk beberapa hal, PUG dibahas dalam bentuk wacana dan sebagai imbauan bahwa elemen gender dimasukkan ke dalam program dan kegiatan. Bagian ini membahas PUG dan situasi sosial yang dihadapinya saat diterapkan. Selain itu, terdapat beberapa ilustrasi sebagai arahan penerapan. Terdapat pula beberapa pertautan dari gender sebagai konsep di dalam penerapannya pada penelitian karena berkaitan dengan metodologi. Pada bagian akhir, dipaparkan tentang ARG atau anggaran responsif gender. ARG merupakan turunan langsung untuk memastikan bahwa program PUG dapat dilaksanakan di dalam penelitian.

Gender dan Penelitian

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dasar dari adanya gender sebagai metode penelitian dan tindakan praktisnya adalah sebagai berikut:

“... feminist knowledge is based on the premise that the experience of all human beings is valid and must not be excluded from our understanding, whereas patriarchal knowledge is based on the premise that the experience of only half the human population needs to be taken into account and the resulting version can be imposed on the other hand.” (Nakray 2006).

“... pengetahuan perempuan berdasar pada premis bahwa semua pengalaman manusia adalah valid dan tidak boleh

disingkirkan dari pemahaman yang ada, padahal pengetahuan patriarkis berasal dari premis bahwa pengalaman separuh manusia (baca: laki-laki—pen) perlu dipertimbangkan dan versi yang dihasilkan dapat ditekankan pada kelompok lain.”

Kutipan di atas memperlihatkan kritik pengetahuan perempuan terhadap pemikiran yang ada saat ini. Pengetahuan perempuan menyatakan bahwa pengetahuan bersifat seksis karena dasar pembentukannya berasal dari pengalaman dan kajian yang terutama berasal dari laki-laki. Pengetahuan yang tumbuh tidak memasukkan pengalaman perempuan dalam pembentukan pengetahuan yang ada. Pemahaman perempuan seperti ini menjadi landasan pentingnya memasukkan elemen gender, untuk memastikan pengalaman perempuan masuk ke dalam proses pembentukan pengetahuan. Melalui proses seperti ini, pengetahuan menjadi berimbang karena memasukkan pengalaman keduanya: laki-laki dan perempuan. Melalui konsep gender, dan metode penelitian perempuan yang diterapkan dalam program penelitian, keinginan untuk menghasilkan gambaran keseimbangan gender dapat diterapkan.

Strategi untuk menghasilkan gambaran yang setara tentang laki-laki dan perempuan, dalam kegiatan penelitian dapat dilihat dari dua kecenderungan memasukkan gender dalam penelitian seperti berikut ini:

1. Program khusus perempuan, adalah program di mana isu dan tema ditujukan dan difokuskan untuk meneliti dan mengkaji perempuan. Dalam proses tersebut, data dan informasi juga menampung situasi sosial umum. Keuntungan cara ini adalah elemen perempuan menjadi hal yang diutamakan dan secara langsung menysasar masalah perempuan.
2. Program *mix* atau campuran, di mana gender masuk dalam elemen penelitian, namun tidak dibedakan dengan tegas. Cara ini adalah bagian dari proses pengarusutamaan gender yang memasukkan elemen gender dalam penelitian yang dilakukan. Kelemahannya, peneliti perlu secara khusus memberikan

perhatian yang setara pada data dan informasi yang sensitif gender. Dibutuhkan peneliti yang memiliki latar belakang keilmuan tentang gender atau yang mempelajari gender. Peneliti ini mendapatkan tugas untuk melihat isu dan tema penelitian yang dikaitkan dengan masalah gender.

Membicarakan gender dalam penelitian tidak terlepas dari posisi gender di dalam kelembagaannya. Sebagai prakiraan, Naila Kabeer (Kabeer 1994, 87) menggambarkan posisi gender dalam institusi yang dapat dipadukan dengan posisi gender dalam lembaga penelitian. Berdasar pemikiran Kabeer, tantangan memasukkan gender dalam penelitian dapat dijelaskan seperti berikut:

Tabel 1 menggambarkan situasi gender dalam lembaga penelitian. Paparan tersebut berbentuk narasi kualitatif, namun dapat dipergunakan untuk menggambarkan situasi sosialnya. Kelemahan utamanya adalah data dan informasinya belum terpilah berdasarkan gender walaupun kebijakan PUG dan ARG menekankan perlunya mempertimbangkan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Tanpa memasukkan elemen gender, kebijakan atau kondisi yang ditampilkan adalah gambaran netral gender, padahal yang diinginkan adalah kebijakan yang redistributif gender. Pertimbangan kebijakan yang redistributif gender akan lebih besar dibandingkan kebijakan yang netral gender.

Dengan memasukkan gender dalam proses penelitian, kebijakan dapat ditujukan secara langsung menjadi kebijakan yang spesifik gender dan bahkan yang redistributif gender. Namun, yang jelas dampak mendasarnya adalah data dan informasi yang terpilah berdasarkan gender semakin banyak.

Status Gender dalam Penelitian

Status gender dalam penelitian di Indonesia masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan bahwa yang melakukan penelitian gender adalah organisasi atau lembaga yang secara spesifik mengangkat gender, misalnya Kajian Gender atau Pusat Studi Wanita. Selain itu, masih banyak informasi dan data yang ada ma-

Tabel 1. Tantangan Kelembagaan Isu Gender

Butir Umum dalam Kelembagaan	Deskripsi Situasi
Aturan yang melihat regulasi yang ada, aturan tentang perilaku, prinsip inklusi dan eksklusif.	<p>PUG didukung dengan kebijakan pemerintah hingga dukungan penganggaran.</p> <p>Fakta bahwa data dan informasi belum terpilah berdasarkan gender.</p> <p>Belum semua peneliti paham tentang gender.</p>
Individu—siapa yang boleh melakukan dan siapa yang tereksklusi, tujuan dari lembaga	<p>Peneliti dengan kepedulian terhadap gender melakukan penelitian yang memasukkan gender.</p> <p>Penelitian dengan tema ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung tidak memasukkan elemen gender.</p> <p>Peneliti tanpa pengetahuan gender tidak semua memasukkan gender di dalam proses penelitian.</p> <p>Lembaga perlu memasukkan gender sebagai bagian dari kebijakan PUG</p>
Sumber daya—distribusi otoritas, jasa yang berkaitan dengan lembaga	<p>SDM peneliti dan perencana yang memiliki dasar pengetahuan gender terbatas.</p> <p>Ada kebutuhan memasukkan gender karena hasil penelitian dipergunakan untuk membuat keputusan</p>
Praktis/kebiasaan-perilaku, kegiatan, tugas, ritual , upacara dan prosedur	<p>Gender dapat masuk dalam proses perencanaan SDM dan program lembaga.</p> <p>Memperhatikan jumlah peneliti perempuan dan tantangan yang dihadapi mereka.</p> <p>Aturan yang ada masih netral gender dan belum memasukkan elemen gender di dalamnya.</p>
Kekuasaan - lembaga menentukan hubungan kekuasaan dan otoritas antara individu berdasarkan aturan kelembagaan, sumber daya, dan praktis yang ada	<p>Lembaga netral gender, namun perlu memasukkan gender karena menjadi bagian dari aturan kelembagaan.</p> <p>Sumber daya dengan fokus gender perlu digalang dalam <i>desk</i> gender dan perencanaan yang sensitif gender.</p>

sih belum memasukkan elemen gender, karena data belum terpilah berdasarkan gender. Akibatnya, penelitian tidak dapat memberikan gambaran tentang perempuan. Data dan informasi yang spesifik gender memiliki peran penting dalam memahami masalah untuk menghindari keputusan bias gender. Jika dikaitkan dengan paparan sebelumnya mengenai ilmu yang seksis, maka tanpa memasukkan gender, masalah perempuan cenderung tidak dilihat dan dipahami sebagai masalah. Hal ini memperlihatkan bahwa mengembangkan pengetahuan yang sensitif gender akan menghasilkan (ke)ilmu(an) yang setara gender.

Implikasi dari teori dan metode penelitian gender adalah dibutuhkannya spesialis di bidang gender atau individu yang memiliki pengetahuan tentang gender. Mereka adalah bagian dari jumlah massa yang memiliki pemahaman tentang gender dan akan mengisi *desk gender* atau bidang yang mengurus tentang gender, yang akan membantu dan memberi keyakinan tentang penerapan PUG. Selain itu, massa yang memiliki pemahaman dan pengetahuan gender merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mengembangkan gender sebagai pengetahuan.

Oleh karena itu, selain substansi penelitian, hal lain yang perlu diperhatikan dalam lembaga penelitian adalah sumber daya peneliti. Berikut ini ilustrasi yang menggambarkan situasi sumber daya peneliti. Berbeda dengan kondisi di kementerian/lembaga lain, dalam lembaga penelitian, sumber daya peneliti merupakan sumber daya utama dan yang paling besar. Selain memiliki jabatan fungsional peneliti, beberapa peneliti juga menduduki jabatan struktural yang bertanggung jawab terhadap manajemen penelitian dan tugas administrasi lainnya. Di LIPI, misalnya, seluruh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Bidang Penelitian (eselon II dan III) dijabat oleh peneliti. Untuk dapat melakukan analisis gender di lembaga penelitian diperlukan berapa informasi dasar seperti data terpilah (laki-laki dan perempuan) sumber daya peneliti, baik yang hanya menduduki jabatan fungsional maupun yang menduduki jabatan struktural. Selain itu, diperlukan data terpilah keberadaan peneliti berdasarkan keilmuan (ilmu sosial dan ilmu alam).

Penting bagi suatu institusi atau kelembagaan memiliki *data base* berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin atau statistik gender untuk kebutuhan implementasi PUG. Data terpilah menurut jenis kelamin harus dikumpulkan, dianalisis, dilaporkan secara sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa kebijakan program dan implementasinya tidak didasarkan asumsi yang salah atau berdasarkan atas stereotip gender yang sering kali merugikan pihak perempuan. Diperlukan data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada dampak terhadap kesenjangan gender.

Kajian tentang analisis gender dalam pembangunan yang pernah dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2007 di 18 kementerian dan lembaga di 7 provinsi dan 7 kabupaten/kota, dapat dijadikan contoh dalam mengungkapkan persoalan-persoalan karena tidak tersedianya data terpilah (laki-laki dan perempuan). Menurut kajian Bappenas, tidak adanya data terpilah terutama disebabkan masih terbatasnya keahlian gender dan kapasitas untuk mengumpulkan data dengan tepat sehingga menghambat upaya pengarusutamaan gender di sebagian besar lembaga Indonesia. Dalam perumusan/penyusunan berbagai kebijakan pun sering kali tidak dibuat berdasarkan data terpilah sehingga ditemukan beragam persoalan terkait dengan kualitas pelaporannya (Bappenas dan KPPA 2007).

Studi yang dilakukan Bappenas pada 2010 terhadap 41 kabupaten/kota memperlihatkan masih lemahnya pertimbangan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Dalam komponen penganggaran berdasarkan perspektif gender, terlihat kesenjangan dalam berbagai aspek, misalnya dalam penyusunan program advokasi, pelaksanaan program dan pemilihan strategi untuk tahun yang sama. Kenyataannya, baru ada lima wilayah yang menggunakan data terpilah dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) pada tahun terkait, dan data ini tidak dipakai dalam penyusunan anggaran atau rencana dan kebijakan pembangunan lainnya (Circle Indonesia 2013). Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa hanya sembilan pemerintah lokal yang

memfasilitasi pelaksanaan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bappenas, menyangkut keharusan menyertakan jumlah minimal perempuan selama persiapan Musrenbang (Circle Indonesia 2013).

Tabel 2. Jumlah Peneliti di 12 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Berdasarkan Jabatan Peneliti dan Jenis Kelamin, Oktober 2013

No	Nama Instansi	Jenjang Jabatan Peneliti				Jenis Kelamin			
		Pertama	Muda	Madya	Utama	Laki-laki		Perempuan	
		(Jml)	(Jml)	(Jml)	(Jml)	Jml	Percent (%)	Jml	Percent (%)
1	K. Pertanian	436	487	560	260	1045	59,6	698	40,4
2	LIPI	489	427	369	243	899	58,9	629	41,1
3	Badan Tenaga Nuklir Nasional	76	95	166	91	303	70,8	125	29,2
4	K. Kelautan dan Perikanan	143	175	106	62	303	62,3	183	37,7
5	K. Kesehatan	176	121	100	25	144	34,1	278	65,9
6	K. Kehutanan	106	168	134	39	274	61,3	173	38,7
7	K. Pendidikan & Kebudayaan	154	210	257	46	343	51,4	324	48,6
8	K. Perindustrian	157	116	124	7	214	53,0	190	47,0
9	K. ESDM	128	55	70	30	212	74,9	71	25,1
10	LAPAN	74	88	91	25	192	69,1	86	20,9
11	BPPT	4	34	127	87	217	86,1	35	14,9
12	K. Pekerjaan Umum	91	51	74	25	203	84,2	38	15,8

Sumber: Pusbindiklat Peneliti LIPI 2013.

Tabel 2 memperlihatkan jumlah peneliti berdasarkan jenjang kepangkatan dan jenis kelamin di 12 kementerian dan lembaga pada Oktober 2013. Dilihat dari jenjang kepangkatan, jumlah terbesar peneliti di hampir semua kementerian dan lembaga terkonsentrasi pada jenjang Peneliti Madya. Hal ini tidak mengherankan mengingat jumlah angka kredit yang dibutuhkan dari jenjang Peneliti Madya IVc ke IVd adalah 150, sedangkan dari IVd (peneliti Utama) ke IVe membutuhkan 200 dibanding dari Peneliti Muda ke Peneliti Madya 100 angka kredit. Artinya, data terpilah laki-laki/perempuan yang terkait jenjang kepangkatan belum sempurna.

Tidak tersedianya data tersebut berakibat pada sulitnya melakukan analisis mengenai jenjang kepangkatan peneliti berdasarkan jenis kelamin. Ditengarai proporsi peneliti perempuan akan lebih besar di jenjang Peneliti Madya ke bawah, sedangkan Peneliti Utama didominasi oleh peneliti laki-laki.

Tabel menunjukkan bahwa proporsi peneliti laki-laki lebih besar dibanding dengan peneliti perempuan di hampir semua kementerian dan kelembagaan. Di beberapa lembaga, seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Badan Pusat Pengkajian Teknologi (BPPT), dan Kementerian Pekerjaan Umum, lebih dari dua pertiga (>70%) peneliti yang dimiliki adalah laki-laki. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada kegiatan penelitian yang dilakukan kurang memperhatikan analisis gender. Dari 12 kementerian yang mempunyai jumlah peneliti terbesar, hanya di Kementerian Kesehatan yang mempunyai peneliti perempuan lebih besar (65,9%) dibanding dengan peneliti laki-laki (34,1%). Data dan informasi tersebut menunjukkan proporsi peneliti berdasarkan jenis kelamin, namun apabila terdapat data terpilah tentang jenjang pendidikan, gambaran akan lebih komprehensif.

Konsep pengarusutamaan gender dalam konteks lembaga penelitian perlu memasukkan jabatan kepangkatan, baik fungsional maupun struktural. Proses penyelenggaraan kelembagaan yang memiliki agenda pengarusutamaan gender, salah satu indikatornya adalah dengan menyusun distribusi jabatan kepangkatan fungsional dan struktural (pegawai administrasi, peneliti, dan pejabat) menurut perspektif gender. Desain kelembagaan yang ramah gender perlu mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari jabatan fungsional, pangkat struktural, dan golongan. Konsep kesetaraan gender haruslah menjadi komitmen dalam suatu kelembagaan/organisasi. Pengalaman dari berbagai pihak menunjukkan bahwa meskipun sudah ada perbaikan, jumlah perempuan yang menduduki jabatan senior manajemen maupun yang memiliki karier profesional masih sangat terbatas. Dalam lingkup kerja manajemen dan administrasi, sudah menjadi suatu fenomena

global bahwa perempuan lebih banyak ditempatkan pada posisi pekerjaan/jabatan atas dasar stereotip perempuan, seperti keramahan, kepedulian dan kelembutannya, bukan atas ketelitiannya. Ini bukanlah posisi pembuat kebijakan atau pemegang kunci kebijakan organisasi.

Secara umum, suatu organisasi disebut memiliki sensitif gender apabila memiliki struktur dan budaya organisasi yang peka gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memperoleh kedudukan/posisi secara setara. Hasil kerja laki-laki dan perempuan juga dinilai setara. Selain itu, laki-laki maupun perempuan memperoleh akses yang sama untuk berinteraksi sosial, juga mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap kerja/prestasi yang dihasilkan. Beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan dalam membangun organisasi yang memiliki sensitivitas gender, yaitu: (1) Adanya keseimbangan antara staf perempuan dan laki-laki, khususnya dalam posisi senior manajerial dan peran-peran penentu kebijakan. Organisasi yang tidak memiliki keseimbangan komposisi jabatan kepegangatan, kemungkinan besar akan melahirkan kebijakan yang bias gender; (2) Selain komposisi kepegangatan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, diperlukan juga adanya kesadaran dan sensitivitas gender (*gender awareness* dan *gender sensitivity*) di tingkat kepemimpinan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak bias gender (Macdonald 1994).

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah terkait dengan *capacity building*, pengembangan kapasitas, yang dilakukan oleh suatu lembaga. Apakah dalam perencanaannya sudah memfokuskan pada kebutuhan para karyawannya dan apakah dalam mempromosikan jabatan kepegangatan juga sudah sejalan dengan konsep kesetaraan gender melalui agenda pengarusutamaan gender? Untuk mendorong agenda pengarusutamaan gender di lingkungan kelembagaan penelitian, strategi kebijakan perencanaan jabatan kepegangatan perlu diarahkan pada strategi-strategi yang dapat menstimulasi, khususnya terhadap perempuan yang kenyataannya masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Tujuannya untuk dapat

berpartisipasi dalam program/pelatihan sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi perempuan dalam berbagai aspek.

Berdasarkan perspektif gender, tidak dapat dibenarkan adanya asumsi bahwa masalah, kebijakan, program, kegiatan itu netral sifatnya. Selain ketersediaan data terpilah, hal terpenting lainnya yang harus dipersiapkan terkait dengan data adalah ketersediaan SDM yang dapat menganalisis data terpilah tersebut dan membuat suatu gender analisis berdasarkan data tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat diidentifikasi berbagai masalah (isu) yang berkaitan dengan kesenjangan/disparitas gender dan dapat didiagnosis akar permasalahannya. Terlebih lagi, Indonesia telah mencanangkan PUG sejak tahun 2000 sehingga memperlihatkan perkembangan yang lambat jalannya. Perkembangan dukungan dari kebijakan merupakan implementasi dari tujuan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melakukan analisis gender dalam pembuatan proposal dan pelaksanaan penelitian, dapat dipastikan hasil penelitian yang dilakukan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dikaji dan penggunaan metodologi yang memberdayakan potensi laki-laki dan perempuan secara optimal. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut dapat memberi solusi yang lebih tepat, khususnya yang berkaitan dengan manusia, mendorong kebijakan yang responsif gender serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Setiap kebijakan dan program pembangunan perlu berlandaskan hasil penelitian yang sensitif gender. Pada dasarnya, analisis gender tidak hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian saja, tetapi juga diperlukan untuk memonitor tujuan maupun program kegiatan pembangunan. Dengan melakukan analisis gender, dapat dikaji apakah tujuan maupun program kegiatan yang akan dilakukan telah mengakomodasi kebutuhan serta pengalaman laki-laki dan perempuan; memastikan apakah target sasaran laki-laki dan perempuan mendapat akses dan manfaat dari suatu program kegiatan.

Banyak proyek pembangunan yang kurang berhasil atau gagal disebabkan perempuan tidak diperhitungkan dalam pertimbangan

pencarian solusi. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam mengidentifikasi akar permasalahan. Kemiskinan, misalnya, sering dianggap netral gender sehingga program yang dilaksanakan kurang memperhatikan keperluan perempuan. Jaringan pengaman sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan cenderung ditujukan kepada laki-laki, padahal penduduk miskin terbanyak adalah perempuan. Akibatnya, angka *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia) terus terpuruk karena banyak perempuan tidak dapat menikmati dampak pembangunan. Oleh karena itu, analisis gender sangat diperlukan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dalam program pembangunan dan diberi penguasaan terhadap sumber daya, seperti informasi, pengetahuan, keterampilan, atau kredit secara adil.

Status gender dalam penelitian juga dapat dilihat dari keberadaan lembaga penelitian yang mengajarkan atau mendiseminasikan pengetahuan gender. Di Indonesia, lembaga yang melaksanakan pendidikan keterampilan gender tingkat universitas terbatas di Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin. Widjajanti M. Santoso dan Eniarti Djohan (2013) menunjukkan bahwa hal ini tidak berubah setelah bertahun-tahun, bahkan keberadaan mereka sangat menyedihkan karena lemahnya dukungan akademis dari lembaga yang memiliki otoritas. Untuk memperlihatkan penggunaan gender di dalam program, kita bisa menggunakan timbangan dari Ann Therese Lotherington yang menunjukkan 4 karakter yang dihadapi ketika memasukkan gender dalam kegiatan (Macdonald 1994, 36). Timbangan ini membantu kita memahami posisi kegiatan terhadap proses integrasi gender dalam suatu kegiatan.

1. Inovator adalah individu atau peneliti yang sudah melakukan upaya untuk melihat kecenderungan berdasarkan gender dalam proses penelitian. Mereka terbuka terhadap ide baru dan tidak khawatir serta suka tantangan. Mereka sudah melakukan kajian ataupun sudah memiliki pengetahuan tentang gender.
2. Birokrat yang sadar akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk yang berhubungan dengan gender, secara

pribadi mereka tidak terlalu memahami konsep gender, namun menerima adanya kebijakan tentang gender dan mau melaksanakannya.

3. Peneliti atau individu yang dikategorikan sebagai “*the hesitator*”, mereka secara publik tampak mendukung, namun merupakan bagian dari tampilan di ruang publik. Mereka masih berada pada situasi yang terpecah antara pemahaman pribadi dan kebutuhan di ruang publik.
4. Mereka yang menentang atau “*the tough guys*”, adalah peneliti yang secara langsung menolak pendekatan gender, sebagai bagian dari pemahamannya.

Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa gender adalah sebuah spesialisasi pengetahuan dan keahlian. Jika berbicara tentang lembaga penelitian, dibutuhkan individu yang memiliki pemahaman ini. Perlu juga mengembangkan *desk* khusus gender untuk memastikan bahwa gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian dan kelembagaan. Sebaiknya dalam lembaga ada tim gender yang tugas dan fungsinya memastikan gender menjadi bagian dari penelitian dan kegiatan yang berlangsung.

Hal ini adalah butir penting pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam lembaga penelitian, di mana ahli gender, *desk gender*, dan tim gender adalah bagian dari kegiatan mengintegrasikan gender. Dengan demikian, dalam masalah kelembagaan, manajemen perlu melakukan pelatihan, perencanaan, dan *monitoring* serta evaluasi berbasis gender. Mereka juga menjadi bagian dari jejaring pengarusutamaan gender di tingkat nasional.

Peran Penting Gender dalam Penelitian

Perencanaan di lembaga isu pengarusutamaan gender perlu memperhatikan tiga kecenderungan situasi gender di bawah ini:

1. Kebijakan netral gender, yaitu kebijakan pada umumnya, yang belum memasukkan gender dalam proses perencanaan.

2. Kebijakan yang spesifik gender adalah kebijakan yang sudah sadar tentang posisi perempuan yang lemah dan rentan sehingga memfokuskan kebijakan dan kegiatannya untuk meningkatkan peran gender.
3. Kebijakan redistributif gender atau transformatif gender adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengubah situasi hubungan gender yang tidak setara.

Dalam pilihan metode penelitiannya, pendekatan gender memberikan keleluasaan untuk menggarapnya. Hassan, Ali, dan Ahmad (2006) membuat tinjauan singkat tentang pendekatan analisis gender dan menggambarkan bahwa pendekatan kualitatif dan kuantitatif dipergunakan secara terpisah dan juga secara bersamaan. Selanjutnya, tergantung isunya. Metode penelitian yang dipergunakan disesuaikan dengan situasi sosial dan isu yang digarap, seperti wawancara mendalam dan penggunaan *mix methods*. Walaupun demikian, dalam kesimpulannya, mereka menyatakan bahwa penggunaan *mix methods* akan memberikan gambaran yang lebih utuh.

Jika penelitian ingin menggambarkan kondisi sebuah masyarakat yang utuh, pendekatan gender akan memberikan informasi yang utuh. Keutuhan informasi ini merupakan langkah untuk menghasilkan perbaikan dari kondisi tertentu. Sebagai ilustrasi, dengan adanya informasi tentang gender, dapat diperoleh gambaran tentang kemiskinan perempuan. Isu kemiskinan perempuan bukanlah sebuah fakta dan fenomena yang dibaca terlepas dari gambaran umum tentang kemiskinan. Sejauh ini, kadang isi gender dibaca terlepas dari hal lain dalam kategori tertentu. Dengan demikian, fakta dan informasi tentang kemiskinan harus dibaca secara bersamaan, di mana informasi tentang kemiskinan perempuan adalah informasi yang membuat gambaran kemiskinan menjadi lengkap.

Selain itu, adanya isu gender dalam penelitian akan menghasilkan gambaran yang lebih baik. Dengan gambaran yang lebih baik, pembuatan perencanaan dan kebijakan akan lebih baik. Dalam masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memasukkan gender, dapat dihasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, seperti proporsi tubuh dan mesin yang dihasilkan. Selain

itu, teknologi dapat mempermudah pekerjaan perempuan, seperti menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan murah. Energi yang ramah lingkungan dan terjangkau merupakan kebutuhan setiap keluarga. Energi harus dihitung juga sebagai pengeluaran rumah tangga yang menentukan. Beberapa rumah tangga cenderung membeli makanan siap saji/olahan karena memasak di rumah akan meningkatkan pengeluaran mereka. Sebagai akibatnya tidak hanya keluarga tersebut terekspos zat pengawet dan bahan kimia yang tidak baik bagi tubuh, juga sebagai masyarakat kita kehilangan cara memasak, menu spesifik, dan memasak kehilangan fungsi sosialisasinya. Kemudahan dan kemurahan untuk membeli di luar rumah sudah menghasilkan masalah sosiologis yang penting.

PUG dalam Penelitian

a. Dalam Prioritas Penelitian

PUG adalah sebuah strategi mengembangkan pemahaman gender, sekaligus sebuah penerapan metode penelitian dengan memasukkan elemen gender. Jadi, ketika berbicara tentang prioritas, dasar pemikiran yang sudah dijelaskan di bagian lain memainkan perannya. Yang utama adalah menghasilkan data dan informasi yang terpilah. Artinya, jika semula kajian dan penelitiannya belum memasukkan elemen gender, sekarang dapat digunakan pendekatan ini untuk menghasilkan data terpilah. Ketika menghasilkan data terpilah, peneliti dapat memasukkan elemen gender, terlepas dari pilihan perspektif dan pandangannya. Dengan cara ini, gender dapat masuk ke dalam kajian atau penelitian secara langsung.

Jika melihat adanya kategori program yang secara langsung menyatakan gender sebagai pendekatannya dan yang tidak, prioritasnya diserahkan kepada tim yang bersangkutan. Jika ada tim yang secara langsung menyatakan bahwa gender adalah pertimbangan kegiatan mereka, pertimbangan lainnya adalah kebutuhan masyarakat akan hasil kajian atau penelitian yang dilakukan. Semakin besar signifikansinya, analisis gender menjadi semakin penting.

Pertimbangan prioritas akan muncul dengan sendirinya, jika menggunakan masalah gender yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konsep seperti perbedaan, kesenjangan, ketertindasan, dan sebagainya merupakan masalah gender yang dapat mengarahkan kajian atau penelitian. Masalah seperti ini juga dapat menjadi dasar penentuan prioritas dari kajian yang ada.

Hal kedua yang menjadi pertimbangan adalah kebijakan nasional PUG yang menjadi dasar penggunaan pendekatan ini. Artinya, secara nasional, Indonesia telah menyatakan penggunaan gender sebagai salah satu *entry point* untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan gender. PUG sendiri tidak terbatas pada kebijakan nasional saja, tetapi sudah menjadi kepedulian dunia global untuk memasukkan gender sebagai agenda kegiatan di semua kegiatan dan lini. PUG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mewujudkan isu yang penting ke dalam program dan kegiatan sehingga elemen tersebut dapat menghasilkan masyarakat berkeadilan gender. Selain gender saat ini pendekatan pengarusutamaan juga dipergunakan oleh isu lingkungan untuk meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

b. Dalam Penganggaran

Memperhatikan gender dalam anggaran merupakan implikasi dari PUG yang berjalan bersamaan dengan *gender budgeting*. Pada dasarnya, sebuah strategi penganggaran dapat dilakukan di tim yang bersangkutan, dengan memberikan perhatian khusus kepada tim yang menekankan pendekatan gender. Namun, dalam konteks penganggaran di tingkat kelembagaan, penganggaran ini merupakan sebuah strategi atau tindakan politis karena ada beberapa kegiatan yang menjadi turunannya. Penjelasan ini akan dipaparkan dalam bab yang membahas proses penganggaran yang berdasar pada kebijakan PUG dan ARG di Indonesia. Proses ini memiliki *template* yang perlu diikuti yang menjadi bagian dari penganggaran.

c. Dalam *Monitoring* dan *Evaluasi*

Dalam *monitoring* dan evaluasi, PUG juga berkaitan dengan audit gender. Audit gender adalah indikator yang dibuat sendiri oleh lembaga yang bersangkutan, sebagai cara menunjukkan capaian dan proses PUG dalam lembaga penelitian. Proses melakukan *monitoring* dan evaluasi dalam proses penelitian memiliki tiga pertanyaan utama (Wallace 1994, 119).

- a. Apakah tujuan penelitian bernuansa gender terlaksana?
- b. Bagaimana tercapainya tujuan?
- c. Apa dampak dari kegiatan ini?

Monitoring dan evaluasi dapat berbentuk hal yang dapat dihitung seperti jumlah dana, tetapi evaluasi dalam bentuk kualitatif juga sama pentingnya. Penekanan kuantitatif akan menunjukkan jumlah dana, kegiatan, capaian dan dampak, sehingga dapat dilihat kecenderungan APKM meningkat, menurun, atau stagnan. Sedangkan *monitoring* dan evaluasi dalam bentuk kualitatif dapat menggunakan *checklist* ataupun penjelasan singkat tentang berlangsungnya proses penelitian.

Indikator tentang *monitoring* dan evaluasi berdasarkan gender adalah melakukan kegiatan yang sederhana, yakni (Wallace 1994, 123):

1. Berbicara dan bertanya kepada peneliti laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan. Berbicara dengan masyarakat, jika program yang dilakukan melibatkan masyarakat.
2. Pelaksana *monitoring* dan evaluasi perlu memahami konsep dasar tentang peran, tanggung jawab perempuan; posisi perempuan di rumah tangga dan komunitas, kesempatan yang mereka mungkin dapatkan serta hambatan yang menyertainya.

Wawancara sederhana ini dibutuhkan untuk memperlihatkan adanya kesulitan dan tantangan dalam penerapan anggaran yang responsif gender. Dengan cara ini, tidak hanya perjalanan penelitian saja yang mendapat perhatian, tetapi juga sumber daya penelitiannya.

Peneliti terdiri dari laki-laki dan perempuan, dalam penjelasan sebelumnya diperlihatkan bahwa perbandingan peneliti bisa berbeda-beda. Namun, perempuan peneliti memiliki beban tambahan, yaitu fungsi reproduksi dengan urusan yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Kemudian produksi, yaitu kegiatannya sendiri sebagai peneliti dan kegiatan sosial, di mana perempuan diharapkan ikut serta dalam kegiatan di komunitas dan di masyarakat. Peneliti laki-laki tidak terlalu terpengaruh dengan hal ini karena kewajiban ini terutama dilakukan oleh istrinya. Barangkali ada masalah lain, yakni ketika perempuan peneliti perlu melakukan penelitian atau melanjutkan pendidikannya. Keputusannya akan sangat dipengaruhi oleh pandangan pasangannya, dan sebaliknya. Situasi seperti ini membutuhkan negosiasi dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya, baik dari pasangan maupun dari lembaga.

Paparan Tabel 3 berikut ini menggambarkan butir untuk dimonitor dan dievaluasi, indikator *monitoring*-nya dan bagaimana melakukan penilaiannya. Tabel 3 dibuat sebagai simulasi dalam matriks tentang apa saja yang menjadi pegangan yang dimonitor, kemudian indikator untuk melakukan *monitoring* dan evaluasinya, serta bagaimana melakukan penilaian bagi kebutuhan *monitoring* dan evaluasi tersebut.

Menerapkan gender dalam lembaga penelitian adalah langkah strategis untuk menggambarkan situasi sosial dan pengetahuan perempuan. Strategi penerapan ini disebut sebagai metode pengarusutamaan gender (PUG) yang sudah dijadikan kebijakan nasional. Dengan demikian, ada dua hal penting yang membutuhkan perhatian. Pertama, gender sebagai pendekatan, teori, dan metode. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya memasukkan gender dalam proses penelitian. Kedua, gender sebagai kebijakan nasional yang memiliki mekanisme penganggarannya sendiri yang disebut ARG. ARG akan dijelaskan di bagian lain yang mengulas tentang penganggaran.

PUG dan ARG menjadi penting di lembaga penelitian. Tidak terbatas pada ilmu sosial saja, PUG dapat masuk dalam desain

Tabel 3. *Monitoring dan Evaluasi*

Butir yang Dimonitor dan Dievaluasi	Indikator Monitoring dan Evaluasi	Penilaian terhadap Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan jelas • Ada indikator capaian • Ada perkiraan dampak dari kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif—dengan menunjukkan perhitungan. • Kualitatif—dengan memberikan penjelasan tentang prosesnya
Informasi tentang kegiatan yang dilakukan peneliti laki-laki dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa melakukan apa • Bagaimana melakukannya • Siapa melakukan kegiatan apa • Siapa memiliki pengetahuan yang relevan • Siapa membuat keputusan • Siapa menerima dampaknya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan dapat memperlihatkan adanya kerjasama yang setara dan seimbang. • Kelemahan yang ada menjadi input bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan penelitiannya
Informasi tentang penelitian bagi individu, komunitas, dan masyarakat yang ditelitinya	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa melakukan kegiatan apa • Siapa mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari kegiatan yang ada • Siapa yang membuat keputusan • Siapa yang mendapatkan dampak dari hubungan sosial atau situasi sosial yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi terpilah berdasarkan gender sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan sosial di masyarakat dan ketimpangan atau diskriminasi yang terjadi • Data dan informasi terpilah menggambarkan hubungan gender di masyarakat

Sumber: Diadopsi dari Wallace 1994, dan bahan lainnya.

atau kebutuhan yang menjadi tujuan penelitian itu sendiri. Dalam ilmu pengetahuan secara umum, gender perlu mendapat perhatian karena dalam kebijakan tentang ilmu pengetahuan pun gender belum dimasukkan sebagai sebuah kebutuhan. Di satu sisi, ini adalah sebuah konteks harmonisasi hukum, namun di sisi lain, ini adalah strategi menciptakan masyarakat yang berkeadilan gender.

Gender dan Teknologi

Gender adalah isu penting dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bawah ini beberapa suntingan yang menggambarkan bagaimana isu gender dibahas dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Gender dan teknologi adalah ilustrasi

penting untuk memperlihatkan bagaimana gender terintegrasi di dalam program yang tampak netral. Pada umumnya, mereka yang terlibat dalam kedua isu ini kurang memperhatikan masalah gender seperti yang dikemukakan dalam *Technical Assistance* (TC) International Atomic Energy Agency (IAEA):

“Technical specialists often argue that the technologies being used are “gender neutral,” failing to recognize that the technologies were designed to meet the needs of prototype (primarily male) users. (14).

“Para ahli teknologi umumnya berpendapat bahwa teknologi yang dipergunakan bersifat netral sehingga tidak mampu melihat bahwa teknologi didesain untuk memenuhi kebutuhan penggunaanya (umumnya laki-laki).”

Dengan dalih masalahnya adalah teknis, gender kurang diperhatikan atau tidak masuk dalam perhatiannya.

Paparan ini merupakan suntingan laporan mengenai perempuan sebagai penerima keuntungan dari program yang terfokus gender. Laporan ini dikemas dari International Atomic Energy Agency (IAEA), di mana Indonesia adalah salah satu negara anggotanya. Kepedulian terhadap isu gender menjadi penting karena perempuan memiliki kebutuhan akan intervensi ilmu dan teknologi.

“Two important areas are projects are those that use radiotherapy for the treatment of cancers common to women i.e. breast and cervical cancer and those that tackle human communicable diseases e.g. malaria, HIV/AIDS, hepatitis etc. where women are known to bear the higher burden of the disease”(Rathgeber 2006, 25).

“Dua kegiatan yang penting adalah proyek tentang penerapan radioterapi untuk kanker yang umumnya terjadi pada perempuan, yaitu kanker payudara dan kanker servik, dan memberantas penyakit yang menular antarmanusia seperti malaria, HIV/AIDS, hepatitis dan sebagainya, di

mana diketahui bahwa perempuan menanggung beban yang lebih besar dari penyakit ini” (Rathgeber 2006, 25).

Kutipan ini memberikan gambaran bahwa terdapat penyakit tertentu yang berkaitan dengan perempuan sehingga fokus dari kajian dan inovasi dalam hal ini menjadi sangat penting. Namun, ada pula kebutuhan yang menjadi perhatian umum, seperti yang dimasukkan dalam butir-butir MDGs seperti:

“Eradicating extreme poverty and hunger and in goals 5–8, which relate to reducing child mortality; improving maternal health; combating HIV-AIDS, malaria and other disease; ensuring global sustainability; and developing a global partnership for development. According to the TC Annual Report for 2004, “these five MDGs are having a clear influence on project planning and selection for TCF financing ” (Technical Cooperation 2003, 6). Consequently, a Gender Mainstreaming Action Plan (GMAP) for TC should build on the IAEA’s desire to contribute to the achievement of these UN goals”. (Rathgeber 2006, 28)

“Menghapuskan kemiskinan ekstrem dan kelaparan adalah tujuan 5–8, yang berkaitan dengan upaya mengurangi kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengatasi HIV-AIDS, malaria dan penyakit lainnya, mengupayakan ketahanan global; mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Menurut lampiran tahunan TC 2004 “lima target MDGs memiliki pengaruh nyata terhadap perencanaan dan pilihan penganggaran TCF sehingga konsekuensinya adalah rencana pelaksanaan PUB bagi TC harus dikembangkan sesuai dengan keinginan IAEA dalam kontribusinya mewujudkan tujuan PBB” (Rathgeber 2006, 28).

Kutipan ini menggambarkan isu besar yang perlu menjadi perhatian bagi pengembangan kajian dan penelitian yang diikat dalam program MDGs.

Secara internasional, PUG adalah kebijakan yang menjadi perhatian lembaga internasional dan kerja sama internasional seperti IAEA. Hal ini tampak pada pernyataan berikut.

“IAEA has made a firm commitment to building up the *number of women scientists* in the IAEA. In doing so, *female candidates for staff positions, fellowship opportunities or research grants* must sometimes be given priority and preference over equally qualified male candidates. There is a possibility of discrimination against qualified male candidates in some cases. While this is not desirable, it may be necessary. Traditionally in many regions of the world, *women have been discouraged from pursuing careers in science* (e.g. girls are discouraged from studying science in secondary school, from pursuing post graduate studies in science or from seeking employment as scientists). To counterbalance this history of discrimination, it is necessary to build a critical mass of female scientists and this must be done in a highly *proactive, innovative way*” (Rathgeber 2006, 35).

“IAEA sudah membuat komitmen untuk menghasilkan sejumlah ilmuwan perempuan di IAEA. Dengan demikian, dukungan untuk kandidat perempuan untuk posisi staf, kesempatan *fellowship* dan dana riset perlu mendapatkan prioritas dan mendapatkan kemudahan dibandingkan kandidat laki-laki. Meskipun terdapat kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap kandidat laki-laki yang memenuhi kualifikasi. Secara tradisional di banyak negara di dunia, perempuan mengalami hambatan untuk mengejar karier di dunia ilmu pengetahuan (misalnya anak perempuan mengalami hambatan mempelajari ilmu pengetahuan di SMP, hambatan belajar di tingkat pascasarjana bidang ilmu pengetahuan, dan hambatan mendapatkan pekerjaan sebagai ilmuwan). Untuk melawan sejarah diskriminasi seperti ini, sepertinya sangat perlu mengembangkan jumlah

ilmuwan perempuan yang memadai, dan harus dilakukan dengan cara yang sangat provokatif dan inovatif.”

Beberapa butir penting yang muncul dari komitmen IAEA ini adalah pentingnya memperhatikan dan mendukung partisipasi perempuan sebagai ilmuwan. Hal ini tidak mudah karena adanya pandangan hidup dan kebiasaan yang menghambat perempuan memiliki karier di bidang ini. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai ilmuwan yang disebut sebagai menciptakan *critical mass* atau jumlah yang signifikan sehingga memiliki representasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, komitmen dalam bentuk memberikan kesempatan beasiswa, memberikan bantuan penelitian yang menyasar ilmuwan perempuan, dengan tetap memperhatikan agar tidak terdapat diskriminasi terhadap ilmuwan laki-laki. Dalam menentukan kandidat atau pegawai perempuan, penentu kebijakan perlu memahami bahwa karier perempuan memiliki dinamika yang berbeda dari karier laki-laki. Perempuan memiliki masalah tradisionalnya, yakni memiliki beban ganda.

“In reviewing their dossiers, TC managers should recognize that these women may have combined their careers with child bearing and rearing responsibilities and consequently be slightly behind men of the same age in terms of professional experience” (Rathgeber 2006, 36).

”Dalam kajian mereka melalui data pegawai, manajer kerja sama teknik perlu memahami bahwa perempuan yang terlibat memiliki kemungkinan untuk mengombinasikan pengasuhan anak, mengembangkan tanggung jawab mereka sehingga konsekuensinya capaian mereka tertinggal dari laki-laki dengan umur dan pengalaman yang sama” (Rathgeber 2006, 36)

Ilmuwan perempuan membutuhkan perhitungan waktu yang berbeda karena melaksanakan juga beban reproduksi sehingga tidak

dapat bergerak lebih cepat daripada ilmuwan laki-laki. Sebagai ilustrasi, syarat beasiswa umumnya tidak melihat perbedaan gender dan menentukan misalnya umur tertua untuk master adalah 35 dan untuk doktoral adalah 40. Bagi perempuan, umur seperti itu adalah umur yang masih disibukkan dengan beban reproduksi sehingga ketika memiliki waktu untuk sekolah, kemungkinan mendapatkan beasiswa terhambat karena syarat umur yang tidak sensitif gender. Ilmuwan perempuan juga sulit untuk menyamai capaian ilmuwan laki-laki yang berkembang lebih dahulu daripada mereka.

Lesson learned lainnya adalah beberapa program APEC, dalam paparan Heather Gibb, dijelaskan perkembangan dalam konteks ilmu dan teknologi serta masalah yang berhubungan dengan pertanian. Paparan di bawah ini merupakan saduran dari bahan tersebut yang ditujukan untuk memberikan ilustrasi dari memasukkan gender dalam program penelitian yang berkaitan dengan teknologi. Bahan ini menarik untuk dipahami karena beberapa darinya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Asia. Bahan ini memberikan gambaran yang dapat dikembangkan di Indonesia sebagai bahan pertimbangan.

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah jejaring kerja sama di wilayah Asia dan Pacific yang peduli terhadap perkembangan kesejahteraan. Dalam programnya, APEC mengembangkan PUG sesuai dengan situasi dan kondisi dari negara masing-masing. Ada tiga agenda kerja sama, yaitu kegiatan industri berskala kecil, ilmu dan teknologi, serta masalah pangan. Dalam buku ini disertakan ringkasan kegiatan yang akan menjadi bahan pertimbangan isu-isu yang berkaitan dengan gender.

Dari berbagai kasus yang ada, terdapat beberapa kesamaan dari masalah yang dihadapi oleh perempuan, yaitu:

1. Pandangan bahwa perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga dan keluarga sehingga perempuan dimasukkan dalam ranah privat, menghasilkan pandangan yang menghalangi partisipasi perempuan di ruang publik. Ini memiliki

dampak yang besar terhadap partisipasi perempuan di bidang ekonomi.

2. Memiliki data terpilah gender adalah langkah awal untuk mengembangkan kegiatan selanjutnya.
3. Adanya kepedulian terhadap PUG.
4. Mengembangkan strategi melibatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan.
5. Keberlangsungan PUG ditentukan oleh pelatihan gender.
6. Mengidentifikasi perempuan sebagai partisipan aktif.

Dari ketiga isu yang dikembangkan APEC, dua di antaranya dipaparkan di sini, yaitu yang berhubungan dengan teknologi dan pangan sebagai pengait isu gender dan teknologi sebagai ilustrasi. Malaysia ingin menyiapkan diri untuk menghadapi masalah *digital divide* (kesenjangan digital) yang menjadi perhatian dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *National Information Technology Agenda* (NITA) mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan posisi melek TIK bagi perempuan. Kegiatan yang dilakukannya beragam, baik dalam kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur TIK, seperti menyediakan komputer, printer, perangkat lunak, dan membuat *website* untuk mendukung kegiatan forum. *Website* yang dibuat adalah dukungan bagi *Science and Technology Commission of the National Council of Women's Organizations* (NCWO). Pengembangan *website* ini dianggap sebagai capaian utama dari program ini. Mereka juga mengembangkan forum perempuan dan TIK, tercatat 350 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Juga menyelenggarakan pelatihan berdiploma yang menggandeng Cambridge University. Ada dua penelitian dengan tema "*The impact of IT on Women in Malaysia*" dan "*The Role and Status of Women in Science and Engineering in Malaysia*". Salah satu hasilnya adalah bahan pelatihan dengan menggunakan video, dan manual singkat penggunaan internet dalam dua bahasa. Catatan penting dari kegiatan ini adalah kebutuhan akan data terpilah gender tentang IT dan kaitannya dengan perempuan sebagai dasar untuk melakukan intervensi.

Kanada membuat kegiatan *Pathmaker*, yang diterjemahkan bebas sebagai ajang pencarian bakat. Program ini ditujukan untuk meningkatkan perhatian murid perempuan untuk mencari karier dalam bidang ilmu dan teknologi. Meskipun program ini dibuka untuk semua murid, murid perempuan mendapatkan dukungan khusus untuk terlibat di dalam kegiatan ini. Tim dari Carleton University, University of Ottawa, dan Algonquin College di Ottawa mengunjungi sekolah dasar dan menengah untuk memberikan wawasan tentang karier dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan matematika. Tim *pathmaker* mempekerjakan para muridnya sebagai fasilitator yang datang ke sekolah-sekolah dan menjadi *role model* bagi para murid. Dengan cara ini, jumlah murid yang mendaftar pada bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan matematika meningkat. Banyak fasilitator akhirnya berkarier dalam bidang tersebut. Dalam pelatihan yang diadakan di sekolah, para fasilitator dibantu bahan presentasi, *flyer*, dan informasi tentang bagaimana melaksanakan pendidikan ilmu pengetahuan yang menarik di sekolah-sekolah.

Program kerja sama Kanada dan Tiongkok dalam proyek migas dikembangkan melalui CIDA. Selain meningkatkan program migas, tujuannya juga untuk memasukkan elemen PUG. Berdasarkan analisis yang mereka lakukan, ditetapkan bahwa 30% partisipasi kegiatan ini haruslah perempuan. Dalam kegiatan yang mereka kembangkan, manajemen membentuk lembaga yang mendukung partisipasi perempuan, seperti adanya pelatihan bahasa, kemampuan presentasi, dan pelatihan sensitivitas gender. Hasil kegiatan ini adalah jumlah perempuan yang terlibat di dalam program ini dapat dipertahankan sebesar 30%. Mereka mampu mengembangkan karier sebagai manajer dan pelaksana senior. Laki-laki yang terlibat dalam program ini memahami konsep gender dan implementasinya dalam organisasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini memperlihatkan bahwa dukungan melalui PUG telah menghasilkan sumber daya manusia yang andal dan dibutuhkan semua orang. Situasi bekerja menjadi baik karena perempuan mendapatkan perhatian dan dukungan yang positif. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa

selain dukungan, juga dibutuhkan target yang masuk akal sehingga orang mampu memahami dan berpartisipasi dalam perubahan sosial yang ada. Resistansi terhadap gender juga berkurang karena semua orang mendapatkan pelatihan tentang sensitivitas gender, kesadaran gender, dan implikasinya dalam pekerjaan.

Kegiatan yang berhubungan dengan pangan melihat peran perempuan dalam kegiatan *aquaculture* atau budi daya laut. Dengan berkembangnya pasar dan teknologi, kegiatan ini menjadi terbuka untuk pasar, namun perempuan yang umumnya mengelola kegiatan ini tidak memiliki pelatihan dan pengetahuan yang baik untuk mendukung kegiatan ini. Akibatnya, perempuan termarginalisasi dari kegiatan ini. Kegiatan ini berkaitan dengan pola pembangunan berkelanjutan di mana peran perempuan menjadi penting untuk dikembangkan dalam konteks pembangunan pedesaan. Di Jepang, 60% petani adalah perempuan, begitu juga di Korea, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa perempuan perlu terlibat secara aktif.

Program PUG di dalam kegiatan *aquaculture* dikembangkan di beberapa negara, seperti Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dasar pemikirannya adalah mengantisipasi perkembangan *aquaculture* yang semakin terbuka pasarnya sehingga diharapkan petani perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan dimulai dengan upaya mengidentifikasi peran perempuan dalam *aquaculture* dan pengembangan potensinya. Identifikasi persoalan berusaha melihat konteks perkembangan ekonomi sehingga berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan. Kegiatan ini menghasilkan analisis terhadap masalah partisipasi perempuan dan menghasilkan kerangka untuk mengembangkan peran perempuan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa isu gender perlu dimasukkan sejak awal di dalam program dan kelembagaan sehingga kegiatan seperti pelatihan, pertemuan, dan *workshop* sudah melibatkan perempuan. Walau demikian, kegiatan ini membutuhkan indikator untuk melacak perkembangan dan melihat perubahan yang terjadi. Selain itu, mekanisme untuk melibatkan kegiatan ini di alam arus pasar komersial yang tersedia yang perlu dikaitkan dengan pasar yang ada. Kegiatan ini merupakan kegiatan pro aktif

untuk mengembangkan partisipasi perempuan. Salah satu bentuk pro aktifnya adalah mengembangkan “*women’s day*”, sebagai upaya untuk mengaitkan kegiatan perempuan.

Vietnam mengembangkan mesin untuk membantu petani perempuan agar meningkatkan produksi, waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, dan pengembangan kegiatan bidang pertanian. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan mesin berskala kecil yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Dengan identifikasi ini, perempuan memiliki keleluasaan waktu untuk menjaga keluarga dan melakukan kegiatan-kegiatan pengasuhan yang dibutuhkan keluarga dan masyarakat. Kegiatan penelitian berbentuk identifikasi dan inventarisasi kebutuhan mesin yang mampu membantu perempuan.

Anggaran Responsif Gender

Mengapa membahas PUG dan penganggaran serta pelaksanaan riset? Yang pertama, PUG adalah sebuah kebijakan sehingga berbicara tentang PUG saja tidak cukup. Pembahasan PUG perlu dikaitkan dengan ARG. Selain itu, penjelasan ini penting untuk menanamkan pemahaman bahwa ARG tidak hanya untuk kegiatan yang secara langsung berdampak bagi masyarakat, seperti pelayanan. ARG dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada perencana dan peneliti tentang cara memasukkan elemen gender dalam proses penelitian. ARG adalah rangkaian yang tidak terputus dari PUG. Menerapkan PUG akan berimbas pada pemberian porsi anggaran yang memadai. Tanpa anggaran maka PUG akan berhenti sebagai wacana semata. Paparan di bagian ini terbagi dua bagian. Yang pertama adalah paparan yang berbicara ARG dalam diskusi teoretis dan yang dikembangkan. Yang kedua adalah paparan tentang penerapan ARG di Indonesia.

Apa itu anggaran responsif gender? Terdapat banyak definisi tentang anggaran responsif gender terkait dengan kebijakan pengarusutamaan gender, yang memasukkan elemen gender di dalam pemikiran, perencanaan, dan implementasinya. Berdasarkan

paparan Angelika Blickhäuser dan Henning von Barga (2007), anggaran responsif gender adalah penganggaran yang tidak terbatas pada uang, melainkan pada upaya menjamin kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Kegiatannya tidak terbatas kegiatan ekonomi formal, tetapi juga kegiatan reproduksi, misalnya pengasuhan anak maupun lansia, dan kegiatan sosial lainnya. Menerapkan anggaran responsif gender berarti melakukan analisis gender untuk melihat diskriminasi berbasis gender dalam hubungan negara, industri, dan sektor privat, di mana perempuan berada dalam sektor privat yang tidak dibayar. Dalam melakukan analisis gender, digunakan berbagai cara, misalnya, mengamati upah dan kontribusi pekerjaan, pajak/penghasilan, tenaga kerja, ekonomi, keluarga, kepedulian sosial dan kepedulian masyarakat sipil, penerapan hukum, dan kegiatan evaluasi lainnya. Dengan demikian, ARG tidak terbatas pada institusi publik, tetapi juga pada kegiatan industri maupun asosiasi dan LSM.

Tujuan ARG (Blickhäuser dan von Barga 2007):

1. ARG menciptakan anggaran yang transparan dalam arti menunjukkan pentingnya memiliki kriteria di dalam penganggaran.
2. ARG menjamin keakuratan dan keberlangsungan kegiatan dan anggaran karena dana disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok sosial yang berbeda.
3. ARG menunjukkan adanya diskriminasi dalam penganggaran dan memungkinkan mengubahnya dengan memperhatikan kebutuhan gender.
4. ARG adalah cara untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan kesetaraan gender dalam kegiatan nyata dan margin keuangan yang lebih leluasa.

Mengacu Budlender, terdapat 7 butir penting untuk menerapkan ARG (Blickhäuser dan von Barga 2007):

1. Strategi sosial dan politik dalam melakukan evaluasi yang berorientasi pada kesetaraan gender.

2. Melakukan evaluasi yang sensitif gender dan analisis individual untuk melihat prioritas keuangan, sebagai cara untuk menjamin proses penganggaran yang berperspektif gender.
3. Melakukan analisis berbasis gender dalam pengeluaran publik.
4. Mendapatkan analisis berbasis gender dalam pendapatan publik.
5. Melakukan analisis berbasis gender dalam dampak dana publik terhadap manajemen.
6. Memfokuskan pada perencanaan dana berbasis kesetaraan gender dalam penganggaran jangka menengah.
7. Pemaparan penganggaran yang berbasis kesetaraan gender seperti akuntansi sebagai bentuk dari alat kontrol untuk memastikan penerapan ARG.

Gender tool box yang dikembangkan oleh Blickhäuser dan von Barga adalah ARG yang berbasis pada penganggaran dan program publik. Butir 3–6 adalah cara melakukan analisis gender dalam hubungan sosial berbasis gender. Dalam program yang lebih umum dan general, ARG dilakukan dengan PUG yang menggambarkan:

1. Analisis untuk melihat situasi nyata, terpilah gender, seperti bagaimana situasi distribusi sumber daya antara laki-laki dan perempuan, siapa yang melakukan pelayanan sosial pada komunitas dan bagaimana terjadinya distribusi pengupahan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari pengeluaran dan pelayanan. Analisis berorientasi pada kesetaraan gender dalam distribusi sumber daya yang ada; apakah laki-laki dan perempuan mendapatkan keuntungan dari distribusi sumber daya yang ada? Dapatkah distribusi yang tidak setara dianggap sebagai kompensasi dari diskriminasi? Apa yang menjadi akar masalah dari kesenjangan gender dan sumber daya yang tidak setara tersebut, dan bagaimana melakukan upaya mengurangi distribusi yang tidak setara tersebut?

2. Pembangunan berorientasi kesetaraan gender dalam distribusi sumber daya. Kegiatan ini melihat bagaimana perencanaan dana dan kekuasaan yang bermain sehingga menghasilkan distribusi sumber daya yang ada. Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menghindari distorsi berbasis gender?

Memasukkan anggaran responsif gender (ARG) merupakan jawaban terhadap lemahnya representasi gender dalam kegiatan. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Harapannya, ARG akan mengangkat kepentingan gender yang kurang didukung melalui anggaran. Jurnal Perempuan 46 memberikan ulasan tentang ARG dan permasalahannya di Indonesia. Secara umum, gambaran rendahnya kesadaran untuk mengimplementasikan ARG terlihat dari:

1. Adanya kelemahan pemahaman tentang ARG yang dianggap hanya menyoal perempuan.
2. Model ataupun metode yang disosialisasikan masih belum dikontekstualisasikan dengan sistem ataupun kondisi di Indonesia.
3. Kurangnya SDM untuk penerapan ARG baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun masyarakat.
4. Belum tersedianya profil gender, bahkan terkadang data terpilah pun tidak tersedia.
5. Belum tersedianya indikator ARG.

Setelah melakukan perencanaan, tahapan selanjutnya adalah penganggaran. Pada program atau kegiatan yang responsif gender, anggarannya disebut anggaran yang responsif gender (ARG). Pada dasarnya, ARG adalah mekanisme penganggaran dengan memasukkan informasi gender, dan bukan sebuah upaya untuk menyediakan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender. ARG adalah kegiatan yang lebih luas daripada perencanaan karena memiliki dasar pemikiran bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti:

- a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
- b. ARG adalah pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
- c. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
- d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;
- e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
- f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki dan 50% perempuan untuk setiap kegiatan;
- g. Tidak harus semua program dan kegiatan mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, tetapi ada juga kegiatan yang netral gender.

Dalam penganggaran, mekanisme ARG adalah mekanisme yang memberi keyakinan bahwa gender menjadi bagian dari perencanaan yang memiliki implikasi terhadap anggaran. Melalui ARG, perencanaan kegiatan secara langsung memasukkan gender sebagai isu yang perlu dipertimbangkan. Perencanaan tidak lagi disibukkan dengan kritik terhadap gender dan upaya untuk menjawab tentang signifikansi memasukkan gender dalam kegiatan. Paparan tersebut adalah bentuk ideal yang dijabarkan dalam aturannya.

Tabel 4 merupakan contoh anggaran yang sepiantas sudah responsif gender, namun jika diperhatikan terdapat beberapa kelemahan. Ilustrasi ini diambil dari informasi dari Jurnal Perempuan yang dalam edisi khusus memfokuskan kajian pada anggaran yang responsif gender. Informasinya diperoleh melalui kajian, salah satunya adalah tentang anggaran pemberdayaan perempuan. Seperti dijelaskan di atas, ARG tidak berarti bahwa ada anggaran yang khusus ditujukan bagi pemberdayaan perempuan, melainkan

Tabel 4. Anggaran Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi

No	Alokasi	Jumlah
1	Bantuan Kesejahteraan para Lansia	Rp50.000.000,00
2	Pemberdayaan kaukus perempuan politik Indonesia	Rp100.000.000,00
3	Pengembangan kesejahteraan keluarga	Rp150.000.000,00
4	Pengembangan kewirausahaan perempuan	Rp200.000.000,00
5	Peningkatan dan pemahaman PUG	Rp100.000.000,00
6	Festival Mojang dan Jejaka	Rp250.000.000,00
7	Perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat pembinaan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan lansia dan promosi kesehatan masyarakat	Rp200.000.000,00
8	Bantuan pemberdayaan majelis taklim	Rp200.000.000,00
9	PKK	Rp175.000.000,00
10	Dharma Wanita	Rp110.000.000,00
Total		Rp1.535.000.000,00

Sumber: APBD Kota Bekasi 2006

anggaran yang harus masuk dan “melekat” dalam perencanaan dan anggaran.

Menurut Juda Irlang, anggaran ini tidak tanggap gender karena anggaran lebih pada kegiatan perempuan, tetapi tidak ditujukan untuk kesetaraan gender. Tanggap gender dalam anggaran muncul pada program seperti kesehatan perempuan, pendidikan anak perempuan dan pegawai negeri perempuan, pengarusutamaan gender, juga anggaran untuk beasiswa anak, termasuk anak perempuan, ataupun kebutuhan UKM (Irlang 2006, 92–93). Anggaran ini tampaknya banyak, namun jika dibandingkan anggaran belanja pemimpin daerah yang lebih besar, jumlahnya terbatas. Dalam anggaran untuk perempuan, seharusnya kegiatan ditujukan bagi anggota masyarakat yang jumlah dan kepentingannya mendesak, contohnya masalah kesehatan. Namun, anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak dan merupakan kepentingan mendasar alokasi dananya terbatas dibandingkan anggaran seremonial dan tampilan para pemimpin daerah.

ARG Menerjemahkan PUG

Paparan bagian ini terdiri dari dua bagian besar yang tampaknya berbeda, namun sebenarnya saling mendukung. Yang pertama adalah prosedur ARG menjadi turunan dari kebijakan yang PUG. Paparannya merupakan prosedur dan *template* yang sudah menjadi mekanisme dari ARG. Bagian kedua membahas gender sebagai metodologi. Paparan ini merupakan paparan konseptual yang mendukung proses yang lebih teknis seperti ARG. ARG muncul karena adanya masalah yang dihadapi oleh perempuan yang terlihat dari perbandingan antara Human Development Index (HDI) indeks yang dikembangkan dengan memasukkan isu gender.

“GDI Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, walaupun mengalami peningkatan dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,664 pada tahun 2008 (KNPP dan BPS), tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan nilai HDI di tahun yang sama. Peningkatan GDI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-94 dari 177 negara” (KPPPA dan UNIFEM, 2010, 1).

Perhitungan mengenai Gender Empowerment Index (GEM) berdasarkan paparan KPPPA dalam mengantarkan alasan pentingnya ARG adalah: “...GEM Indonesia, yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan; juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,623 pada tahun 2008”. Akan tetapi, indeks yang dibuat dengan memperhatikan elemen ketenagakerjaan, ekonomi, dan politik masih jauh dari memuaskan. Untuk memastikan peningkatan indeks yang berkaitan dengan gender, kebijakan pengarusutamaan gender menjadi mekanisme untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kebijakan pengarusutamaan gender, selain merupakan kesepakatan global, juga menjadi perhatian nasional.

Kebijakan ini dimulai dengan adanya analisis gender terhadap masyarakat dan kelembagaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan

gambaran indeks yang perlu diperbaiki, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat masalah perempuan yang mendorong adanya penganggaran responsif gender (KPPPA dan UNIFEM 2010, 2). Ada beberapa alasan yang menjadi perhatian dari KPPPA, yaitu:

1. Belum melembaganya pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya dalam kebijakan, program, kegiatan terkait perencanaan, dan penganggaran, baik di pusat maupun di daerah;
2. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
3. Rendahnya akses, partisipasi, dan kontrol, manfaat perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya;
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan;
5. Belum efektifnya pelaksanaan penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah;
6. Terjadinya perempuan dan laki-laki yang mengkhususkan diri pada tugas yang berbeda, pada *setting* yang terpisah, mempunyai perbedaan dalam akses terhadap posisi tawar dalam perekonomian informal;
7. Perempuan lebih banyak terlibat di perekonomian informal karena berbagai alasan: (1) sesuai dengan peran gendernya sehingga mudah “masuk dan keluar”; (2) kelangkaan akses terhadap perekonomian formal karena adanya *gender stereotyping*; (3) mayoritas tidak memiliki persyaratan formal, persyaratan yang justru tidak dipunyai perempuan.

Ketujuh butir ini memperlihatkan gender adalah isu yang penting untuk dikembangkan di tingkat pengetahuan, yaitu dengan meningkatkan upaya agar lebih banyak orang memahami gender. Selain itu, dibutuhkan dukungan kebijakan untuk memastikan bahwa isu gender menjadi prioritas yang harus berjuang mengaktualisasikan dirinya dibandingkan masalah lain yang ada. Dibu-

tuhkan mekanisme, seperti anggaran, supaya keinginan mewujudkan kesetaraan gender menjadi komitmen pemerintah.

Bagaimana sebuah program memasukkan isu gender, adalah sebuah pertanyaan semua orang dan semua kementerian dan lembaga. Pertanyaan mendasar ini kemudian dijawab dengan memberikan kisi-kisi, program, atau rencana yang dapat diintegrasikan dengan isu gender. Berdasarkan paparan KPPPA (KPPPA dan UNIFEM 2010, vi), anggaran belanja responsif gender dibagi atas 3 kategori. Bahan ini diambil dari buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang generik, yaitu:

1. Anggaran khusus target gender adalah alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan dan laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
2. Anggaran kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Yang terlihat pada relasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan serta manfaat dari pembangunan.
3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun proses penguatan *capacity building*.

Tiga kategori itu menjadi kisi-kisi perencanaan dan kegiatan untuk memasukkan isu gender dalam program agar dapat dibiayai.

Yusuf Supiandi, pakar gender yang turut mengembangkan dan menyosialisasikan pedoman ARG menunjukkan dasar hukum yang menunjang ARG di Indonesia menurut Bappenas:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL;

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.

Kebijakan di atas menyangkut mekanisme perencanaan dan anggaran yang ditambahkan dengan kebijakan tentang ARG. Paparan dari kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender adalah upaya berbagai lembaga yang peduli terhadap gender dan mendapatkan mandat untuk menerapkannya. Berdasarkan bahan dari Bappenas:

“ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan” (Bappenas 2012).

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bappenas menjelaskan bahwa ada syarat dalam pelaksanaan ARG. Syarat ini menjadi penting dalam suksesnya penerapan dari PUG maupun ARG. Artinya, kebijakan PUG dan ARG memahami adanya tantangan, baik dalam pengetahuan yang belum meluas maupun dari penerapannya dalam mekanisme yang menunjang. Dengan demikian, di dalam penerapannya, individu dan lembaga harus menyadari perlunya beberapa hal di bawah ini:

1. Adanya kemauan politik berupa kebijakan pro gender seperti prioritas, tertera di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), RKP, rencana kerja kementerian/ lembaga (RENJA K/L).
2. Adanya partisipasi berupa keterlibatan semua pihak.
3. Adanya data terpilah jenis kelamin untuk menunjukkan adanya masalah.
4. Adanya sumber daya manusia yang memahami konsep gender.

Dalam penerapannya, terdapat bahan yang penting di dalam mekanisme ARG, yaitu *Gender Based Statement (GBS)*. Pengertian GBS seperti di bawah ini.

“Adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender” (Bappenas 2012).

Penjelasan tentang GBS terdapat pada penerapan PUG di Indonesia yang menjadi sumber penting dari penerapan PUG dan ARG.

Dalam konteks kebijakan, Pemerintah Indonesia telah berusaha menerapkan pengarusutamaan gender melalui serangkaian kebijakan dan mekanisme anggaran. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan kementerian/lembaga yang sudah menerapkan ARG. Kementerian dan lembaga di bawah ini merupakan sebagian dari lembaga yang sudah mendapatkan penguatan dan sosialisasi dari KPPPA.

Tabel 5 menggambarkan kementerian dan lembaga yang sudah mendapatkan sosialisasi dan kemudian mengembangkannya secara mandiri melalui anggaran mereka sendiri. Artinya, pengetahuan tentang ARG menjadi penting sebagai antisipasi penerapan dari kebijakan ini.

Pelaksanaan PUG mendapat perhatian penuh pemerintah dan melalui Permen Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 dibuatlah petunjuk penyusunan dan penelaahan Renja dan anggaran K/L sebagai upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kegiatan ini adalah Stranas (Strategi Nasional) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG disingkat PPRG¹. Dalam aturan ini disebutkan adanya *tri-lateral meeting* antara Kemenkeu, Bappenas, dan kementerian atau

1 *Workshop* Pendampingan PPRG di Kementerian dan Lembaga bidang Iptek, Asisten Deputi Gender dalam Iptek 20 Maret 2014.

Tabel 5. Kementerian/Lembaga yang Sudah Menerapkan ARG

8. K/L yang menerapkan ARG			
2010	11	460.511.076.000	Keuangan, Pertanian, Diknas, Kesehatan, PU, PP, MA, Dalam Negeri, Agama, Sosial, BKN
2011	11	1.312.689.066.000	Pertanian, Diknas, Kesehatan, PU, PP dan PA, Perindustrian, Agama, Nakertrans, LH, Komnas HAM, Perdagangan.
2012	19	3.085.097.924.000	Keuangan, Pertanian, Diknas, Kesehatan, PU, Bappenas, PP dan PA, MA, Hukum dan HAM, Perindustrian, ESDM, Agama, Nakertrans, Kehutanan, KelautanPerikanan, Koperasi dan UKM, Kominfo, Komnas HAM, Perdagangan.

Sumber: PPT DJA, Kemenkeu 2012

lembaga terkait, salah satunya adalah meyakinkan ARG². Dalam aturan itu disebutkan alasan pemikiran penerapan ARG (112/PMK.02/2013,91). Bahan di bawah ini adalah kutipan langsungnya:

1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki, dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya dan hasil pembangunan.
2. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Aturan kementerian RAK K/L, 112/PMK.02/2013 menunjukkan bahwa hal-hal berikut ini perlu diperhatikan:

1. Penerapan ARG pada penganggaran diletakkan pada *output*. Relevansi komponen *input* dengan *output* yang akan dihasilkan harus jelas.

2 Pernyataan di dalam penjelasan tentang PMK 112/2013, "Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai: kegiatan prioritas; jumlah PHLN; dukungan kerja sama pemerintah swasta (KPS); *anggaran responsif gender (ARG)*; anggaran pendidikan; PNB/BLU; inisiatif baru; belanja operasional; kebutuhan tambahan rupiah murni; dan pengalihan dekonsentrasi dan tugas pembantuan".

2. K/L yang wajib menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan pendampingan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).
3. Penerapan ARG fokus pada kegiatan dan *output* kegiatan dalam rangka:
 - a. penugasan prioritas pembangunan nasional;
 - b. pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau
 - c. pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk di dalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi, dan/atau pengumpulan data terpilah).
4. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan keadilan dan kesetaraan gender setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan.
5. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, melainkan lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Tantangan selanjutnya adalah perkembangan dari isu-isu penelitian multidisiplin. Pengembangan multidisiplin adalah sebuah kebutuhan mengingat PUG dan ARG sudah tampil dalam bentuk wacana dan kebijakan sehingga yang masih menjadi agenda adalah dalam konteks penerapannya (Djohan dan Santoso 2016, 103). Kebijakan berada di ruang publik di mana penerapan merupakan sebuah proses dan tujuan dari kebijakan yang bersangkutan. Paparan di atas sudah memberikan gambaran mengenai tantangan baik dalam konteks pemahaman dan pengetahuan maupun di dalam mekanisme penunjangnya. Dalam hal ini, penerapan PUG dan ARG membutuhkan koordinasi dan kegiatan pengembangan gender sebagai konsep, alat, dan kebijakan. Tujuan ideal menciptakan kesetaraan dan keadilan gender menjadi energi dan “*passion*” dari PUG dan ARG.

Dalam hal ini, gerakan perempuan merupakan kegiatan dinamis yang mendukung penerapan kebijakan pro gender. Gerakan

perempuan yang melihat dari kebutuhan perempuan menawarkan strategi kerja sama antarpemangku kepentingan. Hal ini tentunya berkaitan dengan kebijakan pro gender. Pembangunan juga perlu melihat isu seperti redistribusi. Caranya dengan melihat bagaimana kebijakan ini di lapangan, khususnya dalam konteks pelayanan publik (Soetjipto 2012, 35). Perempuan memang telah tampil di dalam area pelayanan publik, namun kurang menyoar kebutuhan perempuan.



BAB 5

Penutup: PUG Antara Kebutuhan dan Masalah Kelembagaan

Kebijakan PUG merupakan komitmen dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2000, yang menekankan perlunya memasukkan gender di dalam program nasional dan daerah. Kebijakan pendukungnya, seperti ARG, baru muncul pada 2012 setelah melalui beberapa perubahan. Kita sebenarnya memiliki UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Jika melihat rentang waktu dari tahun 2000 hingga tahun 2012, kita bisa melihat lambatnya proses implementasi PUG. Lambatnya proses ini memperlihatkan masalah kelembagaan yang mendukung program PUG. Memahami situasi tersebut, buku ini berupaya menjawab kebutuhan menyebarkan kebijakan PUG dan ARG yang dipadukan dengan proses penelitian. Pembaca dibawa pada penjelasan latar belakang pengetahuan gender, diikuti cara menerapkannya.

Data tentang posisi gender, terutama posisi perempuan, memperlihatkan perlunya meningkatkan kepedulian terhadap angka kekerasan yang terus meningkat, AKI yang masih belum beranjak turun, dan representasi perempuan di dalam politik yang terus dipermasalahkan. Tidak aneh jika timbul pertanyaan “ada apa dengan kebijakan gender di Indonesia? Mengapa berjalan lambat?” Pihak KPPPA telah bekerja maksimal membuat program dan sosialisasi tentang hal ini. Yang perlu diperhatikan adalah sinergi

dalam kerja sama mengatasi masalah seperti ini. Penerapan kebijakan ini merupakan tanggung jawab bersama, mengingat cita-cita ideal mengembangkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan kebutuhan masyarakat.

Yang menjadi konteks lambatya proses ini adalah masyarakat pada umumnya tidak memandang masalah ini sebagai masalah yang penting sehingga kurang diperhatikan dibandingkan isu lainnya. Buku ini menggunakan kata gender dan perempuan secara bergantian karena masalah gender yang sangat kentara di kelompok perempuan (dan sekarang ditambah masalah anak), dan tidak dapat dipisahkan secara *rigid*. Kedua kata tersebut saling berkaitan. Konteks lainnya adalah jika terdapat diskusi atau sosialisasi atau kegiatan yang menggunakan kedua kata ini, disikapi sebagai masalah perempuan dan kecenderungannya adalah mengirim perempuan pada kegiatan tersebut. Tidak ada salahnya jika perempuan tersebut berada pada posisi pengambil keputusan, padahal kenyataannya lebih banyak perempuan yang tidak berada pada posisi strategis ini. Selain itu, terdapat mutasi dari isu-isu yang digarap sehingga selalu ada orang baru dan membutuhkan sosialisasi yang berulang-ulang, mengaburkan kepentingan gender sebagai sebuah kebijakan.

Salah satu kepentingan yang dilihat strategis oleh KPPPA adalah lembaga penelitian dan teknologi sebagai lembaga yang tampaknya tidak terlalu membutuhkan masukan dari elemen gender. Padahal sesungguhnya posisi ini strategis dalam beberapa hal, misalnya menyediakan data terpilah gender, fakta, dan informasi yang membuka wawasan serta mampu memperlihatkan pentingnya memasukkan gender di dalam desain penelitian atau program yang dikembangkan. Salah satu penyebab lemahnya pengembangan isu gender adalah kurangnya data terpilah gender dan data pembuka wawasan. Para pembaca, peneliti, dan masyarakat umum pun tidak melihat gender sebagai sebuah isu penting.

Menyadari pentingnya posisi ini dan posisi strategis untuk mendesiminasi gender sebagai kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari posisi teoretis, metodologis, dan teknis, buku ini dibuat. Mendiseminasikan isu gender bagaikan dua sisi mata uang.

Keduanya tidak dapat dipisahkan antara penjelasan yang abstrak dan teoretis dengan yang praktis dan strategis, bahkan tidak mungkin memisahkan keduanya.

Menyadari hal tersebut, buku ini terdiri dari dua penjelasan yang saling melengkapi, yaitu abstrak dan teoretis serta praktis dan strategis. Kepedulian ini terefleksikan dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, bagian akhir buku ini disertai pedoman ringkas untuk menggunakan buku ini secara praktis. Di bagian akhir, ada pertanyaan untuk melihat siapa diri kita dan apa yang telah kita lakukan dalam kaitannya dengan bahan ini. Bagian akhir merupakan langkah demi langkah untuk menerapkannya dalam desain ditunjang borang-borang yang membantu memasukkan gender di dalam program atau desain penelitian. Buku ini tidak hanya untuk peneliti dan perekayasa, tetapi juga dapat digunakan oleh pembaca umum.

Di dalam borang teknis yang digunakan, matriks analisis gender merupakan langkah yang utama. Matriks ini menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk mempermudah dan memberikan pedoman penerapannya. Matriks ini terdiri dari 9 langkah yang dapat diulang dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pembuat desain dan program. Matriks ini selain merupakan pengejawantahan kebijakan PUG yang ada, juga menjadi media untuk melihat signifikansi atau pentingnya data terpilah gender dan data pembuka wawasan. Selain itu, matriks ini mengatasi masalah apakah seseorang buta gender ataupun melek gender. Bagi yang buta gender, yang dapat mereka lakukan adalah melihat kepentingan praktis untuk mengembangkan desain atau program yang sensitif gender sehingga proses memasukkan gender sebagai landasan teori sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Yang sudah melek gender dapat meningkatkan kapasitasnya dari kepentingan praktis berupa data dan informasi menjadi keputusan strategis untuk mengembangkan lebih lanjut gender sebagai perspektif. Bagi yang terikat ketentuan birokratis untuk menggunakan keseluruhan borang yang ada, dapat lebih mudah menggunakan dan mengisinya. Bagi pembaca umum, tahapan ini dapat dipergunakan

untuk latihan dan proses menerapkannya. Secara praktis, tahapan ini membuat pembaca memahami di tingkat dan level seperti apa gender dapat menyempurnakan desain program yang sedang dibuat.

Dalam bagian pedoman, disediakan tabel untuk melihat posisi pemahaman gender. Dapat juga digunakan secara praktis untuk melihat posisi pemahaman ini. Buku ini hendak memediasi pertanyaan-pertanyaan serta keengganan mempelajari dan memahami gender sebagai masalah sosial dan sebagai pendekatan. Selain itu, buku ini juga ingin menjembatani kubu yang berpendapat bahwa untuk menerapkan gender dibutuhkan pemihakan dengan kubu yang menerapkannya dalam konteks praktis, seperti menyediakan data dan informasi terpilah gender.

Terlepas dari gender sebagai amanat kebijakan, beberapa orang memiliki resistansi menggunakannya dengan alasan bahwa tidak tahu gender atau tidak menggunakannya sebagai landasan teoretis. Buku ini tidak mempermasalahkan perbedaan cara pandang itu, tetapi ingin memberikan jalan tengah, demi kepentingan menggambarkan masyarakat secara utuh, laki-laki dan perempuan secara proporsional. Jadi, terlepas posisi gender Anda, masalah yang berkaitan dengan gender membutuhkan data dan informasi yang terpilah gender. Melalui hal ini, diharapkan tahap awal yang paling penting bagi masyarakat adalah adanya data terpilah gender dan data pembuka wawasan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Di bagian konsep juga disediakan data untuk membantu menganalisis posisi masalah sosial yang berkaitan dengan gender. Analisis gender yang menggunakan pola Harvard yang melihat indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), apakah antara laki-laki dan perempuan telah setara ataukah masih terdapat kesenjangan atau bahkan terdapat perkembangan satu sisi yang lebih cepat dibandingkan sisi lainnya. Disertakan beberapa ilustrasi tentang penggunaan gender dalam kaitannya dengan teknologi yang cenderung melihat dirinya sebagai netral gender. Dalam konteks desain atau program disertakan juga tabel untuk monev. Monev merupakan tahapan yang penting untuk melihat pelaksanaan dan

bagaimana menyempurnakannya. Tahapan ini penting bagi sasaran praktis untuk memberikan pelayanan dan upaya mengatasi masalah yang ada. Selain itu, tahapan ini juga penting bagi sasaran strategis yang menganalisis pendekatan untuk melihat kelemahan dan pengembangannya lebih lanjut.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diskusi pentingnya pengembangan kapasitas kelembagaan di dalam penerapan kebijakan, dalam hal ini kebijakan gender. Kebijakan yang berarti adalah komitmen membutuhkan dukungan mekanisme, seperti pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan pada akhirnya merupakan upaya sinergis untuk saling bekerja sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang saling terhubung. Buku ini merupakan kerja sama antara KPPPA yang membutuhkan dan mengembangkan kepentingan praktis dengan P2KK-LIPI yang menyumbang kebutuhan strategis berupa buku dan lampirannya berupa pedoman. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari bagian awalnya karena dikembangkan berdasarkan paparan yang sudah dilakukan. Diharapkan pembaca dapat merujuk kembali pada bagian awal dan sebaliknya untuk mengembangkan desain dan program yang sensitif gender.

Daftar Pustaka



- Abdullah, Irwan. 2003. "Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial". *Jurnal Humaniora* 2 (15): 265–275.
- Amirudiin, Mariana. 2012. "Pejabat Perempuan dalam Situasi Politik Indonesia, Antara Identitas Gender dan Integritas Kepemimpinan". *Jurnal Perempuan* 75 Vol. 17 No. 4.
- Arivia, Gadis. 2006. *Kurikulum Berperspektif Gender dalam Feminisme Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Bacchi, Carol, dan Joan Eveline. 2010. *Mainstreaming Politics: Gendering Process and Feminist Theory*. Australia: University of Adelaide Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2005. *Laporan Akhir Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2012. *Laporan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010–2014*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas dan KPPPA. 2007. Gender Analysis Pathway, Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan, dalam http://bappenas.go.id/files/5913/8146/3811/gap-revisi-2007--alat-analisis-gender_20130716120956_0.pdf. diakses 16 Agustus 2007.
- Blackburn, Susan. 2009. *Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Blickhäuser, Angelika, dan Henning von Bergen. 2007. *Gender Tool Box, Fit for Gender Mainstreaming*. Berlin. www.fit-for-gender.org.

- Cook, Judith A., dan Mary Margareth Fonow. 1990. "Knowledge and Women Interest, Issues of Epistemology and Methodology in Feminist Sociological Research." Dalam *Feminist Research Methods, Exemplary Reading in the Social Science*, Joyce Mc Carl Nielzen (ed.). Bouldev: Westview Press.
- Darwin, Muhadjir M. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grha Guru dan Media Wacana.
- Djohan, Eniarti, dan Widjajanti M. Santoso. 2016. "Kajian Gender dan Tantangannya bagi Perkembangan Multidisiplin di Indonesia". Dalam *Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangannya*, Widjajanti M. Santoso (ed). Jakarta: Penerbit Obor.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gibb, Heather. 2001. *Gender Mainstreaming, Good Practice from the Asia Pacific Region, Canada*. The North-South Institute/L'Institut Nord-Sud. Diakses pada 15 Juli 2013. <http://www.nsi-ins.ca>; <http://www.apcsec.org.sg>.
- Hannan, Carolyn. 2001. *Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting Gender Equality*. Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women. UN.
- Harding, Sandra. 1986. *The Science Question in Feminism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hassan, M.Z.Y., T. Ali, dan M. Ahmad. 2006. "A Brief Review of Various Gender Analysis Methodologies". *J. Anim. Pl. Sci.* 16: 3–4. Diakses pada 6 Juni 2013. http://www.thejaps.org.pk/docs/16_3-4_2006/07-715.pdf.
- Hidayat, Rachmad. 2004. *Ilmu yang Seksis, Feminisme, dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*. Yogyakarta: Jendela.
- Husain, Djamiah. 2013. "Metodologi Penelitian Perspektif Gender." *Jurnal Kajian Perempuan Bunga Wellu* 7 (1): 24–33.
- Irlang, Yuda. 2006. "Kebijakan Publik dan Pengganggu Tanggap Gender." *Jurnal Perempuan* 46: 92. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Jayawardena, Kumari. 1986. *Feminism and Nationalism in the Third World*. London: Zed Book.

- Munti, Ratna Batara. 2006. "Sejauh Mana Negara Memperhatikan Perempuan (CEDAW dan Pertanyaan tentang Kebijakan-Kebijakan Negara)." *Jurnal Perempuan* 45.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. "Apakah Hukum Boleh Berpihak? Sebuah Pertanyaan Perempuan." *Jurnal Perempuan* 45.
- Kabeer, Naila. 1994. "Gender-Aware Policy and Planning: a Social-Relations Perspective." Dalam *Gender Planning in Development Agencies, Meeting the challenge*, Mandy Macdonald (ed). Oxford: Oxfam.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2007. *Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan*. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga*.
- Kementerian Perindustrian. 2012. *Panduan dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Perindustrian* (cetakan ke-2). Jakarta: Kementerian Perindustrian dan KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. *Modul Pelatihan Fasilitator, Perencanaan, dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender*. Jakarta: KPPPA dan GIZ.
- KPPPA dan Bappenas. 2013. *Pembangunan Kesetaraan Gender. Background Study RPJMN III (2015–2019)*. Jakarta.
- KPPPA dan UNIFEM. 2010. *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komnas Perempuan. 2008. *40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia*.
- Lengerman, Patricia Madoo, dan Jill Niebrugge-Bentley. 2003. "Teori Feminis Modern." Dalam *Teori Sosiologi Modern (ed 6th)*, George Ritzer, dan Douglas J. Goodman. Jakarta: McGraw Hill.
- Macdonald, Mandy. 1994. *Gender Planning in Development Agency, Meeting the Challenge*. Oxford: Oxfam.
- Manuh, Takyiwaa. 2010. *Gender Mainstreaming in the NUFU Programme*. Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education.

- Miroux, Anne. 2011. *Mainstreaming a Gender Perspective in Science, Technology, and Innovation Policy*. New York: United Nations.
- Nakray, Keerty. 2006. "Gender Budgeting and Its Implications for Feminist Research." Conference Proceedings Thinking Gender the NEXT Generation, UK Postgraduate Conference in Gender Studies, 21–22 Juni 2006, University of Leeds, UK. *E-paper* No. 11.
- Pratiwi, A. 2012. "Integrasi Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Reformasi Hukum." *Jurnal Hukum JENTERA Edisi Perempuan dan Hukum* 22: 5–24.
- Raharjo, Yulfita. 2010. "Konsep Gender, Kerangka Analisis Gender Berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender/ARG." Dipresentasikan dalam *Sosialisasi Penyusunan dan Penelaahan RKAKL yang Responsif Gender*, pada 1 Juni 2010 di Bappenas.
- Raharjo, Yulfita. 1991. "Perbedaan Penelitian yang Bersifat Umum dan yang Berperspektif Perempuan: Sebuah Pengantar." *Makalah* dalam Lokakarya Membuat Rencana Penelitian yang Berperspektif Wanita. Jakarta, 25 November–7 Desember 1991.
- Raharjo, Yulfita. 1995. "Pengantar Penelitian yang Berperspektif Wanita." *Kertas Kerja* 13. PPT-LIPI.
- Rahayu, Angger Wiji. 2012. "Mitos, Data, dan Fakta Perempuan Pemimpin." *Jurnal Perempuan* 75 Vol. 17 No. 4.
- Rao, Aruna, dan David Kelleher. 2005. "Is There Life After Gender Mainstreaming?" *Gender and Development* 13: (2) Mainstreaming a Critical Review. <http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/is-there-life-after-gender-mainstreaming-131582>.
- Rathgeber, Eva M. 2006. "Towards a Gender Mainstreaming Action Plan for the Department of Technical Cooperation (TC) International Atomic Energy Agency (IAEA)." diakses 3 Januari. www.iaea.org/.../Gender/RepTowardsActionPlan.
- Reinhartz, Shulamit. 1992. *Feminist Methods in Social Research*. New York: Oxford University Press.
- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2001. "Keluarga, Perempuan dan Anak dalam Kotak Kaca, Perubahan Sosial yang Terlewatkan." Dalam *Indonesia Menapak Abad 21 dalam Kajian Sosial dan Budaya*, Muhamad Hisyam (ed). Jakarta: Peradaban.

- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2013. "Kajian Gender dan Tantangannya bagi Perkembangan Multidisiplin di Indonesia." *Makalah* dalam Seminar Nasional Refleksi Ilmu Sosial, Tantangan dan Perkembangan, PMB-LIPI, Widyagraha 12–13 November 2013.
- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2014. *Pengarusutamaan Gender dalam bidang Penelitian*. Jakarta, kerja sama PMB-LIPI dan KPP-PA.
- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2014. "Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marginalisasi Perempuan." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 16 (3).
- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2015. "Laboratorium Ilmu Sosial P2KK: Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Itsbat Nikah pada Masyarakat Desa Ligarmukti. *Seminar* Internal P2KK LIPI. Naskah ini merupakan perbaikan dan penambahan dari naskah laporan singkat Labsos 2014.
- Santoso, Widjajanti Mulyono, dkk. 2015. "Kesejarahan Kajian Gender di LIPI". *Makalah* dalam Seminar Nasional Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender, di Pusat Kajian Jepang, Kampus Universitas Indonesia. 10–13 Februari 2015.
- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2014. *Gender di Lembaga Penelitian*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2013. "Partisipasi Perempuan di Perkotaan Mengangkat Inklusi Sosial." *Makalah* dalam Dialog Pemberdayaan: Membangun Generasi Muda Perempuan yang Memiliki Semangat Sosial Pada 27 November 2013, yang Dikembangkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PKB) Provinsi DKI Jakarta.
- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2012. "Dorothy E Smith, Tokoh Feminis Sosiologi." Dalam *Refleksi 80 Tahun Melly G. Tan Perspektif Perempuan dan Pembangunan*, Santoso (ed). Jakarta: PMB-LIPI dan Gading Inti Prima.
- Santoso, Widjajanti Mulyono. 2015. "Kajian Gender dan Tantangannya Bagi Perkembangan Multidisiplin di Indonesia." Dalam *Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia, Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Obor. Apa masih forthcoming?

- Smith, Dorothy E. 1990. *The Conceptual Practice of Power: A Feminist Sociology of Knowledge*. Boston: Northeastern University Press.
- Soetjipto, Ani. 2006. "Pemenuhan Hak-Hak Politik Perempuan, Sejauh Manakah?" *Jurnal Perempuan* 45.
- Soetjipto, Ani. 2012. "Perempuan dalam Politik Formal: Perdebatan Kajian Teori Feminis." *Jurnal Perempuan* 75 (17). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Stalker, Peter. 2008. Millenium Development Goals. Diakses 19 Januari 2015. <http://www.undp.or.id/pubs/docs/let%20speak%20out%20for%20mdgs%20-%20id.pdf>.
- Subono, Nur Iman. 2012. "Demokrat: Kritik Feminis dan Representasi Birokrasi". *Jurnal Perempuan* 75 Vol. 17 No. 4.
- Suprana, Jaya. 2014. *Kelirumologi Genderisme*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- UNDP. 2006. *Evaluation of Gender Mainstreaming in UNDP*. New York: UNDP.
- UNDP. 2013. *Gender Mainstreaming Made Easy: Handbook for Programme Staff*. New York: UNDP.
- United Nations Development Program (UNDP). 2013. *The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*. <http://www.undp.org>.
- UN Women Survey Report. 2014. World Survey on the Role of Women in Development 2014: Gender Equality and Sustainable Development. Diakses Januari 2015. http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/unwomen_surveyreport_advance_16oct.pdf.
- Usman, Nur Aisyah. 2012. Potret Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan di Aceh. *Jurnal Perempuan* 75 Vol. 17 No. 4.
- Wallace, Tina. 1994. "Integrating Gender Issues into Evaluation." Dalam *Gender Planning in Development Agencies, Meeting the Challenge*, Mandy Macdonald (ed). Oxford: Oxfam.
- Wieringa, Saskia Eleonora. 1999. Penghancuran Gerakan di Indonesia. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra.

Bahan Internet

- Anonim. 2013. "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kemerdekaan NKRI Ke-68 Tahun (17 Agustus) dan Hari Konstitusi (18 Agustus)". Diakses 28 Maret 2014. <http://www.komnasperempuan.go.id/.....-bagi-perempuan-indonesia/>.
- Ape. 2009. "Depkumham Fokus pada Perlindungan Hak Asasi Buruh Migran". Diakses 18 Mei 2016. <http://www.newsdetik.com/berita/1257713/depkumham-fokus-pada-perlindungan-hak-asasi-buruh-migran>.
- Bappenas. 2007. Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan. dalam http://www.bappenas.go.id/files/5813/5228/3225/evlspug2007-versicetak-16april2012__20120704121916__3584__1.pdf, diakses 16 Agustus 2016.
- Bappenas. 2012. Anggaran Responsif Gender dan Penyusunan Gender Based Statement. Diakses 19 Januari 2015. http://www.bappenas.go.id/files/6513/5027/4523/arg--penyusunan-gbs__20120720144840__0.pdf.
- Budlender, Debbie, dan Guy Hewitt. 2002. "Gender Budgets Make More Cents, Country Studies and Good Practice." Commonwealth Secretariat. <http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Gender-Budgets-Make-More-Cents-Country-Studies-and-Good-Practice.pdf>
- Circle Indonesia. 2013. Publikasi Training Gender. Diakses tanggal 25 Juli 2016. <http://www.circleindonesia.or.id/id/publikasi-training-gender-14-17-mei-2013/>.
- Griggs, David. 2013. "Sustainable Goal for People and Planet." *Nature*, 21 Maret 2013. Diakses 27 Agustus 2014. <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/844naturesjournal.pdf>, http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/unwomen_surveyreport_advance_16oct.pdf?v=1&d=20150303T172710, diakses 15 Juni 2016
- Kalyanamitra. 2013. "Ancaman Target MDG, Angka Kematian Ibu Melonjak". Diakses 27 Maret 2014. <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/09/ancaman-target-mdg-angka-kematian-ibu-melonjak-drastis/>.
- Mehta, Rekha dan Geeta Rao Gupta. 2006. "Gender Mainstreaming: Making It Happen." ICRW. Diakses 25 November 2014. <http://www.icrw.org/sites/default/files/publications/Gender-Mainstreaming-Making-It-Happen.pdf>.

- The Research and Data Section of UN Women. 2014. *World Survey on the Role of Women in Development 2014 Gender Equality and Sustainable Development*. http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/unwomen_surveyreport_advance_16oct.pdf, halaman 12.
- Walby, Sylvia. 2005. *Gender Mainstreaming: Productive Tension in Theory and Practice*. Oxford University Press. Diakses 25 November 2014. DOI:10.1093/sp/jx018.
- Walby, Sylvia. 2005. Measuring Women's Progress in Global Era, UNESCO 2005. Published by Blackwell Publishing Ltd., 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA, <http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/walby-womensprogress.pdf>, diakses 17 Agustus 2016.
- <http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html>, diakses pada 24 November 2014.
- PPT DJA, Kemenkeu. 2012. Anggaran Responsif Gender dan Penyusunan Gender Budget Statement, 202. http://www.bappenas.go.id/files/6513/5027/4523/arg--penyusunan-gbs__20120720144840__0.pdf



Pertanyaan Pemahaman Gender

No	Pertanyaan	Jawaban	
1	Apakah Anda pernah mendengar kata gender	Y	T
2	Apakah gender itu?		
3	Apakah Anda pernah membaca bacaan khusus tentang gender	Y	T
4	Apakah menggunakan gender di dalam kegiatan	Pernah	Tidak Pernah
5	Apa pendapat Anda terhadap pendekatan yang memasukkan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pendapat • Tidak suka pendekatan ini • Masih berpikir untuk memasukkannya 	
6	Apakah dalam kegiatan yang sekarang ini dilaksanakan sudah ada data terpilah gender	Y	T
7	Apakah menggunakan informasi tentang gender di dalam menggarap masalah di dalam program berjalan	Y	T
8	Apakah menggunakan teori yang berkaitan dengan gender	Y	T
9	Apakah menggunakan metode penelitian dengan perspektif gender	Y	T
10	Apakah menggunakan analisis gender	Y	T
11	Gender tidak penting di dalam program penelitian	Y	T
12	Pernah belajar tentang gender	Y	T
13	Pernah mendapatkan pelatihan gender	Y	T
14	Pernah terlibat di dalam program bertema gender	Y	T

No	Pertanyaan	Jawaban	
15	Apakah memilah sumber informasi berdasarkan gender	Y	T
16	Di dalam masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang saat ini dilakukan, apakah sudah ada data terpilah gender	Y	T
17	Apakah ada masalah dengan gender di Indonesia	Y	T
18	Apakah menggunakan teori perempuan atau yang membela dari sisi perempuan	Y	T

Berdasarkan pertanyaan di atas, dapatkah Anda mengisi di mana Anda berada dalam kotak di bawah ini? Deskripsi di kotak ini menggambarkan kecenderungan yang Anda miliki. Berdasarkan kecenderungan ini, kita bisa mulai memasukkan gender sebagai sebuah kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kecenderungan ini merupakan cara untuk meningkatkan posisi Anda di dalam kajian gender.

Tabel 6. Kecenderungan Metode Penelitian Berposisi Gender

	Tentang Perempuan	Analisis Gender	Perspektif Perempuan
Indikator (tidak bisa general karena kondisi bervariasi dan juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman gender dari pembuat keputusan)	Data pilah	Stereotip	Dominasi
	Deskripsi tentang perempuan dan laki-laki	Gap	Subordinitas
		Diskriminasi	Pengetahuan perempuan
			Metode penelitian berperspektif perempuan
Tahapan gender (tahapan dipengaruhi oleh proses pemahaman gender yang bersangkutan)	Buta gender	Melek gender	
		Sadar Gender	
Level analisis	Individu-kelompok	Individu, kelompok, dan satuan kerja	
	Satuan kerja		

Tabel 7. Kecenderungan Penelitian

Kecenderungan penelitian Anda	Penelitian Netral Gender	Penelitian Memasukkan Gender	Penelitian Memfokuskan pada gender
Deskripsi kecenderungan penelitian	Data terpilah dan sebagian analisis	Data terpilah dengan deskripsi menggambarkan perbedaan situasi sosial antara laki-laki dan perempuan	Gender berada pada setiap langkah penelitian dari TOR hingga analisisnya. Metodenya menggunakan metode yang memasukkan gender
Kecenderungan diri adalah pada (beri tanda pada kotak)			



PEDOMAN 1

Gender dalam Penelitian: Langkah demi Langkah

Pedoman ini merupakan turunan dari bagian awal yang berisi kebijakan serta konsep dan pendekatan gender. Tahapan pertama merupakan upaya melihat kadar gender yang kita miliki. Kadar ini penting untuk melihat dan memulai penggunaan pendekatan ini. Sebagai bagian dari kebijakan, pendekatan ini penting untuk diperhatikan dan signifikan dilakukan untuk menghasilkan gambaran tentang masyarakat yang lebih lengkap. Tahapan yang kedua merupakan langkah mengisi borang-borang yang disediakan untuk menerapkan anggaran responsif gender. Bagi individu atau lembaga yang berkaitan dengan birokrasi di Indonesia, tahapan ini penting untuk dilakukan karena menjadi syarat dalam perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Namun, mekanisme ini juga bisa digunakan secara praktis, terutama di dalam menggunakan matriks analisis GAP. Matriks ini dipergunakan untuk menyisir desain awal yang belum mendapatkan intervensi pendekatan gender dan bagaimana menggunakan pendekatan ini untuk mengubah desain sehingga sensitif gender.

Dasar Argumen¹

Mengapa gender melulu? Ini adalah pertanyaan yang umum dilon-tarkan. Apa yang menjadi dasar pertimbangannya? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah masih nyatanya masalah perempuan yang terlihat dari tidak tercapainya salah satu target MDGs. Yang kedua, angka kematian ibu meningkat. Seperti telah disebutkan sebelumnya survei Demografi dan Kesehatan Indonesia memperlihatkan meningkatnya angka kematian ibu, pada 2007 angkanya adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada 2012 angkanya meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (Kalyanamitra 2013). Padahal angka kematian ibu menurut target MDGs 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya, tingkat kematian ibu yang ditargetkan menurun justru meningkat. Akibatnya, target MDGs tak bisa dikejar.

Yang kedua adalah lemahnya akses terhadap hak-hak kewarganegaraan perempuan. Masalah ini terlihat dalam lemahnya perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan. Menurut Dirjen Hak Asasi Manusia Kemkumhan, jumlah buruh migran yang memiliki dokumen resmi adalah 4,5 juta, tetapi yang tidak memiliki dokumen jumlahnya empat kali lebih besar. Kelemahan ini merupakan bentuk diskriminasi. Prosesnya dimulai di masyarakat kita sendiri dengan masalah pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berikut ini adalah ilustrasinya. Tenaga kerja bergerak di sektor formal dan nonformal/domestik. Di sektor formal, kelengkapan dokumen menjadi pertimbangan utama. Namun, di sektor nonformal/domestik, hal tersebut sering kali diabaikan. Ini terjadi karena terdapat kecenderungan meremehkan dokumen, dengan alasan persyaratan yang dibutuhkan tidak seketat pada sektor formal. Bentuk-bentuk pengabaian ini bisa

1 Tulisan ini adalah perubahan terhadap tulisan pada bab V, buku Pengarusutamaan Gender dalam bidang Penelitian, dengan judul asli adalah "Step by Step Pengarusutamaan Gender di Penelitian". Draft Makalah ini dipresentasikan pada seminar intern PMB-LIPI pada 6 Juni 2014. Bagian ini sudah mengalami perubahan untuk memasukkan unsur yang lebih mendalam tentang PUG sebagai sebuah pedoman.

berupa pemalsuan KTP berdasarkan umur ataupun tempat tinggal. Pada buruh migran perempuan Indonesia kejadian semacam ini sering ditemukan, mengingat jumlah terbesar buruh migran adalah perempuan, terutama yang bekerja di sektor domestik.

Kelemahan representasi perempuan dalam hak warga negaranya dapat dilihat dari status kewarganegaraan, seperti adanya pernikahan siri. Pernikahan siri termasuk ke dalam masalah pasangan yang tidak memiliki surat nikah. Posisi perempuan sangat rentan karena tidak mendapatkan harta warisan dan kebutuhan lainnya. Selain itu, anak-anak mendapatkan hambatan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena syarat adanya akta kelahiran. Pengurusan akta dimungkinkan karena adanya surat nikah. Rendahnya representasi perempuan di dalam kebijakan dapat dilihat dari catatan Komnas Perempuan tentang meningkatnya perda yang diskriminatif terhadap perempuan dari 154 pada 2009 menjadi 342 perda pada 2013.

Pertimbangan selanjutnya adalah dalam proses pembangunan, status perempuan menjadi perhatian dunia dengan dibahasnya status perempuan yang masih rendah. Perhatian dunia diwujudkan dalam beberapa pertemuan global, seperti “*First World Conference on Women*” pada 1975 di Meksiko, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian laki-laki dan perempuan. Pada 1980 dilaksanakan “*Second World Conference on Women*” di Copenhagen, dan pada 1985 “*The Third World Conference on Women*” di Nairobi. Yang terpenting adalah “*The Fourth World Conference on Women*” di Beijing yang menghasilkan 12 *platform for action*, yaitu masalah yang berkaitan dengan “*women and poverty, education and training of women, women and health, violence against women and armed conflict, women and the economy, women in power and decision-making, institutional mechanism for the advancement of women human rights of women, women and the media, women and the environment, the girl-child*” (UN Women 2014).

Di Indonesia, kebijakan nasional Indonesia yang berhubungan dengan gender ditetapkan melalui pengarusutamaan gender (PUG), melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Kebijakan ini dapat dilihat

sebagai kepedulian pemerintah terhadap isu gender, meskipun Indonesia sudah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW), melalui UU Nomor 7/1984, bertahun-tahun sebelumnya. Kebijakan seperti ini merupakan representasi bahwa masalah yang berhubungan dengan perempuan adalah masalah yang tidak sederhana.

Kebijakan PUG saat ini sudah mendapatkan dukungan, terutama dalam pengangguran, yang disebut sebagai pengangguran responsif gender (ARG). Kebijakan pengangguran yang mendukung ARG adalah Permenkeu Nomor 112/OMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran, Kementerian Negara/Lembaga. Kebijakan ini menekankan perlunya memasukkan gender sebagai bagian dari kegiatan atau program. Selain itu, ada Permenkeu 119/PMK.02/2009 tentang *Gender Budget Statement*, atau Pernyataan Anggaran Gender, sebagai upaya untuk mempercepat dan meyakinkan bahwa gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program atau kegiatan yang ada.

Kebijakan PUG dan ARG mendorong lembaga penelitian dan peneliti pada umumnya untuk memasukkan gender dalam proses penelitian dan kegiatan lainnya. Dengan demikian, pelatihan tentang gender menjadi penting untuk menghasilkan peneliti yang memahami gender, kemudian menghasilkan massa yang memahami PUG dan ARG. PUG dan ARG mendorong upaya ke arah kesetaraan gender dalam pendidikan maupun jenjang karier di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga rekomendasi pembuatan keputusan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi lebih sadar gender serta mendorong ilmu pengetahuan lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakatnya secara adil—tidak hanya menguntungkan kaum laki-laki.

Pertimbangan lainnya adalah berkembangnya gender sebagai perspektif dan metodologi. Gender adalah konstruksi sosio-kultural yang muncul dalam kecenderungan maskulinitas dan femininitas. Banyak orang tidak memahami gender karena masih rancu dengan jenis kelamin yang mengacu pada kategori biologis laki-laki dan perempuan. Realitas gender memperlihatkan bahwa pembagian

peran berdasarkan gender melahirkan suatu kondisi ketimpangan yang menyudutkan perempuan. Kondisi ini membuat perempuan tersubordinasi oleh laki-laki. Untuk memperlihatkan posisi perempuan maka perspektif gender mengangkat kondisi perempuan dari sudut perempuan sebagai subjek.

Analisis gender memperhatikan empat faktor, yaitu akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Keempat faktor ini menjadi indikator atau parameter ketika kita ingin menunjukkan posisi dan situasi sosial perempuan dan laki-laki. Asumsi-asumsi yang perlu dipertanyakan adalah memperhatikan siapa melakukan apa, siapa memiliki apa, siapa yang membuat keputusan, tentang apa, bagaimana, dan siapa yang menerima manfaat. Analisis gender tersebut membantu memahami perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan serta hambatan-hambatan untuk berpartisipasi, termasuk kemampuan untuk berpartisipasi. Dari situ dapat ditentukan perbedaan dalam melakukan suatu kegiatan dan penerima manfaat dari kegiatan, atau bagaimana masalah gender muncul dalam sebuah situasi sosial.

Dalam khazanah keilmuan, perspektif gender menunjukkan lima hal tentang perspektif perempuan. Kelima hal itu adalah: “(1) rendahnya akses dan representasi perempuan dalam ilmu, (2) pandangan ilmu yang merendahkan perempuan, (3) pengalaman eksploitasi dalam kehidupan sosial, (4) pengalaman seksisme dalam praktik ilmu, dan (5) kepentingan perempuan untuk menjelaskan kondisinya serta mengubah keadaan” (Hidayat 2004, 126). Sebagai sebuah perspektif, pendekatan gender menunjukkan bahwa ilmu bias laki-laki karena bangunan keilmuan yang ada berasal dari pemikiran laki-laki. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, ilmu dilihat juga sebagai bangunan yang seksis. Berdasarkan asumsi tersebut, perspektif ini membangun khazanah keilmuannya.

Dari sisi gender sebagai metode penelitian, ada sebagian pemikir yang berpandangan bahwa perspektif perempuan menjadi satu-satunya cara untuk masuk dan memahami kenyataan yang dialami perempuan. Perspektif perempuan telah memberikan kontribusi unik pada ilmu sosial, terutama tentang analisis pola

keterkaitan antarsebab dan akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terlihat oleh peneliti yang dianggap tidak feminis. Karenanya dalam penelitian dengan perspektif perempuan digunakan pendekatan empati, *participatory*, dan *in-depth interview* untuk menangkap pengalaman perempuan tersebut. Paham ini beranggapan bahwa keberadaan suatu fenomena jauh lebih penting dibandingkan hasil kuantitas suatu tindakan/kegiatan.

Paparan tentang metode penelitian memperlihatkan bahwa jenis metode penelitian dapat dipergunakan oleh gender. Beberapa peneliti mengaitkan antara metode tertentu tujuan penelitian dan isu yang dikembangkan. Beberapa peneliti seakan menghasilkan metode penelitian yang baru, namun sesungguhnya mereka menghasilkan metode penelitian yang sesuai dengan analisis keilmuan dan kelemahan perempuan. Beberapa peneliti suka dengan pendekatan kualitatif, tetapi mereka yang mengembangkan data kuantitatif juga mampu menggambarkan masalah gender yang ada. Yang menjadi perhatian utama adalah posisi yang mengangkat pengalaman perempuan.

Kenali Dirimu

Paparan sebelumnya mengajak dan memotivasi orang untuk memperhatikan gender sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari proses penelitian. Pendekatan gender memiliki strategi pengarusutamaan gender yang menekankan pentingnya memasukkan isu gender dalam proses penelitian. Mereka yang sudah masuk pada pemahaman gender sebagai sebuah pengetahuan, dapat melihat bahwa selalu ada tantangan dalam menerapkannya, terutama dari diri sendiri.

Paparan ini dimulai dengan kenali dirimu, yang merupakan tahap di mana seseorang melihat dirinya dalam pemahaman dan pengetahuan gender yang dimiliki peneliti. Dalam hal ini, tidak salah apabila seseorang mengatakan bahwa dirinya buta gender atau bahkan netral gender. Namun, tidak berlebihan pula jika seseorang mengatakan bahwa dirinya sudah memahami gender.

Untuk memahami diri sendiri, pedoman ini membuat pemetaan singkat seperti di bawah ini.

Tabel 8 memperlihatkan serangkaian pembahasan yang berkaitan dengan gender dan proses akademis. Proses akademis yang dimaksudkan berkaitan dengan metode penelitian yang sensitif gender. Sebagaimana sebuah proses, menjadi sensitif gender adalah sebuah tahapan. Buta gender berarti belum memahami dan belum menggunakannya di dalam pekerjaan ataupun di dalam pengambilan keputusan. Netral gender adalah situasi di mana orang sudah mulai mengetahui atau mendengar konsep gender namun tidak merasa penting untuk memasukkannya sebagai pertimbangan. Melek gender adalah situasi di mana seseorang sudah mengetahui dan mulai menerapkan konsep ini di dalam tindakan dan pengambilan keputusan yang dilakukannya. Sensitif gender adalah situasi di mana yang bersangkutan memahami dan secara langsung menggunakan pendekatan ini untuk kegiatan dan keputusan yang dikeluarkannya.

Seperti telah disebutkan di atas, gender adalah juga sebuah metode penelitian, di mana kita bisa mengategorikannya berdasarkan keterkaitannya dengan pemahaman gender. Titik awalnya adalah pendekatan tentang perempuan yang mulai memasukkan elemen perempuan dalam kegiatan atau penelitian yang dilakukan. Seperti telah disebutkan di atas, pengetahuan perempuan terbatas. Ketika pendekatan gender dilakukan, elemen perempuanlah yang menjadi perhatian sebagai data pembanding. Analisis gender merupakan pendekatan yang secara langsung memasukkan gender dalam pertimbangan untuk kegiatan. Pendekatan perspektif perempuan secara langsung memosisikan diri untuk membela perempuan. Kenyataannya, analisis gender dan perspektif perempuan tidak dapat dipisahkan secara lugas karena saling memengaruhi.

Tabel 8 merupakan kompilasi dari indikator dan metode penelitian yang menggarap isu gender. Metode penelitian terdiri dari tiga hal, diawali dengan “tentang perempuan” hingga “perspektif perempuan”. Selanjutnya kategori tersebut dipadankan dengan indikator tentang masalah gender, mulai dari data terpilah hingga

perspektif perempuan. Lalu, tahapan pemahaman gender seperti buta gender, melek gender, hingga responsif gender.

Tabel 8. Metode Penelitian Berposisi Gender

	Tentang Perempuan	Analisis Gender	Perspektif Perempuan
Indikator (tidak bisa general karena kondisi bervariasi dan juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman gender dari pembuat keputusan)	Data pilah	Stereotip	Dominasi
	Deskripsi tentang perempuan dan laki-laki	Gap Diskriminasi	Subordinitas Pengetahuan perempuan Metode penelitian berperspektif perempuan
Tahapan gender (tahapan dipengaruhi oleh proses pemahaman gender yang bersangkutan)	Buta gender	Melek gender Sadar Gender	
Level analisis	Individu—kelompok Satuan kerja	Individu, kelompok, dan satuan kerja	

Tahapan gender memengaruhi analisis dan pengambilan keputusan. Tahapan ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan gender. Pengetahuan gender diperoleh dengan beberapa cara, seperti pelatihan, pengajaran, dan pendidikan formal. Selain itu, pengetahuan gender dapat diperoleh melalui kerja secara langsung menggarap isu gender. Tahapan ini diperhitungkan sehingga analisis gender dapat dikembangkan. Level analisis merupakan tingkat di mana fokus kajian atau analisis dilakukan. Analisis dapat dilakukan di level individu, kelompok, maupun satuan kerja, seperti lembaga ataupun organisasi. Tingkatan ini dipengaruhi oleh signifikansi dari kajian yang dilakukan.

Gender dalam Proses Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting untuk mengaplikasikan perspektif gender dalam setiap tahap proses pengembangan ilmu pengetahuan, mulai dari tahapan perumusan masalah, penyusunan desain penelitian, hingga tahap implementasi dan *monitoring*.

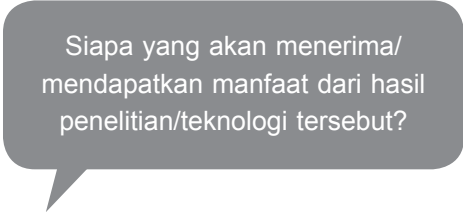
Dalam tahap penyusunan desain penelitian, misalnya, perlu diperhatikan siapa yang akan melakukan penelitian ini. Siapa pembuatnya, apakah peneliti laki-laki atau perempuan. Ini menunjukkan pentingnya keberadaan peneliti perempuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam yang selama ini didominasi kaum laki-laki. Dengan melibatkan perempuan dalam proses penelitian, peluang menggali pengetahuan, inovasi, perhatian yang ramah perempuan menjadi semakin besar sehingga semakin besar pula kesempatan membangun pengetahuan alam dan teknologi yang tidak bias gender.

Boks di bawah ini bisa dijadikan tips untuk memasukkan elemen gender dalam proses penelitian dan kegiatan di lembaga penelitian.

Analisis Situasi:

- *Identifikasi data terpilah dan data gender yang tak tersedia;*
- *Identifikasi opsi kebijakan dan rekomendasi yang secara konkret memperbaiki kesenjangan gender;*
- *Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan;*
- *Kebijakan konkret, dalam bentuk 'policy brief' berisikan beberapa opsi beserta keuntungan/kerugian opsi;*
- *Analisis keuntungan/kerugian (cost-benefit analysis),*
- *Efektivitas (cakupan, kesinambungan, tingkat keberhasilan).*

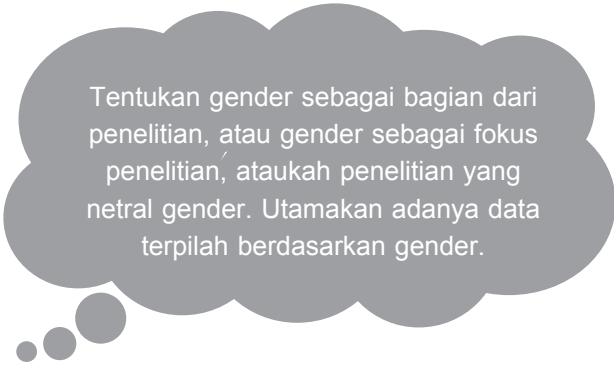
Subjek sasaran adalah penerima manfaat dari tindakan atau proses penelitian atau kegiatan lembaga penelitian lainnya. Subjek sasaran perlu dipaparkan pada laki-laki atau perempuan ataukah umum saja. Menggunakan gender sebagai pendekatan akan membuat sasaran pemanfaat menjadi semakin jelas.



Siapa yang akan menerima/
mendapatkan manfaat dari hasil
penelitian/teknologi tersebut?

Kemudian, dalam tahapan akhir suatu penelitian, yaitu pada tahapan implementasi, manfaat penelitian/teknologi tidak hanya dinikmati oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan perempuan.

Posisi Gender dalam Penelitian



Tentukan gender sebagai bagian dari penelitian, atau gender sebagai fokus penelitian, ataukah penelitian yang netral gender. Utamakan adanya data terpilah berdasarkan gender.

Gender bisa menjadi satu tim khusus atau kegiatan khusus yang sejak awal menyatakan diri memiliki pandangan gender. Gender juga dapat masuk di bagian tertentu dari bagian suatu kerangka penelitian, baik dalam masalah penelitian maupun dalam sasaran atau tujuannya. Gender juga dapat masuk sebagai metode penelitiannya.

Data Terpilah

Pendekatan ini memiliki spektrum yang luas mulai dari problematika individual, kelompok, hingga kelembagaan yang lebih luas. Sebagai *cross cutting issues*, gender dapat menjadi pokok utama dalam penelitian, namun bisa juga menjadi bagian dari penelitian yang bersangkutan. Ketika gender menjadi bagian dari penelitian yang berjalan, dapat menjadi bagian dari kesempurnaan karena menyediakan data terpilah.

Data terpilah adalah data yang menunjukkan program dan kegiatan, pemetaan kebutuhan yang disusun berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah penting dalam analisis gender untuk memetakan masalah serta menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan dan membuat rekomendasi. Dari data terpilah tersebut dapat diketahui posisi, kondisi serta kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah juga mempermudah proses *monitoring* dan evaluasi.

Pemanfaatan data terpilah dalam hal ini adalah memanfaatkan atau menggunakan data yang telah diolah untuk kepentingan tertentu sebagai *baseline* data untuk dapat mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki. Data terpilah yang lebih rinci disusun dengan memasukkan indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Data seperti ini disebut juga data pembuka wawasan.

Dampak

- Bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat seperti sumber daya keuangan atau SDM.
- Bagaimana implikasi pembiayaan yang diperoleh laki-laki dan perempuan yang setara.
- Bagaimana pemangku kepentingan perempuan dan laki-laki menerima dan mendapatkan manfaat dari sisi biaya, dampak, penerimaan keuangan serta penerapan keuangan yang disebut adil dan setara.

Dalam mekanisme pengarusutamaan gender, indikator gender menjadi elemen penting yang harus dimasukkan.

Cara untuk memasukkan dan menggunakan analisis gender adalah melihat dahulu posisi gender dengan memasukkan data dan informasi yang relevan seperti:

1. Data Pembuka Wawasan

a. Data Pembuka Wawasan

- Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Data ini mengikuti fokus dari kajian yang dilakukan individu, kelompok, maupun satuan kerja yang ada.
- Data pembuka wawasan adalah (1) data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan; (2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak dapat diperbandingkan antarjenis kelamin, misalnya data tentang kekerasan terhadap perempuan.

b. Sumber dan Jenis Data

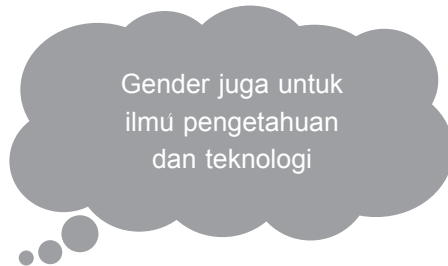
1. Data pembuka wawasan bisa berupa data dan informasi:
 - Hasil studi *baseline* dari kajian yang dilakukan, idealnya setiap kajian memiliki data *baseline* dari permasalahan yang ada. Data seperti ini menjadi sangat penting apabila individu, kelompok, dan satuan kerja hendak mengusulkan kebijakan/program/kegiatan. Data seperti ini adalah data yang sensitif terhadap adanya perbedaan gender yang ada. Selain itu, data seperti ini membuat intervensi lebih fokus pada sasaran yang ingin dikembangkan.
 - Data juga dapat berupa hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD. Melalui data yang ada, model pengarusutamaan gender menambah elemen gender

sehingga terdapat perimbangan terhadap kebutuhan gender yang ada.

2. Jenis data bisa berupa:

- Data kuantitatif seperti data statistik, misalnya data BPS, *human development index*.
- Data kualitatif, misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, wawancara mendalam, yang diperoleh melalui hasil riset kualitatif.
- Data sekunder lainnya.

Gender dalam Desain Penelitian



Gender tidak terbatas pada kegiatan ilmu sosial, tetapi meresap pada berbagai kegiatan, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengarusutamaan gender ke dalam ilmu penelitian alam pada dasarnya sudah diwacanakan beberapa dekade yang lampau. Gender dapat masuk dalam berbagai sisi, tidak selalu bermula pada gender sebagai perspektif, tetapi bisa masuk dalam berbagai sisi seperti di bawah ini.

1. Tema penelitian utama, yang secara langsung menekankan pada pentingnya masalah yang berkaitan dengan gender.
2. Menjadi bagian dari penelitian yang menekankan pada pentingnya data terpilah dari tema penelitian yang bersangkutan.
3. Menjadi bagian penting pada metode penelitian yang digunakan.
4. Menjadi bagian dari penerima manfaat dari penelitian ini.

Untuk memastikan gender masuk di dalam proses penelitian, gender perlu dimasukkan dalam salah satu atau keseluruhan bagian dari proses penelitian. Misalnya, gender dimasukkan dalam TOR, seperti dalam perumusan masalah, maksud, dan tujuan penelitian.

Perumusan Masalah Penelitian

- *Masalah gender masuk dalam perumusan masalah, dengan rumusan menggunakan kalimat yang sensitif gender.*
- *Maksud dan tujuan penelitian mempertimbangkan keadilan gender dalam isu dan tema penelitian.*

Berangkat dari perjalanan gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, penting diketahui bagaimana kebijakan nasional terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merespons fenomena ini, mengingat berbagai isu terkini bermunculan dalam diskusi-diskusi ilmiah, misalnya energi terbarukan, perubahan iklim, dan kebencanaan. Kenyataannya, hanya sedikit kebijakan nasional dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dan komunikasi yang menginternalisasi konsep gender ke dalam kajian atau studi-studi tersebut. Salah satu kesenjangan ini disebabkan kegagalan ilmu pengetahuan dan teknologi menemukan/memahami tantangan yang dihadapi perempuan dalam bidang produksi pangan, pendidikan, dan sebagainya; serta kontribusi nyata dan potensi perempuan dalam ilmu peng-

etahuan, pembangunan, dan inovasi. Sejatinnya lebih banyak lagi perhatian yang diberikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merespons/membahas kebutuhan perempuan. Pertanyaannya, di manakah isu gender harus diletakkan dalam tahapan penelitian ilmu pengetahuan alam yang lebih memfokuskan pada isu pengembangan teknologi atau suatu objek daripada individu manusia dalam proses penelitiannya?

Pertanyaan ini dijawab dengan memasukkan gender dalam situasi yang memungkinkan, seperti pada desain teknologi yang dihasilkan. Atau bahkan gender menjadi pertimbangan ketika dilakukan upaya menghasilkan teknologi untuk kelompok tertentu. Artinya, ketika sebuah teknologi diciptakan, perlu data dan informasi tentang penggunaannya dan siapa yang mendapatkan manfaatnya. Data dan informasi ini menghasilkan pandangan bahwa teknologi menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Aplikasi analisis gender dalam desain, pendekatan penelitian, pengembangan, dan difusi teknologi dapat membawa pengaruh mendalam pada penggunaan yang ramah dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Gender dan Penulisan

Seperti telah digambarkan sebelumnya, kajian yang memasukkan gender memunculkan tiga kecenderungan. Yang pertama, penelitian yang netral gender, yang menyediakan data, baik tentang laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, penelitian yang berfokus pada gender. Yang ketiga, penelitian yang memasukkan analisis gender dalam program yang umum. Dengan demikian, di dalam penulisannya pun terdapat penekanan yang berbeda.

Dalam penulisan penelitian atau kajian yang memfokuskan pada gender, ulasan tentang gender akan terdapat di semua lini, mulai dari TOR, proposal, kerangka penelitian, metode penelitian,

analisis, hingga penulisannya. Sementara penelitian yang memasukkan elemen gender memiliki satu bagian yang memaparkan tentang data terpilah. Data terpilah adalah dasar dari pelaksanaan PUG. Dalam kegiatan seperti ini, gender menjadi salah satu bagian dari analisis yang dihasilkan, sedangkan penelitian yang menyatakan diri netral gender, dasar utamanya adalah adanya data terpilah untuk menggambarkan situasi sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 9. Kecenderungan Desain Penelitian Berdasarkan Gender

Penelitian Netral Gender	Penelitian Memasukkan Gender	Penelitian Memfokuskan pada gender
Data terpilah dan sebagian analisis	Data terpilah dengan deskripsi menggambarkan perbedaan situasi sosial antara laki-laki dan perempuan	Gender berada pada setiap langkah penelitian dari TOR hingga analisisnya. Metodenya menggunakan metode yang memasukkan gender

Dalam proses penelitian yang menggunakan perspektif perempuan, menuliskan masalah dari sisi pandang perempuan adalah sebuah langkah yang penting. Jangan lupa bahwa di bagian lain sudah dijelaskan tentang ilmu pengetahuan yang seksis dan tidakimbang karena pengetahuan terbangun berdasar pengalaman laki-laki. Sebagai akibatnya, pengetahuan perempuan sangat terbatas sehingga ketika sebuah kebijakan diturunkan, kebijakan tersebut tidak mewakili laki-laki dan perempuan. Kebijakan bahkan terlihat dapat merugikan perempuan atau membiarkan perempuan tidak terlindungi oleh kebijakan yang ada.

Kelemahan ini dapat dikurangi dengan melindungi perempuan berdasarkan pengalamannya sehingga sangat penting mengangkat tulisan tentang perempuan. Pengalaman perempuan menjadi sangat penting sebagai upaya membentuk pengetahuan yang seimbang antara pemahaman laki-laki dan perempuan.

Gender dalam *Monitoring* dan Evaluasi

Isu gender dalam penelitian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek substansi termasuk di dalamnya topik penelitian dan metodologi penelitian dan aspek sumber daya peneliti atau pelaku peneliti. Kedua aspek tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Penelitian yang sensitif gender adalah penelitian yang mempertimbangkan gender sebagai variabel yang bermakna dalam penelitian, bukan semata penelitian tentang perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang berbeda. Dengan demikian, dampak peran akan berbeda pula. Relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan tentu saja dapat memengaruhi pandangan mereka tentang pembangunan dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian yang sensitif gender adalah penelitian yang mengintegrasikan perspektif dan pengalaman laki-laki dan perempuan.

Penelitian yang sensitif gender dapat dilakukan melalui fasilitasi partisipasi peneliti perempuan dan mengintegrasikan dimensi gender ke dalam substansi penelitian. Dengan demikian, potensi peneliti perempuan dapat didayagunakan secara optimal dan sekat-sekat stereotip dapat dihilangkan. Pada akhirnya, hasil penelitian yang pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan dengan setara.

Tips *Checklist*

Checklist adalah cara sederhana seperti di bawah ini untuk meyakinkan bahwa gender sudah menjadi pertimbangan dalam penelitian.

Checklist

- Apakah target *audience* (perempuan dan laki-laki) ikut terlibat dalam isu yang sedang didiskusikan/
- Apakah mereka diperkirakan terkena dampak;
- Bagaimana perempuan dan laki-laki terlibat dalam pengambilan keputusan dari isu yang didiskusikan?

Gender Budget Statement

Paparan gender yang sudah ada dapat dimasukkan ke dalam matriks yang ada untuk memperlihatkan bagaimana gender bisa masuk ke dalam program penelitian atau kegiatan akademis dari lembaga penelitian yang ada. *Template* matriks analisis gender kemudian dimasukkan ke dalam format *gender budget statement*. *Template* ini merupakan konsekuensi dari PUG dan ARG yang dimasukkan di dalam format. Bagi lembaga penelitian yang berhubungan dengan mekanisme keuangan negara, format dan *template* seperti ini menjadi masukan yang penting.

Simpulan

Pedoman ini merupakan upaya antisipatif yang menjelaskan gender dalam dua hal penting. Yang pertama adalah sebagai konsep dan metode penelitian, dan yang kedua sebagai bagian dari kebijakan nasional PUG dan ARG. Bagian ini dimaksudkan sebagai upaya mempermudah penerapan gender dalam kegiatan penelitian. Sebagai kebijakan nasional, PUG dan ARG diikuti dengan *template* perencanaan dan pendanaannya. *Template* ini dipergunakan untuk melihat proses PUG di lembaga yang bersangkutan.

Bagian ini selain berusaha mempermudah penerapan PUG dan ARG, juga menjadi sintesis dari paparan yang sudah dilakukan sebelumnya. Buku pedoman ini menjadi pengantar, baik bagi pendekatan gender maupun penerapan PUG dan ARG. PUG dan ARG tidak dapat dipisahkan paparannya karena dalam pemikiran PUG ditekankan pentingnya mengintegrasikan gender dalam proses penelitian dan kegiatan lembaga penelitian. Namun, ARG merupakan format yang mengikuti PUG sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran.

Seperti telah disinggung di atas, pilihan metodologi adalah kebebasan seorang peneliti dan akademisi, namun kepedulian ter-

hadap gender merupakan konsep yang perlu dimasukkan ke dalam perencanaannya. Memang dalam pencantumannya, gender akan mengikuti perkembangan dan kategori yang dimiliki kelompok atau individu yang bersangkutan. Bisa saja ada kelompok yang baru mengasah pemahamannya, namun ada juga yang sudah memiliki pandangan mendasar tentang data terpilah dan data untuk membuka wawasan. Data seperti ini tidak hanya penting bagi pembaca, tetapi juga bagi peneliti yang dapat menggunakannya untuk mendalami dan berempati dengan pendekatan gender.

Di bidang penelitian, isu gender mengemuka karena sasaran dan penerima manfaat penelitian mencakup laki-laki dan perempuan yang proporsinya secara umum sama besarnya. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang responsif gender, perlu dipertimbangkan masalah komunikasi dan informatika, situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang dikaitkan dengan kenyataan situasi serta kondisi kesetaraan dan keadilan gender yang ada. Dengan cara ini, gender menjadi elemen yang memengaruhi program, kegiatan, serta kebijakan. Melalui proses penelitian dan tahapan penelitian, keinginan menciptakan kesetaraan gender diwujudkan.



PEDOMAN 2

Penerapan ARG, Proses, dan Tahapan

Bagian ini menggambarkan dua pendekatan gender dalam penelitian. Yang pertama adalah turunan dari kebijakan PUG sehingga dapat dipergunakan di dalam proses penelitian. Yang kedua adalah paparan tentang dasar pemikiran perempuan, sebagian orang menyebutnya feminisme. Paparan ini diikuti penjelasan tentang metode penelitian yang mengangkat sisi perempuan. Buku ini tidak bertentangan dengan pemahaman feminisme, tetapi memberi penekanan pada kepentingan praktis dengan memasukkan PUG dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan penelitian umum memasukkan elemen gender dengan mengurangi kritik. Penelitian sendiri dimaknai secara umum tidak terbatas pada ilmu sosial semata, tetapi juga ditujukan bagi peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa jadi jarang mendengar tentang gender.

Berikutnya akan diilustrasikan tentang bagaimana menggunakan GBS dan bagaimana memperbaiki desain penelitian dengan memasukkan elemen gender di dalam desain penelitian. Paparannya dimulai dengan tabel asli yang dimiliki oleh sebuah tim.¹

Tabel tersebut adalah lembaran yang dinamakan sebagai *Gender Based Statement* (GBS). Terdapat dua matriks; matriks

1 Bahan diperoleh dari Tim Penelitian P2KK tentang Jaminan Sosial untuk Disabilitas 2013. Penulis berterima kasih atas bahan ini. Bahan ini merupakan bagian dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh KPPPA di Jakarta pada 2013.

yang pertama (Tabel 10a) merupakan dokumen awal dan matriks yang kedua (Tabel 10b) merupakan ilustrasi perubahan kegiatan penelitian yang berlangsung. Melalui ilustrasi ini, penerapan GBS dapat dipaparkan dengan sederhana. Dalam Tabel 10b terdapat tulisan *italic* sebagai contoh dari GBS. Lembaran ini digunakan untuk melakukan penerapan analisis gender di dalam program yang dikembangkan. Lembaran ini menjadi tempat untuk melakukan *exercise* atau upaya memasukkan gender di dalam program yang dikembangkan. Terdapat 9 langkah dalam upaya meneropong program, dari langkah yang masih menerapkan program, seperti dalam renstra atau proposal penelitian.

Langkah pertama, kita memasukkan program, kegiatan, dan tujuan. Dalam konteks penelitian, kita memasukkan program penelitian yang kita inginkan, memaparkan kegiatan apa saja yang terkait dengan program tersebut, dan apa tujuan penelitian yang kita inginkan. Melalui paparan seperti ini, kita berusaha memikirkan di mana gender bisa masuk di dalam kegiatan tersebut.

Langkah kedua adalah kolom yang digunakan untuk membuka wawasan berdasarkan data dan informasi yang kita miliki. Data pembuka wawasan merupakan paparan untuk memperlihatkan adakah informasi atau data tentang gender yang memperlihatkan posisi perempuan dan laki-laki di dalam program yang kita ingin kaji.

Langkah ketiga, kita memasukkan adanya kesenjangan gender yang terlihat di dalam kajian kita dengan menggunakan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) dengan menyejajarkan keempat indikator ini untuk memperlihatkan data terpilah gender. Melalui data ini, kita bisa menunjukkan adanya kesenjangan berdasarkan gender.

Langkah keempat merupakan paparan untuk melihat kondisi internal dari lembaga yang ada sehingga memperlihatkan bagaimana lembaga bisa memasukkan gender dalam sistem manajerial. Data ini memperlihatkan posisi gender dalam kelembagaan di kegiatan tersebut. Kegunaan paparan ini adalah menunjukkan posisi dan representasi gender di dalam organisasi.

Langkah kelima merupakan paparan dengan melihat kondisi eksternal, seperti adanya kebijakan yang tidak sensitif gender, adanya resistansi atau salah pengertian tentang gender. Analisis memasukkan gambaran atau informasi sosial budaya dan politik yang terkait dengan isu yang dikaji.

Langkah keenam merupakan langkah yang penting dengan memasukkan informasi tentang kesenjangan gender, masalah yang berkaitan dengan isu gender di dalam internal organisasi, dan tantangan dari situasi sosial, budaya, dan politik yang diperoleh dari luar lembaga atau luar isu yang kita kaji. Tujuannya adalah melakukan perubahan dan penyesuaian dengan kembali ke langkah pertama dan mengubahnya sesuai dengan kondisi yang ada. Perubahan ini mengacu pada kegiatan yang responsif gender. Di dalam tabel GBS langkah keenam terdapat langkah praktis berupa rumusan dampak, *outcome* (program) dan *output* (kegiatan), yang diperoleh melalui langkah-langkah ini.

Langkah ketujuh merupakan perubahan berdasarkan masukan dari langkah keenam terhadap program, kegiatan, dan tujuan yang telah ditentukan. Bisa terjadi bahwa program, kegiatan, dan tujuan telah kita tetapkan pada langkah pertama. Langkah ini menghasilkan rencana aksi yang dapat dikembangkan dalam proses menghasilkan capaian.

Langkah kedelapan merupakan sikap terhadap situasi berbasis gender yang kita temukan dalam isu yang hendak dikaji, dan mengusulkan perbaikan terhadap situasi tersebut melalui kajian yang kita lakukan. Dalam hal ini, tim bisa menentukan sendiri dengan mengacu pada pengembangan *base line* data, berdasarkan data pembuka wawasan. Ini merupakan langkah strategis untuk menghasilkan *base line* data.

Langkah kesembilan adalah upaya menghasilkan ukuran atau indikator atau parameter yang diajukan tim untuk memperlihatkan kesenjangan gender. Ukuran ini bisa kuantitatif maupun kualitatif yang berbicara tentang hasil dan dampak yang dapat diperkirakan. Ukuran ini dikembangkan untuk target kinerja.

Tabel 10a. Matriks Analisis GAP

Keb/Prog/Keg	Data Pembukaan			Isu Gender			Rencana Aksi			Pengukuran Hasil	
	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Internal Langkah 4	Eksternal Langkah 5	Perumusan kembali Langkah 6	Rencana Aksi Langkah 7	Baseline Langkah 8	Indikator Langkah 9		
a)	Tentukan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis dari program atau kegiatan yang dipilih.	Apakah sudah ada data pembuka wawasan untuk memberi gambaran kesenjangan gender terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut.	Jika belum ada data pembuka wawasan mana gunakan analisis gender yang terdiri dari: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut	Menemukan isu gender di lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual/staf	Menemukan isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya	Perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan dengan faktor penghambat memasukkan hasil analisis gender sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender	Penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan	Penetapan baseline, yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data dasar diambil dari data pembuka wawasan yang ada pada langkah 2	Penetapan indikator gender, yakni ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan tingkat perubahan pada tingkatan hasil (dampak, outcome, dan output)		
b)	Tuliskan kegiatan yang terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut.	Data dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif		akan memproduksi kegiatan tersebut baik dari sisi individual/staf (misalnya persepsi, mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut? Pada posisi ini melihat kelemahan lembaga di dalam penerapan pendekatan gender	perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya	Perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan dengan faktor penghambat memasukkan hasil analisis gender sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender	Penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan	Penetapan baseline, yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data dasar diambil dari data pembuka wawasan yang ada pada langkah 2	Penetapan indikator gender, yakni ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan tingkat perubahan pada tingkatan hasil (dampak, outcome, dan output)		
c)	Fokus pada tujuan dari kebijakan/program/kegiatan tersebut	Data dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif		akan memproduksi kegiatan tersebut baik dari sisi individual/staf (misalnya persepsi, mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut? Pada posisi ini melihat kelemahan lembaga di dalam penerapan pendekatan gender	perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya	Perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan dengan faktor penghambat memasukkan hasil analisis gender sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender	Penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan	Penetapan baseline, yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data dasar diambil dari data pembuka wawasan yang ada pada langkah 2	Penetapan indikator gender, yakni ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan tingkat perubahan pada tingkatan hasil (dampak, outcome, dan output)		

Berikut ini merupakan *exercise* menggunakan format GBS. Tulisan yang dicetak miring merupakan hasil upaya membaca program atau proposal yang sudah dicermati dengan menggunakan gender. Terlihat di langkah pertama di kolom pertama dilakukan penambahan pendekatan yang memasukkan gender. Dasar pemikirannya adalah karena tidak adanya data terpilah gender sehingga perlu memasukkan perbaikan data dengan memasukkan gender. Selain itu, diamati pula bahwa sumber informasi atau orang yang kita dekati untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti memasukkan kepedulian bahwa data tentang perempuan dan disabilitas memang sangat terbatas dibandingkan informasi tentang disabilitas secara umum. Kemudian peneliti melihat konteks data pembuka wawasan, dengan pertanyaan terhadap desain penelitian atau program yang dikembangkan; “adakah perbedaan jika memasukkan elemen gender di dalamnya?”

Ternyata berdasarkan data yang ada, terdapat kecenderungan bahwa yang diundang adalah laki-laki, atau laki-laki yang diutus untuk mewakili lembaga yang diundang. Dengan demikian, tim perlu memastikan bahwa perempuan perlu datang di dalam sosialisasi. Kemudian menggunakan analisis gender, yaitu memasukkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Dapat disebutkan dan dipaparkan kelompok mana yang tidak mendapatkan satu atau seluruh indikator dalam analisis gender ini.

Tindakan selanjutnya adalah peneliti melihat dirinya sendiri dan melihat desain penelitiannya, dengan pertanyaan “Mengapa dia tidak memasukkan gender?” Apakah karena tidak tahu, tidak mempelajari, atautkah memandang bahwa gender itu tidak penting di dalam skema desain penelitian atau program yang dilakukan. Selain secara internal, peneliti juga melihat secara eksternal mengapa gender tidak terepresentasi di dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, dapat diperlihatkan kebutuhan untuk memasukkan elemen ini. Setelah melihat situasi eksternal ini, peneliti memasukkan beberapa strategi untuk mendekati masalah dan kemudian mengajukan upaya untuk mengatasi kekosongan

Tabel 10b. Contoh Ilustrasi Matriks Analisis GAP dalam Bidang Penelitian dan Teknologi

Keb/Prog/Keg Langkah 1	Isu Gender			Rencana Aksi		Pengukuran Hasil		
	Data Pembuka Wawasan Langkah 2	Kesengangan Langkah 3	Internal Langkah 4	Eksternal Langkah 5	Perumusan Kembali Langkah 6	Rencana Aksi Langkah 7	Baseline Langkah 8	Indikator Langkah 9
<p>Program: Implementasi HAM Penyandang Disabilitas: Hak Kesehatan dan Jaminan Sosial di Kabupaten Daerah Terngatal</p> <p>Kegiatan: Sosialisasi mengenai disabilitas</p> <p>Tujuan: Mengangkat isu disabilitas kepada Stakeholder (pemerintah daerah, masyarakat, penyandang disabilitas)</p> <p>Program Implementasi HAM Penyandang Disabilitas, berbasis gender: Hak Kesehatan dan Jaminan Sosial di Kabupaten Daerah Terngatal.</p> <p>Sosialisasi mengenai disabilitas berbasis gender</p>	<p>Langkah 2</p> <p>Data:</p> <p>Mengundang peserta sosialisasi dari stakeholder. Umumnya peserta adalah laki-laki kira-kira 80 : 20</p> <p>Peneliti menyadari dari sosialisasi yang pernah ada ternyata peserta tidak berimbang di antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kebutuhan perempuan disabilitas tidak terpenuhi.</p> <p>Data Mengundang peserta sosialisasi dari stakeholder dengan mengundang peserta laki-laki dan perempuan, dengan lebih banyak memberi porsi pada perempuan</p>	<p>Langkah 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses informasi yang diperoleh perempuan mengenai kegiatan ini rendah Partisipasi perempuan rendah karena jarang dibicarakan dalam sosialisasi Kontrol: perempuan rendah (keputusan ikut sosialisasi) Manfaat laki-laki terhadap sosialisasi lebih dominan <p>Peneliti menggunakan analisis gender melihat mengapa jumlah laki-laki dan perempuan tidak berimbang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses perempuan dicoba tingkatan dengan mengundang lebih banyak perempuan Panitia menekankan bahwa perempuan perlu hadir. Sosialisasi ditambah materi tentang perlunya perempuan berpartisipasi Panitia memberikan penekanan supaya perempuan bisa hadir. Nantinya akan dibuat semacam forum untuk memberi kerangka kehadiran perempuan Dengan melibatkan perempuan maka diasumsikan mereka mendapatkan manfaat 	<p>Langkah 4</p> <p>Peneliti kurang peka gender</p> <p>Peneliti melihat kepada diri sendiri menganggap peneliti tidak peka terhadap fenomena ini.</p> <p>Peneliti melihat faktor eksternal yang terjadi di masyarakat yang diperkirakan memengaruhi partisipasi laki-laki dan perempuan di dalam kegiatan sosialisasi tersebut</p>	<p>Langkah 5</p> <p>Pandangan adat budaya yang menganggap perempuan pergi sendiri adalah abb</p> <p>Peneliti melihat faktor eksternal yang terjadi di masyarakat yang diperkirakan memengaruhi partisipasi laki-laki dan perempuan di dalam kegiatan sosialisasi tersebut</p>	<p>Langkah 6</p> <p>Mengangkat isu disabilitas kepada Stakeholder laki-laki dan perempuan (pemerintah daerah masyarakat, penyandang disabilitas)</p> <p>Peneliti mengajukan strategi supaya jaminan sosial disabilitas sampai pada masyarakat perdesaan</p>	<p>Langkah 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi isu gender tentang disabilitas kepada peneliti dan Pemda Penetaan data penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin Assesment kebutuhan disabilitas <p>Peneliti melisting kegiatan yang dapat dilakukan untuk memastihkan jaminan sosial sampai di masyarakat perdesaan</p>	<p>Langkah 8</p> <p>Data terjamin peserta sosialisasi disabilitas (laki-laki: 80% Perempuan: 20%)</p> <p>Mengarah pada langkah 2</p> <p>Peneliti kembali pada masalah yang dihadapi yang terkait pada langkah kedua dan menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan tindakan</p>	<p>Langkah 9</p> <p>Data terjamin peserta sosialisasi disabilitas (laki-laki: 70% Perempuan: 30%)</p> <p>Peneliti melakukan perubahan target dengan menambah jumlah perempuan yang hadir dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang hadir</p>

data dan informasi ini. Kemudian, peneliti kembali melihat desain awal dan melakukan perubahan untuk memastikan kesetaraan dan keseimbangan di dalam informasi dengan memasukkan gender di dalam program disabilitas.

Mekanisme Anggaran Responsif Gender

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyusunan RKA-KL harus memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Gender Budget Statement (GBS)*

Gender Budget Statement (GBS) berisi informasi tentang rencana kegiatan yang telah memasukkan isu gender yang dihadapi. Melalui GBS akan terlihat bahwa dana sudah dialokasikan untuk kegiatan bersangkutan guna menangani permasalahan gender. Analisis gender tersebut harus digambarkan dalam subkegiatan dalam format GBS. Adapun format yang harus dimasukkan dalam GBS dapat dilihat pada form di bawah ini:

Gender Budget Statement

Nama K/L :
 Unit Organisasi :
 Unit Eselon II/Satker :

Program	Nama Program yang ada pada K/L
Kegiatan	Nama Kegiatan sebagai penjabaran program
<i>Output</i> Kegiatan	Jenis <i>output</i> , volume dan satuan <i>output</i> kegiatan (ada di renstra)
Tujuan	Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya <i>output</i> kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analisis Pathway (GAP) maka dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada format GAP

<p>Analisis Situasi</p>	<p>Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan <i>output</i>. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender.</p> <p>Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilih) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud maka dapat menggunakan data kualitatif (dapat berupa ‘rumusan’ hasil dari <i>focus group discussion</i> (FGD).</p> <p><i>Output</i> kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran.</p>	
<p>Rencana Aksi</p> <p>(Dipilih hanya komponen <i>input</i> yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Tidak semua komponen <i>input</i> dicantumkan)</p>	<p>Komponen <i>Input</i> 1</p>	<p>Memuat informasi mengenai: Bagian/tahapan pencapaian suatu <i>output</i>. Komponen <i>input</i> ini harus relevan dengan <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi</p>
<p>Komponen <i>Input</i> 2 <i>Idem</i></p> <p>dst ...</p>		
<p>Alokasi Anggaran <i>Output</i> Kegiatan</p>	<p>Rp</p>	<p>Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai suatu <i>output</i> kegiatan</p>
<p>Dampak/hasil output kegiatan</p>	<p>Dampak/hasil secara luas dari <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi</p>	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaah, Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2011.

KAK/TOR

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau *Term of Reference* (TOR) menjadi salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan yang diajukan harus dilampirkan TOR sebagai salah satu acuan perencanaan anggaran untuk menguji kelayakan

pendanaan bagi kegiatan dimaksud. Hal ini mengandung arti bahwa TOR bukan hanya sebagai persyaratan administrasi dari proses pengalokasian anggaran, melainkan juga berfungsi sebagai: (1) Alat bagi pemimpin untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya; (2) Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tupoksi; dan (3) Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.

TOR juga diperlukan untuk memberikan panduan bagi pelaksana kegiatan, sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan RKA-KL. Khusus TOR PPRG harus dilampirkan bersama TOR lainnya saat penyerahan RKA-KL. TOR PPRG ini juga dianalisis oleh Departemen Keuangan untuk memastikan apakah usulan RKA-KL yang diajukan telah didahului oleh analisis gender. Oleh sebab itu, TOR PPRG perlu ditulis dan dikembangkan sejangas mungkin agar aspek gender dapat langsung tercermin dalam rencana kerja tersebut.

TOR disusun oleh unit kerja eselon II kemudian disampaikan kepada unit kerja eselon I. Setelah itu dikompilasi dan di-*review* oleh unit perencanaan dan penganggaran. TOR harus menjawab 5W + 1 H (apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana). Gunakan hasil analisis gender untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gunakanlah *database* terpilah, hasil evaluasi kegiatan, dan program dari periode sebelumnya, dan hasil analisis gender untuk mengembangkan indikator pengukuran. Uraikan tentang rencana pelaksanaan, baik tentang waktu dan lokasi maupun operasional pelaksanaan termasuk tahapannya. Jaminan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki perlu dipastikan. Besarnya rencana pembiayaan perlu dikemukakan dan asal sumber pembiayaan yang diharapkan. Adapun format TOR menurut PMK 104/2010 dapat dilihat berikut ini:

- KAK/TOR per Keluaran Kegiatan
 Kementerian Negara/Lembaga : (1)
 Unit Eselon I : (2)
 Program : (3)
 Hasil : (4)
 Unit Eselon II/ Satker : (5)
 Kegiatan : (6)
 Indikator Kinerja Kegiatan : (7)
 Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (8)
 Volume : (9)
- A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan (10)
 2. Gambaran Umum (11)
- B. Penerima Manfaat (12)
- C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan (13)
 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)
- D. Waktu Pencapaian Keluaran (15)
- E. Biaya yang Diperlukan (16)
- Penanggung Jawab : (17)
 NIP : (18)

Petunjuk Pengisian KAK/TOR

KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

Tabel 11. Petunjuk Pengisian KAK/TOR

No	URAIAN
(1)	Diisi nama kementerian negara/lembaga
(2)	Diisi nama unit eselon I
(3)	Diisi nama program sesuai hasil restrukturisasi program
(4)	Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program
(5)	Diisi nama unit eselon II
(6)	Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan
(7)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan
(8)	Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan
(9)	Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 500 km jalan, 33 laporan LHP
(10)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
(11)	Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta penjelasan target volume <i>output</i> yang akan dicapai Contoh: Kegiatan Generik atau Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L, dan Kegiatan Teknis Nonprioritas)
(12)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal maupun eksternal kementerian negara/lembaga Contoh: pegawai, petani, siswa
(13)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola
(14)	Diisi dengan tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (<i>time table</i>) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen masukan/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.
(15)	Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan
(16)	Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan
(17)	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (eselon II/kepala satker vertikal)
(18)	Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan



Glosarium

Analisis Gender adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan terlihat pada ketidakimbangan pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, dan perhatian. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk analisis gender, diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan.

APKM atau Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data dan informasi yang sudah memperlihatkan situasi laki-laki dan perempuan dalam situasi yang sama.

Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki.

Gender adalah konstruksi sosial tentang perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut muncul dalam norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Istilah “gender” digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Netral gender adalah kebijakan pada umumnya, yang belum memasukkan gender dalam proses perencanaan.

Spesifik gender adalah kebijakan yang sudah sadar tentang posisi perempuan yang lemah dan rentan sehingga memfokuskan kebijakan dan kegiatannya untuk meningkatkan peran gender.

Gender redistributif, redistributif gender, atau transformatif gender adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengubah situasi hubungan gender yang tidak setara.

desk gender atau bidang yang mengurus tentang gender, yang akan membantu dan memberi keyakinan tentang penerapan PUG.

“*the hesitator*”, mereka secara publik tampak mendukung, namun merupakan bagian dari tampilan di ruang publik.

“*the tough guys*”, adalah peneliti yang secara langsung menolak pendekatan gender.

Gender Budget Statement (GBS) adalah bagian dari dokumen perencanaan anggaran yang menginformasikan suatu kegiatan

telah responsif terhadap isu gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS merupakan bagian dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau yang biasa disebut dengan *Terms of Reference* (TOR).

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Kebijakan/Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain-lain).

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable* serta orang-orang yang tidak

mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Indeks



- Akses, 8, 14, 21, 25, 27, 43–4, 46, 48, 54–5, 75, 77, 103–5, 108, 122, 125, 132, 142, 152, 165–6
- Analisis gender, 25–6, 30, 71, 119, 128, 155–6, 158, 163
- Anggaran responsif gender (ARG), vii
- Ani-ani*, 46
- Beijing, 52, 54, 56, 123
- Bentley, Jill Niebrugge, 157
- BPPT, viii, ix, 17, 73–4
- Breadwinner*, 34
- Buruh migran, 47
- Buta gender, 17, 38, 113, 127–8
- Capacity building*, 76, 104, 107, 109
- CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), 20, 54, 124, 173
- Central role of women*, 52
- Checklist*, 83
- Copenhagen, 51–2, 123
- Data base*, 71, 152
- Data pembuka wawasan, 29–30, 112–4, 132, 142–3, 146, 150
- Data terpilah, 5, 44, 69, 71, 120, 131–2, 136–7, 148, 163
- Desk gender*, 16, 39, 68, 70, 79, 164
- Dharma Wanita, 36–7, 51, 101
- Diskriminasi, 14, 52, 54, 85, 89–90, 96, 98, 122
- Djohan, Eniarti, 77
- Dunia Ketiga, 36
- Empowerment*, 56, 62, 102
- Evolusi manusia, 34
- Fakih, Mansour, 2, 46
- Feminisme, 141
- First World Conference on Women*, 51, 123
- Focus Group Discussion* (FGD), 150
- Forward Looking Strategy*, 52
- GAD (*Gender and Development*), 52–4
- GBHN, 11
- GDI (*Gender Related Development Index*), 56, 102
- GEM (*Gender Empowerment Measurement*), 56 102
- Gender, vii–x, 1–17, 19–25, 27–31, 33–4, 36–72, 74–83, 85–7,

- 91–115, 117–22, 124–52, 155, 158, 163–166, 171, 173–4
- Gender Analysis Pathway* (GAP), 26, 113
- Gender budgeting*, 40–1, 44, 82
- Gender Budget Statement* (GBS), 22, 29, 124, 139, 149, 165
- Gender mainstreaming*, 3, 41, 54
- Gender scan*, 54
- Gender spesifik, 69
- Gerwani, 36, 56
- Harding, Sandra, 156
- Harvard, 25–6, 49, 114
- Hesitator, 78, 164
- Human Development Index* (HDI), 56, 102
- Ibuisme, 36
- Indikator gender, 29, 132, 143
- Irlang, Juda, 101
- Jenis kelamin, 17, 30, 34, 56, 71, 74, 106, 125, 131, 133, 148, 163–5
- Jurnal Perempuan, 5, 98, 100, 156, 160
- Kabeer, Naila, 66
- Kalyanamitra, 36, 58, 122, 161
- Karakter *caring*, 48
- Keadilan gender, 1, 4, 11, 17, 25, 27, 42, 46, 49, 76, 109, 112, 135, 140, 163, 166
- Kebijakan Gender Redistributif, 69
- Kebijakan nasional, 4–5, 7, 9, 11, 81, 86, 124, 135, 139
- Kebijakan Spesifik Gender, 69
- Kekerasan berbasis gender, 47
- Kemenristek, 17
- Kepentingan praktis, 24, 49, 113, 115, 141
- Kepentingan strategis, 25, 49
- Kesadaran palsu, 45
- Kesempatan, ix, 8, 37, 83, 89–90, 105, 108, 129, 141, 165
- Kesepakatan 4 Menteri, 22
- Ketidaksetaraan gender, 5
- Ketimpangan gender, 6
- Khofifah Indar Parawangsa, 11
- Kongres Perempuan Indonesia, 36
- Konstruksi sosial, 27, 31, 34, 36–7, 45–7, 50, 164
- Lengerman, Patricia Madoo, 157
- LIPI, vii–ix, 17, 71, 73, 115, 122, 158–9, 171–3
- Lotherington, Ann Therese, 78
- Manfaat, 25–6, 48, 114, 145, 147, 152, 163
- Marginalisasi gerakan perempuan, 36
- MDGs (*Millenium Development Goals*), 1, 4, 57–8, 88, 122
- Meksiko, 51, 123
- Melek gender, 8, 113, 128
- Mix methods*, 79–80
- Musrenbang, 72
- Nairobi, 52, 54, 123
- Negara berkembang, 36
- Netral gender, 127, 164
- Orde Baru, 36–7, 50
- Partisipasi, 24–26, 48, 114, 145, 147, 159, 163
- Partisipasi perempuan, 147
- Pemberdayaan, ix, 11–2, 17, 20, 22, 45, 100, 103, 109, 156–7, 159
- Pemikiran perempuan, 68, 141

- Pengarusutamaan Gender (PUG), ix, 124, 166
- Pengetahuan perempuan, 35, 65, 86, 127, 137
- Penindasan gender, 6
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014, 22
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009, tentang Gender Budget Statement (Pernyataan Anggaran Gender) sebagai komitmen dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, 15
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, 149
- Perbedaan gender, 6, 31, 34, 55, 91, 133
- Perempuan dalam pembangunan (WID), 52
- Permenkeu No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 22
- PKK, 36–7, 51, 101, 171
- PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender), 2, 15–7, 19, 28, 63, 108–9, 151, 157, 166
- Reinhartz, Shulamit, 158
- Reproduksi, 50, 53–5, 83, 91, 96
- Responsif gender, vii, ix–x, 11, 13, 20–3, 27–30, 38, 50, 63, 77, 83, 96, 99–100, 103–4, 121, 124, 128, 140, 143, 145, 163, 165
- Ripnas PP 2000–2004, 12
- Ruang privat, 50, 53
- Ruang publik, 34, 47, 50–1, 53, 78, 92, 109, 164
- Sadar gender, 38, 124
- Santoso, Widjajanti M, 171
- Seksis, 5, 65, 70, 125, 137
- Sosialisasi, 37, 48, 106–7, 109, 111–2, 144, 147–8
- Status perempuan, 51–2, 123
- Stereotypes*, 55
- Stigmatisasi, 36
- Subordinasi, 45–6
- Sumpah Pemuda, 36, 56
- Tentang perempuan, 2–3, 16, 36–62, 47, 70, 119, 127–8, 137–8, 146
- Terms of Reference* (TOR), 165
- Tough guys*, 78, 165
- Transformasi sosial, 2–3
- United Nation Decade for Women* 1976–1985, 51
- Universitas Brawijaya, 77
- Universitas Hasanuddin, 77
- Universitas Indonesia, 77, 159, 171–3
- UUD 1945, 50
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 50

UU Nomor 7/1984-ratifikasi CEDAW, 124	Victoria, 35
UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004, 13	WID (<i>Women in Development</i>), 52–3 Wieringa, Saskia, 36 <i>Witch burning</i> , 35 <i>World Plan of Action</i> , 51



Biografi Penulis

Widjajanti M. Santoso adalah peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) sejak 1989. Penulis menyelesaikan S1 hingga S3 pada bidang sosiologi. S1 (1986) dan S3 (2006) nya ditamatkan di Universitas Indonesia, sedangkan S2 (1993) ditempuh di Australian National University. Penulis memiliki minat pada sosiologi, gender, dan media. Penulis menjadi dosen tidak tetap pada Kajian Gender Universitas Indonesia. Disertasi S3 diterbitkan oleh LkiS dengan judul *Sosiologi Feminisme, Konstruksi Perempuan dalam Industri Media*. Selain bergabung pada tim penelitian perempuan dan HAM, penulis juga menggarap isu revitalisasi PKK dalam kegiatan perempuan di Desa Ligarmukti. Penulis memiliki ketertarikan pada kajian *cybersociology* dengan menggarap isu TIK dan sudah menerbitkan buku serta beberapa tulisan tentang internet di daerah pedesaan. Widjajanti juga tertarik pada isu perkembangan ilmu (sosial) dengan mengoordinasikan seminar nasional "Refleksi Ilmu Sosial di Indonesia: Tantangan dan Perkembangan". Saat ini penulis sedang menggarap isu posisi perempuan, properti, dan hukum di Indonesia. *E-mail*: widjasantoso@gmail.com



Biografi Kontributor

Augustina Situmorang adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sejak tahun 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Antropologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1989, Master (MA) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang Demography, Australian National University, Canberra, Australia, pada tahun 1996 dan 2001. Kemudian tahun 2004–2006, menjadi Postdoctoral Fellow di Asia Research Institute, National University of Singapore, Singapura. Fokus penelitian yang dilakukan adalah kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja, sosial-demographi aspek dari kesehatan, gender, perkawinan dan keluarga. Telah menerbitkan beberapa artikel pada jurnal nasional maupun internasional terkait isu-isu tersebut. Pada saat ini (2013–2015) sedang melakukan penelitian terkait “Perempuan dan Keluarga dalam Reformasi Indonesia”, bekerja sama dengan Nanyang Technology University, Singapura. *E-mail*: agustina@lipi.go.id; tinabaik2002@yahoo.com.

Ade latifa adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan sejak tahun 1988 pada bidang kependudukan. Menyelesaikan pendidikan master di Universitas Indonesia, Studi Kajian Wanita pada tahun 1998. Pada saat ini terlibat pada beberapa kegiatan penelitian, khususnya di bidang sosial-kependudukan. Pada tahun 2000 terlibat dalam kajian yang mengangkat topik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi NTB bersama dengan tim peneliti PPT-LIPI. Pada saat ini, bersama tim Kompetitif PPK-LIPI

sedang melakukan kegiatan penelitian tentang kesehatan ibu dan anak dalam kaitannya dengan pelaksanaan SJSN Kesehatan 2014. *E-mail*: sayaadelatifa@gmail.com

Aulia Hadi adalah peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI). Menyelesaikan studi sarjananya di Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Saat ini baru memperoleh gelar M.Sc. dari University of Twente, Belanda, dengan tesis yang berjudul *Interactive Communication for Bridging and Bonding Communities: Experiences of Indonesian Migrants in the Netherlands*. Dalam tesis tersebut, bidang yang dikaji adalah berbagai jenis komunikasi interaktif, termasuk tatap muka dan media sosial, untuk membangun jejaring dengan sesama masyarakat Indonesia di seluruh belahan dunia maupun masyarakat lokal yang ada di Belanda. Sejak tahun 2010, terlibat aktif dalam kajian perkotaan dan komunikasi publik, dengan gemar mengamati makna-makna simbolis dalam ruang serta keterkaitan antara ruang kota (*urban space*) dan ruang maya (*cyberspace*). Kini, juga tertarik memasukkan isu gender dalam penelitiannya untuk memahami perbedaan peran dari setiap individu. *E-mail*: aulia.hadi.mulyo@gmail.com.

Jaleswari Pramodhawardhani adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) sejak 1989. Menyelesaikan S1 komunikasi pada Universitas Tujuh Belas Agustus dan S2 pada Kajian Wanita Universitas Indonesia. Mengelola kajian perempuan dan hukum di PMB-LIPI. Tertarik pada kajian militer dan aktif di lingkungan publik yang menggarap isu masyarakat sipil. *E-mail*: jaleswariku@gmail.com

Jane Kartika Propiona adalah lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Semenjak tahun 2010 sudah bergabung dengan PMB-LIPI dan menjadi peneliti pada 2011. Kelompok marginal merupakan salah satu fokus kajian yang di-

minati, seperti penyandang disabilitas dan perempuan (isu kesetaraan gender). Selama empat tahun terakhir, kegiatan penelitian rutin yang dilakukan antara lain “Hak Kesehatan dan Pendidikan bagi Anak-anak Penyandang Disabilitas (2011), Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Bencana Alam (2012), Hak Kesehatan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Tertinggal (2013), dan Analisis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (2014)”. Selain itu juga menjadi bagian dari tim Paradigma Ilmu Sosial dan Humaniora serta tim kajian bencana untuk kegiatan Kompetitif LIPI. *E-mail*: propiana@yahoo.com

Sentiela Ocktaviana adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bergabung dengan PMB-LIPI sejak awal 2011 dan mulai aktif sebagai peneliti pada 2012. ikut dalam tim kajian “Hukum dan Perempuan”. Selama tiga tahun penelitian yang pernah dilakukan antara lain “Perempuan, Hak Kerja dan Birokrasi (2012), “Perempuan dan Konflik” (2013), dan “Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif CEDAW” (2014). Selain itu juga pernah menjadi bagian dalam tim kajian Agraria, yaitu “Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan, Analisis Hukum dan Kelembagaan”(2011–2013) serta dalam kajian konflik pertanahan bekerja sama dengan Sekretariat Wakil Presiden RI dan bersama tim berhasil menghasilkan buku dan *policy paper* bagi pemerintah pada 2012. Selain *concern* pada isu kesetaraan gender, beberapa waktu belakangan ini juga berhasil menuliskan beberapa artikel jurnal, antara lain “Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Ekonomi bagi Rakyat Miskin”, dan “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja pada Perusahaan yang Pailit”. *E-mail*: sentiela_ocktaviana@yahoo.com.

Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar

Adanya pemikiran yang tidak imbang bahwa laki-laki dijadikan sebagai yang utama membuat posisi perempuan termarginalkan. Pada ilmu pengetahuan secara umum, gender perlu mendapat perhatian karena dalam kebijakan tentang ilmu pengetahuan pun gender belum dimasukkan sebagai sebuah kebutuhan. Pada satu sisi, ini adalah sebuah konteks harmonisasi hukum. Namun, di sisi lain ini merupakan strategi untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berkeadilan gender.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengembangkan pengetahuan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Strategi ini kemudian diimplementasikan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang disebut sebagai anggaran responsif gender (ARG). Oleh karena itu, antara PUG dan ARG menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan sebab keduanya akan berjalan beriringan demi terciptanya kesetaraan gender.

Buku ini diterbitkan dengan tujuan menyinergikan kebutuhan strategis dan praktis dalam implementasi PUG dan ARG. Dengan demikian, dibutuhkan sosialisasi dan diseminasi tentang PUG dan ARG, baik sebagai mekanisme maupun alat analisis, untuk mendapatkan latar belakang mengapa kebijakan ini penting secara teori dan metodologi maupun sebagai kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.



Distributor:
Yayasan Obor Indonesia
Jln. Plajau No.10 Jakarta 10230
Telp. (021) 319 26978, 3920114
Faks. (021) 319 24488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id

LIPI Press

